



# ANALISA

1987 – 6

## Pembaruan di Negara-negara Komunis (I)

Pendahuluan

Pembangunan Sosialisme  
dan Pembaruan di Uni Soviet

Pembaruan dan Liberalisasi di Cina

Vietnam: Rekonstruksi dan  
Pembangunan Sosialis



# ANALISA

Diterbitkan oleh CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS) sebagai jurnal bulanan untuk menyajikan tulisan-tulisan tentang berbagai masalah nasional dan internasional. ANALISA adalah suatu forum terutama untuk para staf peneliti CSIS sendiri. Tetapi sumbangan tulisan dari luar CSIS akan dipertimbangkan untuk dimuat sesuai dengan kebutuhan. Naskah-naskah untuk ANALISA hendaknya diketik dengan jarak dua spasi, sepanjang 20-30 halaman kuarto, termasuk referensi dalam bentuk catatan kaki dan/atau daftar bacaan. Pengiriman naskah hendaknya disertai nama lengkap dan alamat penulis yang jelas. Untuk tulisan-tulisan yang dimuat akan disediakan honoraria yang pantas. Naskah-naskah yang tidak dimuat akan dikembalikan kepada penulis jika hal itu dikehendakinya. Isi tulisan-tulisan yang dimuat dalam ANALISA sepenuhnya menjadi tanggungjawab pribadi penulis masing-masing.

## *Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab*

J. Soedjati DJIWANDONO

## *Dewan Redaksi*

Daoed JOESOEUF  
Rufinus LAHUR  
A.M.W. PRANARKA  
M. Hadi SOESASTRO  
Harry TJAN SILALAH  
Jusuf WANANDI  
Clara JOEWONO  
Kirdi DIPOYUDO  
Djisman S. SIMANDJUNTAK  
J. Soedjati DJIWANDONO

## *Redaksi Pelaksana*

SOEBAGYO  
Pambudi SAKSANA  
S. TJOKROWARDOJO  
Ronald NANGOI

STT

SK Menpen RI No. 509/SK/DITJEN PPG/STT/1978,  
tanggal 28 Agustus 1978

ISSN

0126-222X

*Tata-Usaha*

Harga Rp 1.000,00 per eksemplar; langganan setahun (12 nomor, sudah termasuk ongkos kirim) Rp 12.000,00. Pesanan ke Bagian Penerbitan CSIS.

*Alamat*

Jalan Tanah Abang III/23-27, Jakarta 10160.  
Telepon 356532, 356533, 356534, 356535

# Daftar Isi

TAHUN XVI, NO. 6, JUNI 1987

Pengantar Redaksi	526
Pendahuluan	
<i>J. Soedjati DJIWANDONO</i>	527
Pembangunan Sosialisme dan Pembaruan di Uni Soviet	
<i>J. Soedjati DJIWANDONO</i>	536
Pembaruan dan Liberalisasi di Cina	
<i>Endi RUKMO</i>	564
Vietnam: Rekonstruksi dan Pembangunan Sosialis	
<i>Asnani USMAN</i>	580

## Pengantar Redaksi

*Salah satu isu yang banyak mendapat sorotan akhir-akhir ini adalah masalah pembaruan di beberapa negara komunis. Di RRC program modernisasi telah berjalan beberapa waktu di bawah pimpinan Deng Xiao-ping. Di Uni Soviet munculnya pimpinan baru di bawah Mikhail Gorbachev kelihatan sebagai suatu era pembaruan. Telah timbul pula spekulasi dan ekspektasi bahwa pergantian pimpinan di Vietnam belum lama berselang mungkin juga menandakan akan dimulainya langkah-langkah pembaruan.*

*Pembaruan yang meliputi berbagai bidang sosial, politik, ekonomi dan budaya di negara-negara komunis tentu saja bukan hal yang samasekali baru. Dalam nomor ini kami sajikan serangkaian tulisan tentang usaha-usaha pembaruan di beberapa negara komunis dari zaman ke zaman sebagai bahan perbandingan. Kami harapkan bahwa tulisan-tulisan itu akan menambah bahan pengetahuan dan pemikiran yang dapat memperkaya pembahasan-pembahasan tentang masalah pembaruan di negara-negara komunis pada umumnya.*

*Pada tahap ini kami belum dapat menyajikan pembahasan tentang pembaruan yang terjadi di semua negara komunis. Kami hanya memilih beberapa negara komunis yang boleh dikatakan paling menonjol dalam usaha itu. Dan karena banyak dan panjang rangkaian tulisan itu, dalam nomor ini hanya dapat kami sajikan tulisan-tulisan tentang Uni Soviet, RRC, dan Vietnam sebagai seri I.*

*Dalam seri II, yang akan kami sajikan dalam penerbitan ANALISA No. 9 (September 1987), akan kami tampilkan tulisan Kusnanto ANGGORO tentang pembaruan di beberapa negara Eropa Timur; tulisan Yakob BUDHYARTO tentang ideologi dan kebijakan ekonomi di Korea Utara; tulisan Wisnu DEWANTO tentang pembangunan dan pembaruan di Kuba; dan A.R. SUTOPO dalam tulisannya akan menyajikan pandangan-pandangannya tentang kemungkinan implikasi-implikasi usaha pembaruan di negara-negara komunis bagi negara-negara lain dalam hal kebijakan mereka menghadapi negara-negara komunis dan bagi dunia internasional umumnya, serta Asia Tenggara dan Indonesia pada khususnya.*

# Pendahuluan

J. Soedjati DJIWANDONO

"Negara komunis" sebenarnya merupakan suatu istilah yang mengandung kontradiksi. Dalam "masyarakat komunis" seperti yang diramalkan oleh Karl Marx dengan uraian teorinya yang disebutnya sebagai "sosialisme ilmiah" dan yang menjadi cita-cita akhir atau impian mereka yang mengaku sebagai penganut-penganut ideologi komunisme (Marxisme-Leninisme) justru tidak akan dikenal lagi institusi yang bernama "negara."

Istilah "negara komunis" dalam serangkaian tulisan berikut ini tidak lain menunjuk pada negara-negara yang diperintah oleh partai komunis, yaitu partai, apa pun namanya, yang mendasarkan gerakannya pada ideologi komunisme atau Marxisme-Leninisme. Istilah ini dipergunakan oleh orang-orang di luar "negara-negara komunis." Negara-negara ini sendiri oleh para pemimpin dan pendukungnya disebut sebagai "negara sosialis." Mereka mengaku belum mencapai komunisme atau "masyarakat komunis," tetapi masih berada dalam masa "transisi" ke arah komunisme. Inilah tahap "sosialis," meskipun istilah resmi yang dipergunakan, terutama di luar Uni Soviet, mungkin adalah "demokrasi rakyat" atau yang lain. Di mata Uni Soviet, mereka ini bahkan belum lagi mencapai tahapan "sosialisme" seperti Uni Soviet sendiri,<sup>1</sup> meskipun kesemuanya adalah "transisi" ke arah komunisme.

Sebenarnya Marx sendiri sering menggunakan istilah "sosialisme" dan "komunisme" secara bergantian dalam pengertian yang sama. Dia membedakan teorinya yang disebutnya sebagai "sosialisme ilmiah" dari aliran-aliran sosialisme lain yang "utopian," yang tidak "ilmiah," tetapi yang pernah disebut juga sebagai "komunisme utopian." Dalam prakatanya pada edisi bahasa Inggris *Manifesto Komunis* tahun 1888, Friedrich Engels menjelaskan penggu-

---

<sup>1</sup>Lihat R.N. Carew Hunt, *A Guide to Communist Jargon* (New York: The Macmillan Company, 1957).

naan istilah "komunis" dan bukannya "sosialis" dalam manifesto itu dalam pengertian tersebut. Selain itu, seperti dijelaskan juga dalam prakata itu, istilah "komunis," karena latar-belakang sejarah, lebih bersifat "revolusioner" daripada "sosialis."<sup>2</sup>

Tetapi Marx tidak menyebut masa "transisi" ke arah komunisme atau "masyarakat tidak berkelas" sebagai "sosialisme," melainkan "diktatur proletariat." Secara teoritis, itulah hakikat negara-negara komunis yang ada sekarang. Istilah itu tidak lagi dipergunakan dan diganti dengan "sosialis" tampaknya agar lebih terhormat dan tidak menimbulkan kecurigaan.<sup>3</sup>

Istilah "pembaruan" atau "reform" juga perlu diletakkan dalam proporsinya yang benar. Istilah ini semula dipergunakan dalam pengertian proses perubahan politik dalam kerangka konstitusi tanpa mempersoalkan legitimasi kekuasaan negara yang ada.<sup>4</sup> "Reformisme" dapat diartikan sebagai prinsip atau gerakan yang menganjurkan perbaikan melalui pembaruan dan bukannya melalui "revolusi." Istilah ini terutama dipakai dalam ungkapan "reformisme sosial-demokrat,"<sup>5</sup> yang menunjuk pada cara perjuangan kaum sosial-demokrat di Eropa Barat yang hendak mewujudkan cita-cita sosialisme melalui pembaruan, cara-cara damai, evolusi, dan mekanisme demokrasi dalam masyarakat pluralis, dan tidak melalui revolusi. Mereka ini merupakan salah satu lawan utama kaum komunis yang menghendaki terwujudnya sosialisme/komunisme melalui revolusi.

Dalam tulisan-tulisan berikut "reform" atau pembaruan dipergunakan dalam pengertian yang luas, tidak saja dalam bidang politik, tetapi juga bidang sosial dan ekonomi. Ia meliputi pula pengertian-pengertian "liberalisasi," "demokratisasi," "restrukturalisasi," "keterbukaan," "desentralisasi," "modernisasi," dan sebagainya, konsep-konsep yang dipergunakan oleh berbagai pemimpin negara komunis dari waktu ke waktu. Menarik untuk dicatat, bahwa dengan sedikit perkecualian, konsep "reform" atau pembaruan jarang dipergunakan oleh mereka sendiri. Konsep ini dipergunakan terutama oleh orang luar. Mungkin kaitannya dengan sosialisme demokrasi atau kaum sosial-demokrat telah membuat kata-kata reform, reformer, reformist, dan reformisme seakan-akan taboo bagi kaum komunis yang selalu mengecam konsep-konsep semacam itu. Para pemimpin komunis biasanya cenderung untuk menyebut perubahan-perubahan yang dilakukan sebagai "kebijakan yang

<sup>2</sup>Lihat Karl Marx & Friedrich Engels, *The Communist Manifesto*, with an introduction by A. J.P. Taylor (Penguin Books, 1967).

<sup>3</sup>Anatoliy Golitsyn, *New Lies for Old: The Communist Strategy of Deception and Disinformation* (New York: Dodd, Mead & Company, 1984), hal. 124, 132, 170.

<sup>4</sup>Roger Scruton, *Dictionary of Political Thought* (London: Pan Books Ltd., 1983).

<sup>5</sup>*Ibid.*

benar dari Partai" atau "koreksi atas kesalahan-kesalahannya."<sup>6</sup> Di Cina program pembaruan yang dilancarkan disebut sebagai "program modernisasi," dan di Uni Soviet di bawah pimpinan Mikhail Gorbachev disebut sebagai "akselerasi." Sebab itu dalam tulisan-tulisan berikut berbagai macam istilah dipergunakan. Di samping pembaruan dipergunakan juga istilah-istilah seperti "pembangunan ekonomi," "pembangunan sosialis," dan untuk Cina, "modernisasi."

"Reformisme" yang diterapkan pada komunisme -- "reformisme komunis" -- berkaitan dengan konsep "revisionisme," suatu konsep yang dipergunakan oleh mereka yang tidak menyetujuinya, karena dianggap sebagai penyimpangan dari ajaran-ajaran Marx (dan Lenin). Tetapi jika datangnya "dari atas," hal itu bukan penyimpangan atau "revisionisme," melainkan adalah suatu "interpretasi yang kreatif" dari Marxisme.<sup>7</sup>

Tetapi terpisah dari masalah revisionisme, yang memang tidak merupakan bagian dari tema tulisan-tulisan berikut, reformisme komunis tetap berbeda dari reformisme sosialis. Diterapkan pada negara komunis, reformisme tidak hanya menyangkut peningkatan kesejahteraan rakyat melainkan juga masalah membuat negara lebih efisien dalam persaingannya dengan "kapitalisme." Penjelasan tentang strategi akselerasi yang dicanangkan oleh Kongres ke-27 PKUS, misalnya, mengandung pernyataan-pernyataan sebagai berikut: "Uni Soviet memiliki lebih banyak mesin-mesin alat pemotong logam daripada AS, Jerman Barat dan Jepang menjadi satu ... Kini marilah kita berasumsi bahwa di semua cabang industri teknologi Soviet telah mencapai ukuran dunia yang paling tinggi, meskipun tentu saja hal ini merupakan tugas yang sangat sulit. Bagaimana teknologi ini dapat membantu meningkatkan produktivitas sampai ke tingkat yang lebih tinggi dari Barat?"<sup>8</sup>

Bagi para pemimpin komunis, sesuai dengan pembatasan pengertian pembaruan yang telah dikemukakan di atas, pembaruan bukanlah suatu proses berubahnya masyarakat yang monolitik lambat-laun menjadi masyarakat yang pluralistik dan melenyapnya negara totaliter,<sup>9</sup> meskipun menurut teori Marxisme kelembagaan "negara" seharusnya semakin lenyap (*wither away*). Tentang strategi akselerasi tadi juga dikatakan bahwa "kemungkinan dilakukannya program akselerasi terletak dalam penyempurnaan sosialisme."<sup>10</sup> Gorbachev juga dikutip sebagai mengatakan di depan sekelompok pejabat

<sup>6</sup>Lihat "Introduction" oleh Leopold Labedz, ed., *Revisionism* (New York: Frederick A. Praeger, Publisher, 1962), hal. 25.

<sup>7</sup>*Ibid.*, hal. 9.

<sup>8</sup>*Yearbook USSR '87* (Moscow: Novosti Press Agency Publishing House, 1987), hal. 115-116.

<sup>9</sup>Labedz, ed. *Revisionism*, hal. 25.

<sup>10</sup>*Yearbook USSR '87*, hal. 116.

ekonomi Eropa Timur, "Banyak di antara Anda melihat pemecahan atas masalah-masalah Anda dalam penggunaan mekanisme-mekanisme pasar, bukannya perencanaan langsung. Beberapa dari Anda melihat pasar sebagai penyelamat hidup bagi ekonomi Anda. Tetapi kawan-kawan, Anda seharusnya tidak berpikir tentang penyelamat hidup tetapi tentang kapalnya, dan kapal itu adalah sosialisme."<sup>11</sup>

Tetapi atas dasar pembatasan pengertian "pembaruan" dan "reformisme komunis" di atas, yang terjadi tanpa tantangan terhadap kekuasaan negara, atau terhadap sistem komunis/sosialis, menjadi persoalan pula apakah itu yang dimaksud dengan "sistem sosialis?" Sebagai negara komunis pertama, Uni Soviet merupakan model sistem sosialis, sekurang-kurangnya pada permulaan, bagi negara-negara komunis lain yang muncul sesudahnya. Tetapi dengan perkecualian Mongolia, semua negara komunis yang lain muncul pada waktu Stalin berkuasa. Pada waktu itu apa yang dapat disebut sebagai "sistem sosialis/komunis" telah mengalami perkembangannya sendiri di Uni Soviet sejak masa Lenin. Sebab itu "sistem sosialis" dalam prakteknya adalah "sistem Soviet," dan lebih tepat lagi "sistem Stalinist." Apakah sistem sosialis yang hingga sekarang berlangsung di negara-negara komunis masih dapat disebut sebagai Stalinist setelah terjadinya berbagai bentuk pembaruan memang dapat dipersoalkan. Tetapi bagaimanapun sistem sosialis yang demikian itulah, di samping sistem kapitalis di pihak lain yang ekstrem, yang biasanya dijadikan acuan dalam melihat dan menilai berbagai bentuk "pembaruan" yang terjadi di negara-negara komunis. Tulisan yang berikut akan secara singkat melacak perkembangan sistem sosialis di Uni Soviet itu di samping usaha-usaha pembaruan sepanjang sejarah negara itu.

Pendahuluan ini disajikan agar masalah "pembaruan" di negara-negara komunis dapat dilihat dalam perspektif. Pembaruan yang terjadi, apa pun namanya, adalah prakarsa dari atas, suatu "kemurahan hati" pimpinan negara apa pun motivasinya yang tentu saja kompleks, dan berlangsung dengan pengawasan dari atas (pimpinan Partai). Pimpinan partailah yang menentukan bentuknya, ruang lingkupnya, seberapa jauh, meliputi bidang apa saja dan sampai kapan. Ia bisa diubah, dipercepat atau diperlambat, dibatalkan dari atas, dan bahkan dibalikkan prosesnya, apa pun alasannya. Pengalaman berbagai negara komunis seperti yang akan tampak dalam tulisan-tulisan berikut, menunjukkan kemungkinan-kemungkinan itu.

Di satu pihak proses pembaruan itu tidak perlu ditanggapi secara sinis semata-mata. Sampai taraf tertentu, mungkin beberapa aspek pembaruan seperti hak milik pribadi, desentralisasi, sistem insentif, dan sebagainya memperoleh momentumnya sendiri sehingga dapat bersifat kurang-lebih langgeng, kendati mengalami kemajuan dan kemunduran sesuai dengan prioritas

---

<sup>11</sup>Dikutip di *Newsweek* (3 March 1987): hal. 19.

yang tentu saja ditentukan pula oleh pimpinan partai. Jika keberhasilan pembaruan dapat semakin dinikmati oleh rakyat banyak dalam hal peningkatan taraf hidup, sedikit kebebasan, dan sebagainya, bagaimanapun proses pembaruan itu adalah sesuatu yang baik.

Di samping itu, keberhasilan proses pembaruan di negara-negara komunis tidak mustahil mempunyai implikasi-implikasi tertentu yang positif bagi dunia internasional, termasuk kawasan Asia Tenggara. Tulisan yang terakhir dalam rangkaian ini oleh A.R. Sutopo mencoba melihat beberapa kemungkinan implikasi seperti itu.

Di lain pihak, pembaruan di negara-negara komunis tidak perlu menimbulkan ekspektasi -- walaupun bukan harapan-harapan -- yang berlebihan, seperti misalnya seakan-akan sistem sosialis mulai "dipreteli"; peranan ideologi komunis mulai "mengendor," sehingga terjadi semacam proses "deideologisasi"; negara-negara komunis menjadi semakin "pragmatis" dan "moderat," yaitu mereka akan bersikap lebih luwes dan mengenal kompromi terutama dalam upaya menyelesaikan konflik-konflik internasional. Lebih jauh lagi, dengan meminjam dan menerapkan apa yang biasa dikaitkan dengan praktek-praktek kapitalis negara-negara komunis itu menuju kapitalisme, sekalipun secara terselubung.

Sebenarnya bahwa sistem sosialis "meminjam" atau menerapkan praktek-praktek kapitalis bukanlah hal baru atau aneh.<sup>12</sup> Sosialisme/komunisme lahir secara dialektis dari kapitalisme. Atas dasar lembaga-lembaga dan di atas puing-puing kapitalis itulah sosialisme/komunisme akan berkembang. Begitu-lah kira-kira inti Marxisme. Sebagaimana struktur ekonomi masyarakat kapitalis telah berkembang dari struktur ekonomi masyarakat feodal, maka melalui proses yang serupa struktur ekonomi sosialisme akan berkembang dari struktur ekonomi kapitalisme.<sup>13</sup>

Tetapi dalam perkembangan di negara-negara komunis telah terjadi berbagai macam ironi. Misalnya Marx mengutuk institusi "negara" sebagai alat kapitalis untuk mengeksploitar kaum proletar. Dalam proses menuju masyarakat komunis, seperti telah disinggung di atas, institusi negara itu akan semakin lenyap. Tetapi apa yang terjadi selama ini di negara-negara komunis, dalam tahapan "diktatur proletariat" atau yang di Uni Soviet telah diganti dengan "negara seluruh rakyat," tanda-tanda semakin lenyapnya negara itu tidak pernah tampak berkembang. Sebaliknya, ia semakin mantap, kuat dan mera-

<sup>12</sup>Tetapi oleh pihak negara-negara komunis selalu disangkal bahwa pembaruan yang dilakukan mendekati sistem kapitalisme, apalagi merupakan gerakan ke arah kapitalisme. Lihat misalnya Peter Renyi, "Socialism and Reform," *The New Hungarian Quarterly*, Vol. XXIV, No. 92 (Autumn 1983): hal. 43-56.

<sup>13</sup>Lihat pembahasan dalam E.H. Carr, *The Bolshevik Revolution 1917-1923*, Vol. 2 (Penguin Books, 1966), hal. 11-35.

jalela. Tentu saja mereka akan mengemukakan dalih bahwa "sisa-sisa kapitalisme" dan unsur-unsur "kontra-revolusioner" belum terkikis habis.

Selanjutnya dalam kaitan dengan masalah pembaruan di negara-negara komunis dan ekspektasi tentang hal-hal yang serba menyenangkan yang ditimbulkannya, sebenarnya tidak banyak arti dan relevansinya membedakan antara kelompok pimpinan komunis yang "pragmatis" dan "ideolog" atau "dogmatis." Tidak pula selalu tepat membuat perbedaan itu berkaitan dengan usia. Deng Xiao-ping yang dikatakan pragmatis tentu tidak tergolong muda lagi, bahkan dengan ukuran Cina sekalipun. Sebenarnya pada umumnya para pemimpin komunis sejak Lenin, bahkan Stalin dan Mao, adalah orang-orang realis dan pragmatis. Dengan teori "sosialisme ilmiah"-nya Marx hanya memberikan ramalan tentang apa yang akan terjadi. Ia memberikan definisi tentang komunisme. Tetapi ia tidak mengatakan bagaimana dan dengan mekanisme apa komunisme itu akan tercapai, apalagi kapan. Oleh sebab itu realisasi impian-impian dan ramalan Marx tergantung pada interpretasi dan gerak langkah para penganutnya.

Di sinilah sumbangan Lenin, Stalin, Mao dan seterusnya pada Marxisme agar ia dapat dilaksanakan dan diwujudkan sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi nyata yang dihadapi masing-masing. Sebab itu ideologi Soviet maupun negara-negara komunis lainnya secara resmi bukanlah sekedar Marxisme, melainkan Marxisme-Leninisme. Lebih tepat lagi sebenarnya adalah Marxisme-Leninisme-Stalinisme dan sebagainya -- isme, dan untuk Cina tentu saja ditambah Maoisme, mungkin sekarang Dengisme, Titoisme untuk Yugoslavia, dan seterusnya. Dalam pengertian ini semua penganut Marx adalah revisionis,<sup>14</sup> dimulai dengan Lenin sendiri sebagai revisionis agung. Lebih lagi mereka semua adalah realis, pragmatis, dan ... oportunis.

Juga dalam kaitan dengan pembaruan di negara-negara komunis sering disebut-sebut adanya kelompok "teknokrat" dalam pimpinan komunis. Kalaupun hal itu benar, mereka ini adalah juga orang-orang yang telah mendapatkan keahliannya di bawah pengawasan partai. Mereka bekerja atas kepercayaan partai dan menurut garis partai. Ini tentu saja berlaku, apakah mereka itu anggota partai atau bukan.

Apakah pembaruan di negara-negara komunis, khususnya yang disebut sebagai "liberalisasi," "keterbukaan" dan "demokratisasi" akan membantu tumbuhnya kehidupan demokrasi? Persoalan ini hampir tidak mungkin dijawab secara mutlak. Dalam hal demokrasi itu menyangkut masalah kebebasan dan partisipasi, demokrasi memang merupakan masalah tingkatan (*a matter of degree*). Pada gilirannya nilai kebebasan dan partisipasi, yang dapat dikaitkan dengan "keterbukaan" yang dikemukakan oleh Gorbachev, akan ditentukan oleh tingkat kemungkinan efektivitasnya dalam mempengaruhi

<sup>14</sup>Lihat Labedz, ed. *Revisionism*, hal. 10.

kebijakan.<sup>15</sup> Sistem demokrasi menyediakan mekanisme untuk ini dalam bentuk pemilihan dan lain-lain dalam sistem *check and balance*. Apakah arti partisipasi yang hanya menyangkut pelaksanaan kebijakan? Dan apakah arti kebebasan jika seorang pemimpin dapat mengambil sikap bahwa rakyat bebas berbicara tentang apa saja yang disukai, asal dia bebas berbuat apa saja yang dikehendaki?<sup>16</sup>

Orang komunis juga berbicara tentang demokrasi dan menamakan negaranya suatu demokrasi, entah dengan nama "demokrasi rakyat" atau istilah-istilah lain yang serba berlebihan seperti "republik demokrasi." Mereka juga berbicara tentang sistem "demokrasi sentralisme" yang berlaku dalam partai.

Tetapi penyalahgunaan (*abuse*) yang semena-mena konsep demokrasi seperti itu tidak akan menutupi kenyataan bahwa sebagai sistem atau ideologi komunisme pada dasarnya bertentangan secara diametral dengan cita-cita demokrasi.<sup>17</sup> Demokrasi yang diilhami oleh ide tentang kebebasan dan persamaan berasumsikan adanya konflik kepentingan dalam masyarakat dan menyediakan mekanisme untuk mendamaikan dan mengkompromikan berbagai kepentingan. Dalam komunisme konflik kepentingan itu terjadi antara apa yang dinamakan kelas. Tetapi "perjuangan kelas" yang menandai perkembangan masyarakat itu tidak mengenal rekonsiliasi atau kompromi. Komunisme mengharapakan kemenangan apa yang disebut kelas buruh atau kaum proletar dan punahnya kelas-kelas yang lain. Ia hanya mengakui persamaan, sekurang-kurangnya dalam teori, bagi kelas proletar itu. Dan setelah kemenangan kaum proletar tidak akan terjadi lagi konflik kepentingan dan "perjuangan kelas." Proses dialektik pun berakhir, dan barulah terselenggarakan "demokrasi" yang sejati, apa pun artinya, bukan "demokrasi borjuis."

Pragmatisme, teknokrasi, pembaruan dan liberalisasi sering pula dikaitkan dengan "moderasi." Era moderasi sering dikatakan sebagai dimulai oleh Khrushchev, yang melancarkan "destalinisasi" dan politik "koeksistensi damai." Tetapi Stalin yang dikecam karena teror dan kekejamannya tidak menumpas Yugoslavia secara militer. Sebaliknya Khrushchev yang "moderat" menumpas Revolusi Hongaria tahun 1956. Brezhnev yang mengembangkan politik detente memerintahkan invasi ke Czechoslovakia tahun 1968 dan Afghanistan tahun 1979.

<sup>15</sup>Lihat pembahasan yang baik tentang demokrasi dalam G.C. Field, *Political Theory* (London: Methuen & Co. Ltd., 1956).

<sup>16</sup>Frederick Agung dari Prussia dalam abad ke-18 pernah dikabarkan sebagai mengatakan, "Rakyat saya dan saya mempunyai satu persetujuan: mereka dapat mengatakan apa yang mereka sukai dan saya dapat berbuat apa yang saya sukai"; *ibid.*, hal. 132.

<sup>17</sup>Lihat perbandingan antara pandangan komunis dan kapitalis tentang demokrasi dalam William Ebenstein dan Edwin Fogelman, *Today's Isms: Communism, Fascism, Capitalism, Socialism*, 9th ed. (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, Inc., 1985), hal. 159-172.

Oleh karena itu, tampaknya sulit bagi dunia luar untuk menentukan sikap dan kebijakan terhadap negara-negara komunis dalam kaitannya dengan pembaruan, jika yang dikehendaki adalah berkembangnya liberalisasi dan moderasi tidak hanya ke dalam tetapi juga ke luar. Negara-negara lain mungkin mempunyai peranan dalam keberhasilan pembaruan negara-negara komunis. Apa yang dapat dilihat sebagai kemajuan dalam program modernisasi Cina mungkin antara lain disebabkan oleh pendekatan dan uluran tangan pihak AS dan negara-negara Barat umumnya termasuk Jepang. Tetapi apakah uluran tangan negara-negara lain untuk mendorong keberhasilan pembaruan di negara-negara komunis pada akhirnya akan menguntungkan kepentingan negara-negara itu sendiri dan dunia internasional pada umumnya masih dapat diperdebatkan. Tidak mudah untuk mengetahui apakah uluran tangan dari luar akan mendorong liberalisasi di dalam negeri negara-negara komunis dan moderasi dalam politik luar negerinya ataukah sebaliknya. Apakah hal itu akan mendorong yang satu tetapi tidak yang lain? Dan apakah hal itu tidak justru akan menggagalkan usaha pembaruan, karena peranan negara-negara non-komunis mungkin justru akan melemahkan kedudukan pimpinan negara-negara komunis itu sendiri karena tuduhan-tuduhan "berkolaborasi dengan imperialis" oleh lawan-lawan politik di dalam negeri ataupun di antara sesama negara komunis?

Masalah-masalah itu menggambarkan kesulitan menganalisa konteks domestik politik luar negeri, terutama sepanjang hal itu menyangkut negara-negara komunis. Telah sering dikatakan bahwa politik luar negeri adalah ekstensi dari politik dalam negeri. *Foreign policy begins at home*. Tetapi terutama dalam hal negara-negara komunis, tidak selalu mudah menentukan identitas dan sifat *linkage* itu. Misalnya, tidak mudah menentukan apakah kekuatan atau kelemahan di dalam negeri negara-negara komunis membuat mereka lebih moderat ataukah sebaliknya lebih keras dalam tingkah-laku politik luar negerinya. Kebijaksanaan ekonomi baru (NEP) dan koeksistensi damai yang dirintis oleh Lenin terutama didorong oleh kelemahan di dalam negeri sebagai akibat perang dan perang saudara. Tetapi koeksistensi damai yang dilancarkan oleh Khrushchev lebih didorong oleh perasaan kuat dan kepercayaan diri karena berkembangnya kekuatan militer dan kemajuan dalam kehidupan ekonomi Soviet. Politik detente Brezhnev didorong baik oleh kekuatan maupun kelemahan. Secara militer Uni Soviet telah menandingi AS, tetapi dari segi ekonomi dan teknologi ia lemah.<sup>18</sup>

Tampak bahwa masalah pembaruan di negara-negara komunis mempunyai implikasi-implikasi yang kompleks bagi penentuan sikap dan kebijakan negara-negara lain dalam hubungannya dengan negara-negara itu. Bahkan

---

<sup>18</sup>Lihat pembahasan tentang masalah ini oleh Charles Gati, "The Stalinist Legacy in Soviet Foreign Policy" dalam *The Soviet Union Since Stalin*, ed. Stephen F. Cohen, Alexander Rabino-witch, Robert Sharlet (Bloomington dan London: Indiana University Press, 1980), hal. 279-305.

masih dapat dipersoalkan apakah negara-negara lain mempunyai kepentingan dalam keberhasilan atau kegagalan pembaruan itu.

Akhirnya, ekspektasi yang paling tidak realistis adalah bahwa pembaruan atau reform di negara-negara komunis itu akan dapat menuju ke arah "transformasi," yang berarti semakin mendekati sistem kapitalis karena menerapkan apa yang dinilai sebagai aspek-aspek atau praktek-praktek kapitalisme seperti mekanisme pasar, *free enterprise* dan motif keuntungan (meskipun disebut "insentif").<sup>19</sup> Ini mengingatkan kita pada teori "konvergensi" yang muncul dalam dasawarsa 1960-an.<sup>20</sup> Teori-teori konvergensi dan ekspektasi yang berlebihan akan terjadinya transformasi negara-negara komunis mengabaikan perbedaan yang fundamental antara sistem sosialis dan sistem demokrasi atau sistem kapitalis.

Persamaan yang dapat berkembang dalam bidang apa pun di antara kedua sistem, ideologi Marxisme-Leninisme bagi negara-negara komunis, apa pun isinya karena keluwesan yang menjadi salah satu cirinya, mempunyai fungsi yang tidak akan dilepaskan. Ia menjadi basis utama -- kalau tidak malah satu-satunya -- bagi legitimasi kekuasaan monopoli partai komunis atas kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan secara total dan menyeluruh. Dengan ideologi Marxisme-Leninisme partai komunis mengaku memiliki monopoli atas kebenaran analisa perkembangan sejarah masyarakat dan dunia. Monopoli Marxisme-Leninisme yang tidak berdasar atas kebenaran ini, dan dengan begitu monopoli atas kekuasaan negara, tidak akan diganggu-gugat. Ia ditopang dengan ancaman, dan jika perlu penggunaan kekerasan dalam berbagai bentuknya.

---

<sup>19</sup>Lihat catatan no. 12 di atas. Lihat juga Jacek Rostowski, "Economic Reform Prospects in Centrally-Planned Economies," *The World Today* (August-September 1985): hal. 145-147, yang membedakan pembaruan-pembaruan dalam sistem ekonomi dari pembaruan sistem ekonomi. Yang kedua ini memang menyentuh kekuasaan Partai Komunis sehingga menyentuh sistem sosialis.

<sup>20</sup>Untuk teori konvergensi, lihat Alfred G. Meyer, "Theories of Convergence" dalam *Change in Communist Systems*, ed. Chalmers Johnson (Stanford, Ca.: Stanford University Press, 1970), hal. 313-343; Zbigniew Brzezinski dan Samuel P. Huntington, *Political Power: USA/USSR, Similarities and Contrasts, Convergence or Evolution* (Penguin Books, 1977); dan Bertram D. Wolfe, *An Ideology in Power: Reflections on the Russian Revolution* (London: George Allen and Unwin Ltd., 1969), hal. 376-395.

# **Pembangunan Sosialisme dan Pembaruan di Uni Soviet**

J. Soedjati DJIWANDONO

Munculnya Mikhail Gorbachev sebagai pemimpin tertinggi Uni Soviet dalam kedudukannya sebagai Sekjen PKUS lebih dari dua tahun yang lalu kelihatan telah menandai dimulainya suatu era pembaruan di negeri itu. Bukan saja dia masih muda dibanding dengan para pendahulunya dan memiliki gaya penampilan yang serba baru dan canggih, tetapi begitu berkuasa dia mulai melancarkan gagasan-gagasan dan rencana-rencana pembaruan dalam bidang sosial, politik dan ekonomi.

Sebenarnya pembaruan-pembaruan itu telah dirintis oleh Yuri Andropov pendahulunya, tetapi Andropov tidak sempat mengembangkannya. Menjadi tugas Gorbachev-lah untuk mengikuti jejak dan melanjutkan langkah-langkah Andropov. Gorbachev yang masih muda mempunyai kemungkinan kesempatan lebih luas untuk melaksanakan pembaruan-pembaruan, kendati rintangan-rintangan besar untuk melakukan kebijakan seperti itu dalam masyarakat Soviet yang baik karena sejarah maupun sistem sosial politik dan ekonominya telah mengalami kebekuan, inersia, dan konservatisme.

Perhatian dunia luar pada pembaruan Gorbachev tampaknya didorong juga oleh usaha modernisasi yang telah berlangsung di RRC di bawah pimpinan pengganti Mao, bahkan pada waktu Uni Soviet tengah mengalami kemandegan di bawah pemerintahan Leonid Brezhnev yang jompo dan sakit-sakitan dan hingga munculnya Gorbachev disibukkan oleh kematian dan penguburan tiga orang pemimpin berturut-turut dalam waktu begitu singkat, mungkin salah satu pergantian pimpinan yang paling banyak dalam waktu yang paling singkat dalam sejarah. Di negara komunis yang lain, Vietnam, pergantian pimpinan yang dikukuhkan oleh Kongres ke-6 PKV dalam bulan Desember tahun lalu juga telah menimbulkan spekulasi dan ekspektasi akan adanya pembaruan. Demikianlah timbul gambaran dasawarsa ini sebagai era pem-

baruan di negara-negara komunis menghadapi abad ke-21 yang seakan-akan mengikuti jejak RRC.

Tentu saja pembaruan di negara-negara komunis bukan hal yang baru dan RRC bukanlah pelopor pembaruan itu. Sebagai negara komunis yang pertama Uni Soviet tidak saja telah memberikan model pembangunan sosialis yang semula pada dasarnya dicoba ditiru oleh negara-negara komunis lain yang timbul kemudian, tetapi ia juga telah merintis gerakan pembaruan. Usaha itu beserta perubahan gaya dan orientasi pimpinan Uni Soviet setelah Stalin telah ikut mendorong pembaruan di negara-negara komunis yang lain.

## DARI REVOLUSI BOLSHEVIK KE KOMUNISME PERANG

Seperti telah dikatakan dalam Pendahuluan, Marx hanya memberi batasan pada pengertian komunisme, tetapi dia tidak pernah mengatakan atau menunjukkan bagaimana mencapainya. Sepanjang hidup Marx menyibukkan dirinya dalam menganalisa tertib kapitalis yang ada waktu itu dan mengungkapkan kekuatan-kekuatan dalam tubuh kapitalisme yang bersifat merusak dan menghancurkan dirinya sendiri. Dia tidak menggambarkan tertib sosialis di masa depan yang akan timbul dari kehancuran kapitalisme. Dia tidak menggariskan suatu program untuk itu.

Paling banter Marx pernah memberikan secara singkat visinya tentang apa yang disebutnya sebagai "tingkat paling tinggi dari masyarakat komunis," yaitu apabila "kekuatan-kekuatan produksi akan mencapai puncaknya dan sumber-sumber kekayaan melimpah ruah," sehingga masyarakat demikian itu akan dapat menuliskan pada panji-panjinya, "Dari setiap orang menurut kemampuannya, kepada setiap orang menurut kebutuhannya." Sebab itu apa yang diwariskan oleh Marx kepada penganut-penganutnya sebenarnya tidak lebih dari suatu analisa ekonomi kapitalisme. Alat-alat ekonominya adalah alat-alat sistem kapitalis. Dia tidak mewariskan apa yang dapat disebut sebagai prospektus ekonomi sosialis. Meskipun kini ekonomi berencana telah dianggap sebagai salah satu ciri utama sistem ekonomi sosialis, misalnya, sebenarnya Marx tidak pernah dapat menunjuk dengan tepat oleh siapa perencanaan itu harus dilakukan dalam suatu masyarakat sosialis. Tetapi dalam *Komunis Manifesto* Marx bersama Engels memang memberikan sepuluh langkah yang akan diambil setelah terjadinya revolusi sosialis di mana kaum proletar merebut kekuasaan dari kaum kapitalis. Yang paling penting dari langkah-langkah itu, yang diakuinya dapat berbeda-beda dari satu negara ke yang lain, adalah penghapusan hak milik perorangan atau swasta atas tanah; suatu pajak pendapatan yang progresif; penghapusan warisan; sentralisasi perkreditan melalui bank nasional dan sentralisasi komunikasi di tangan

negara; dan perluasan pemilikan negara atas pabrik-pabrik dalam bentuknya yang ada.

Sebab itu sebelum memimpin Revolusi Bolshevik di Rusia Lenin sendiri juga kelihatan tidak mempunyai konsep yang jelas tentang bagaimana ia akan mewujudkan cita-cita sosialisme atas dasar Marxisme. Tidak lama sebelum merebut kekuasaan ia pernah mengatakan, "Kami tidak berpretensi bahwa Marx atau orang-orang Marxis mengetahui jalan ke sosialisme secara terinci. Itu omong kosong. Kami tahu arah jalan itu, kami tahu kekuatan-kekuatan kelas apa menuju jalan itu, tetapi secara konkret, praktis, ini akan ditunjukkan oleh pengalaman berjuta-juta orang apabila mereka memutuskan untuk bertindak."

Memang, salah satu segi pemikiran Lenin yang didasarkan atas teorinya tentang imperialisme adalah pandangannya bahwa imperialisme menciptakan persyaratan-persyaratan sosialisme, yaitu *trusts* dan sindikat-sindikat, bank-bank besar, jalan kereta api, telegraf dan jawatan pos; dan apabila negara imperialis dihancurkan, lembaga-lembaga ini akan utuh dan diambil-alih oleh pemerintahan proletar yang baru. Dan karena lembaga-lembaga itu telah canggih dan dapat beroperasi sendiri, apa yang akan diperlukan tinggalah menjaga agar lembaga-lembaga itu dimanfaatkan untuk kepentingan seluruh rakyat, bukan kepentingan sekelompok kecil penindas, dan ini pada hakikatnya adalah soal tata buku dan pengawasan.

Tetapi bertentangan dengan ramalan teori Marx, perebutan kekuasaan di Rusia melalui apa yang disebut sebagai "revolusi sosialis" atau "revolusi proletar," yang sebenarnya lebih tepat dinamai revolusi atau perebutan kekuasaan atas nama kaum proletar, tidak terjadi di bawah sistem kapitalisme yang telah cukup maju dengan kaum proletar yang kuat. Sebaliknya Rusia pada waktu itu adalah negara yang masih terbelakang dalam hal perkembangan kapitalisme dan industri maupun dalam pengertian-pengertian lain. Kaum proletar merupakan minoritas yang lemah di tengah mayoritas kaum tani yang menurut Marx akan selalu bersifat reaksioner, tidak bisa dipercaya, dan tidak revolusioner. Tetapi di Rusia, apalagi di Cina, kaum tani telah memegang peranan penting dalam penggulingan kekuasaan, apa pun kata dan dugaan Marx.

Oleh sebab itu kapitalisme di Rusia yang belum cukup maju, apalagi mencapai tahap "imperialisme" dalam pengertian Lenin, tidak meninggalkan institusi-institusi canggih yang menurut teori dapat melancarkan pembangunan sosialisme. Sebaliknya, sebenarnya keterbelakangan ekonomi Rusia pada waktu itu justru telah melancarkan jalan kemenangan politik kaum revolusioner, karena mereka hanya dihadapi oleh feodalisme yang telah usang dan oleh kapitalisme yang belum maju dan efisien. Tetapi kenyataan ini juga yang kemudian membuat usaha pembangunan sosialis sangat sulit karena

tidak dilakukan atas dasar kapitalis yang kuat seperti diharuskan oleh teori Marxis.

Oleh sebab itu pula tahap-tahap awal revolusi di Rusia tidak berhasil melaksanakan transisi dari sistem ekonomi borjuis ke sistem ekonomi sosialis. Apa yang dapat dilaksanakan terutama adalah menghancurkan kekuasaan ekonomi pemilik tanah feodal dan kekuasaan ekonomi borjuis daripada meletakkan dasar-dasar ekonomi masa depan. Dan langkah-langkah yang penting yang diambil dalam periode itu tidak banyak kaitannya dengan sosialisme/komunisme dalam pengertian Marxis.

Dekrit tentang tanah yang dikeluarkan pada tanggal 26 Oktober 1917 menghapuskan semua pemilikan tanah swasta atau perorangan tanpa kompensasi dan memerintahkan komite-komite tanah pada tingkat desa dan di bawahnya untuk membagi kembali tanah yang telah diperoleh dengan jalan itu kepada para petani atas dasar egaliter. Dekrit itu memberikan kepada kaum tani apa yang telah dikehendaki oleh sebagian besar dari mereka pada waktu itu tanpa menyebut-nyebut tujuan akhir kaum Bolshevik untuk menasionalisir tanah.

Sebaliknya, beberapa langkah awal kaum Bolshevik menunjukkan arah yang berlawanan, yaitu ke arah pengetatan kekuasaan pusat. Pada tanggal 2 Desember 1917 suatu Dewan Tertinggi Ekonomi Nasional didirikan untuk mengatur kehidupan ekonomi negara maupun mendamaikan dan mengkoordinir kegiatan-kegiatan badan-badan ekonomi lainnya, di antaranya serikat-serikat buruh dan komite-komite pabrik. Dekrit tanggal 14 November 1917 tentang pengawasan kaum pekerja memberikan kepada komite-komite pabrik kekuasaan untuk melakukan pengawasan atas perusahaan-perusahaan industri dan perdagangan. Dengan demikian kehidupan ekonomi menjadi semakin terpusatkan.

Sementara itu, setelah berhasil merebut kekuasaan, Lenin menghadapi kekacauan dan kehancuran akibat perang yang justru telah ikut memungkinkan keberhasilannya. Dan karena yang terjadi sebenarnya adalah perebutan kekuasaan daripada revolusi dalam arti kata yang sebenarnya, tentu saja dia belum menguasai seluruh wilayah Rusia di luar ibukota negara. Tidak lama setelah berkuasanya kaum Bolshevik di bawah pimpinan Lenin, timbullah perang saudara antara mereka dan kekuatan-kekuatan yang melawan kekuasaan komunis Bolshevik. Perang saudara ini segera melibatkan intervensi oleh negara-negara Barat sekutu Rusia dalam perang (Perang Dunia I) melawan Jerman. Di bawah Lenin Rusia sendiri meninggalkan perang dengan menandatangani Perjanjian Brest-Litovsk dengan Jerman dalam bulan Maret 1918.

Perang saudara itu berlangsung tahun 1918-1921. Dalam proses itulah Tsar Nikolas II yang telah ditumbangkan dalam revolusi sebelumnya, yaitu

Revolusi Februari 1917, dibunuh bersama keluarganya oleh kaum Bolshevik. Serangkaian langkah yang diambil oleh Lenin dalam periode inilah yang disebut sebagai "Komunisme Perang" atau "Komunisme Militan" untuk menanggulangi segala macam kekalutan yang dihadapi seperti pemberontakan kaum tani, disintegrasi angkatan bersenjata, kekurangan makan terutama di kota-kota sebagai akibat merosotnya produktivitas pertanian dan hancurnya sistem pengangkutan oleh perang dan merosotnya produktivitas ekonomi semi-industri.

Serangkaian tindakan-tindakan yang drastis itu terutama dimaksudkan untuk mengatur kembali ekonomi negara yang hancur karena peperangan dalam usaha mempersatukan negara menghadapi perang saudara. Lenin menasionalisir seluruh industri, pengangkutan dan bank; memperoleh bahan makan secara paksa dari para petani, melaksanakan sistem ransum, menghapuskan sebagian besar pembayaran dengan uang dan mengenakan wajib militer bagi kaum pekerja. Lenin menerapkan sistem ekonomi berencana secara terpusat oleh negara itu dengan meniru pengorganisasian ekonomi Jerman selama perang. Inilah asal mula sebutan "Komunisme Perang" itu. Kedua sistem dibentuk oleh keadaan darurat perang yang ditandai oleh pengerahan sumber-sumber secara massal dan penguasaan pusat secara total.

Di Rusia di bawah Lenin tindakan-tindakan drastis itu seringkali didukung oleh tindakan-tindakan polisi rahasia, yaitu *Cheka*, atau Komisi Luar Biasa untuk Perjuangan melawan Kontrarevolusi dan Sabotase. Lembaga ini telah dibentuk dalam bulan Desember 1917, jadi sebelum pecahnya perang saudara, dengan tugas utama memerangi perampokan, kebrandalan, dan perdagangan gelap serta mengawasi organisasi-organisasi yang menentang kaum Bolshevik.

Lenin berhasil mengalahkan musuh-musuhnya tahun 1921. Mereka ini adalah kekuatan-kekuatan anti-Bolshevik (disebut juga "Putih": dalam sejarah Eropa "merah" adalah warna revolusi, "putih" warna kontrarevolusi) maupun pasukan-pasukan intervensi Barat (Sekutu). Betapapun drastis dan kejamnya, Komunisme Perang telah memungkinkan rezim Bolshevik mempertahankan dan memantapkan basis kekuasaannya. Ia berhasil menghidupkan kembali ekonomi semi-industri yang telah diporakporandakan oleh perang. Dalam pengertian-pengertian ini Komunisme Perang adalah suatu sukses. Dan prinsip yang melandasinya, yaitu keharusan mempergunakan cara-cara untuk memaksakan penggunaan yang paling efektif atas sumber-sumber yang langka melalui kekuasaan negara, sering merupakan sesuatu yang menarik bagi banyak negara berkembang di Dunia Ketiga.

Tetapi sebaliknya harga yang harus dibayar, termasuk di dalamnya korban hidup manusia, bagi keberhasilan itu tidak terperikan. Diperkirakan bahwa puluhan, bahkan ratusan ribu orang, terlepas dari korban peperangan dalam pertempuran, menemui ajalnya di bawah kekejaman *Cheka*. Ratusan ribu

lainnya menemui ajalnya karena adanya tindakan-tindakan represif selama terjadinya pemberontakan kaum tani, pemogokan-pemogokan dan bentuk-bentuk pemberontakan lainnya.

Apa pun intensi semula kaum Bolshevik ketika mereka berhasil merebut kekuasaan, jelas bahwa selama berlangsungnya perang saudara dan Komunisme Perang mereka menarik kembali atau membatalkan sebagian besar dari apa pun yang sebelumnya telah mereka berikan kepada rakyat Rusia. Kebijakan-kebijakan Komunisme Perang telah membentuk ciri-ciri utama sistem Soviet seperti kekuasaan negara secara total, supremasi kepentingan partai, perencanaan ekonomi terpusat, dan penggunaan teror. Komunisme Perang juga telah memberikan petunjuk yang pertama tentang tekad kaum komunis untuk menggunakan cara apa pun yang dianggap perlu untuk menyelamatkan dirinya.

Menurut Lenin sendiri Komunisme Perang merupakan suatu eksperimen dalam langkah-langkah pertama ke arah transisi menuju sosialisme. Di antara sejarahwan memang menjadi perdebatan apakah sifat otoriter yang ekstrem pemerintahan Bolshevik itu berkembang "selama" atau "karena" keadaan darurat Komunisme Perang. Para sejarahwan Soviet tentu saja mengatakan yang kedua. Tetapi sebaliknya terdapat petunjuk-petunjuk yang lebih kuat bahwa sifat semacam itu berasal dari sikap Lenin sendiri sejak semula (seperti halnya Marx juga) dan cara-cara Lenin mengorganisir kelompoknya (*faction*) serta memisahkan diri dari semua orang yang tidak dapat setuju sepenuhnya dengan pendiriannya. Dan beberapa hal yang berkembang secara berlebihan selama Komunisme Perang seperti proses konsentrasi dan sentralisasi sebenarnya adalah kelanjutan belaka dari apa yang telah terjadi pada awal revolusi.

## KEBIJAKSANAAN EKONOMI BARU (NEP)

Berakhirnya perang saudara dan intervensi negara-negara Barat dengan kemenangan kaum Bolshevik menghadapkan mereka pada masalah pembangunan ekonomi yang mendekati kehancuran akibat perang dan perbaikan dalam berbagai bidang kehidupan akibat Komunisme Perang. Kongres ke-10 Partai pada tahun 1921 menetapkan langkah-langkah pembaruan dalam Kebijakan Ekonomi Baru (dikenal dengan NEP) sebagai tanggapan Pemerintah Bolshevik terhadap kekecewaan dan perlawanan yang ditimbulkan secara luas di kalangan rakyat oleh kebijakan-kebijakan Komunisme Perang yang keras dan represif yang telah mengakibatkan banyak kesengsaraan dan penderitaan.

Oleh karena itu NEP merupakan pembalikan sejumlah kebijakan Komunisme Perang yang serba radikal. Ia menciptakan suatu ekonomi campuran dengan industri berat, perbankan dan perdagangan luar negeri di bawah

penguasaan negara sementara sebagian besar pertanian dan industri kecil serta menengah, perdagangan eceran dan jasa-jasa berada dalam pengelolaan swasta. Penyerahan produksi pertanian secara paksa kepada negara dihapuskan dan diganti dengan pajak dalam bentuk natura pada tingkat yang jauh lebih rendah daripada penyerahan wajib sebelumnya. Dengan demikian para petani memperoleh rangsangan untuk memaksimalkan produktivitas tanah miliknya dengan harapan akan dapat menjual kelebihan yang ada di pasaran bebas untuk memperoleh keuntungan. Dan dengan hasil penjualan itu mereka dapat berharap membeli barang-barang konsumsi yang diharapkan meningkat dengan adanya privatisasi industri kecil dan perdagangan eceran tadi.

Di bawah NEP pemerintah mengusahakan terciptanya mata uang yang stabil dan memperkenalkan upah buruh industri dalam uang kontan. Keuntungan menjadi pendorong utama kehidupan ekonomi. Negara tidak lagi memiliki prioritas dalam memperoleh barang-barang. Jika para pedagang swasta dapat membayar harga yang lebih tinggi perusahaan swasta dapat bebas menjualnya kepada mereka. Maka berkembanglah di bawah NEP pedagang-pedagang semacam itu, yang dikenal dengan nama *Nepmen*. Dan dalam waktu dua tahun 50% dari seluruh perdagangan grosir dan 78% perdagangan eceran berada di tangan sektor swasta.

Sementara itu, meskipun tidak berhasil menarik kredit dalam jumlah besar dari Barat, NEP dapat memasukkan teknologi peralatan baru yang efisien. Beribu teknisi Barat membantu industrialisasi dan perusahaan-perusahaan Barat mendirikan pabrik-pabrik yang penting di Uni Soviet. Dapat dikatakan bahwa dasar-dasar industri berat dan militer Soviet telah diletakkan dalam periode NEP itu dengan bantuan Amerika, Inggris, Czechoslovakia, dan setelah Perjanjian Rapallo tahun 1922, juga Jerman, yang memberikan bantuan besar dalam militerisasi Uni Soviet. Menurut ketentuan-ketentuan rahasia perjanjian itu, Jerman membantu membangun pabrik-pabrik penerbangan dan tank yang modern di Uni Soviet. Di samping itu, Uni Soviet memperoleh pengakuan dari negara-negara Barat. Hal ini membantu menetralkan oposisi dalam negeri dan dengan begitu membantu stabilisasi politik.

Tahun-tahun pertama NEP ditandai oleh perbaikan ekonomi secara cepat. Dan karena sektor swasta mendominasi pertanian, salah satu tujuan utama NEP, yaitu pasifikasi kaum tani, tercapai. Hal ini, beserta pengendoran sentralisasi perencanaan dan pengawasan ekonomi memperkuat dukungan bagi kaum Bolshevik.

Dipulihkannya kebebasan dalam berbagai bidang kehidupan sebenarnya dapat dianggap sebagai langkah kembali ke kapitalisme. Bagi rakyat Soviet mungkin NEP merupakan puncak pasang liberalisme dalam sejarah negaranya yang meliputi bidang-bidang sosial, ekonomi dan kebudayaan, bahkan mungkin juga politik. Oleh sebab itu Lenin menyebutnya sebagai suatu

”kekalahan” dan ”kemunduran,” untuk melakukan suatu ”serangan” baru. Ia dianggap sebagai keharusan sementara. Dia juga menyebutnya sebagai ”dua langkah maju, satu langkah mundur.”

Pada Kongres ke-3 *Komintern* Lenin menjelaskan bahwa di samping kelas penindas, hampir semua negara kapitalis mempunyai produsen-produsen kecil dan penggarap-penggarap tanah kecil mereka. Di Rusia mereka ini merupakan mayoritas besar. Persoalan utama revolusi kini adalah perjuangan melawan kedua kelas itu. Tetapi mereka tidak dapat diatasi semata-mata dengan jalan penyitaan dan pengusiran seperti yang telah diterapkan pada kaum penindas; cara-cara lain akan diperlukan. Oleh sebab itu dalam NEP terkandung dipertahankannya aliansi kaum proletar dengan kaum tani agar kaum proletar dapat mempertahankan peranan kepemimpinannya dan kekuasaan negara.

Lebih dari itu, Lenin menyadari bahwa terjadinya Revolusi Bolshevik di Rusia dengan taraf perkembangan kapitalis dan kelas proletar yang belum maju sebenarnya tidak sesuai benar dengan ajaran Marx. Oleh karena itu sekurang-kurangnya pada mulanya ia dan kawan-kawannya tidak yakin betul bahwa revolusi mereka akan dapat selamat dipertahankan, kecuali jika dan apabila terjadi revolusi sosialis di negara-negara lain, khususnya Eropa Barat pada waktu itu, yang telah maju. Lenin mengatakan bahwa di Rusia masih terdapat minoritas kaum pekerja di industri dan mayoritas besar petani-petani kecil. Suatu revolusi sosialis dalam negara seperti itu pada akhirnya dapat berhasil hanya atas dua syarat. Pertama adalah dukungan pada saat yang tepat oleh suatu revolusi sosialis di satu atau beberapa negara utama, dan kedua, suatu kompromi antara kaum proletar yang melaksanakan diktator proletariat atau memegang kekuasaan negara di tangannya di satu pihak dan mayoritas rakyat petani di pihak lain.

Pelaksanaan NEP pada saat harapan dan kepercayaan akan suatu revolusi sosialis internasional secara dini menjadi semakin tipis tampak sebagai pergeseran tekanan dari persyaratan yang pertama ke persyaratan yang kedua. Karena kaum proletar Eropa Barat tidak berhasil membantu menyelamatkannya, nasib revolusi di Rusia masih tetap tergantung pada kaum tani. Sebab itu NEP telah merupakan suatu *necessary evil*. Hanya persetujuan dengan kaum tani akan dapat menyelamatkan revolusi sosialis di Rusia sampai revolusi serupa terjadi di negara-negara lain. Hakikat NEP adalah mempertahankan untuk sementara kaitan antara kaum tani dan kaum proletar, kaitan yang telah memenangkan perang saudara bagi kaum Bolshevik. Kedudukan yang mendua kaum tani dalam pemikiran kaum komunis Rusia ini, yaitu sebagai sekutu yang vital dan pada waktu yang bersamaan sekaligus sebagai sasaran perjuangan yang diarahkan untuk menghantamnya, merupakan benih banyak persoalan di masa-masa mendatang.

Tahun-tahun setelah meninggalnya Lenin pada awal 1924 ditandai oleh

perebutan kekuasaan di antara pengganti-pengganti Lenin yang pada akhirnya akan menentukan nasib NEP. Tetapi satu dasar pembangunan sosialisme yang telah diletakkan sejak pecahnya Revolusi Bolshevik dan diperkuat selama Komunisme Perang serta dipertahankan di bawah NEP akan merupakan landasan bagi langkah-langkah Stalin yang muncul sebagai pemenang dalam perebutan kekuasaan. Kendati komprominya dengan kapitalisme dalam kehidupan ekonomi dan pluralisme dalam bidang sosial dan kebudayaan, NEP tetap merupakan diktator satu partai, yaitu Partai Bolshevik, yang kemudian berubah namanya menjadi Partai Komunis Uni Soviet, dengan sentralisasi yang diperketat.

### "REVOLUSI DARI ATAS" DAN STALINISME

Perebutan kekuasaan yang akhirnya terkristalir menjadi pertentangan antara Stalin dan Trotskii berkisar terutama pada masalah teori, strategi dan ideologi. Sulit dikatakan dengan pasti apakah pertentangan antara keduanya disebabkan oleh perbedaan pandangan antara keduanya, ataukah perbedaan pandangan itu berfungsi sebagai dalih perebutan kekuasaan atau sekurangnya beserta isu-isu lainnya memperkuat pertentangan antara keduanya dalam memperebutkan kekuasaan sebagai pewaris Lenin.

Pertentangan pendapat itu menyangkut masa depan pembangunan sosialisme di Uni Soviet. Dengan keberhasilan NEP, sebenarnya keselamatan (*survival*) Uni Soviet sendiri tidak menjadi isu. Tampaknya lebih sesuai dengan teori Marxis maupun pandangan Lenin, Trotskii bertahan pada pendapatnya bahwa pembangunan sosialisme di Uni Soviet akan memerlukan bantuan revolusi sosialis dunia. Ini merupakan inti dari teorinya tentang "revolusi yang permanen." Sebaliknya, mungkin didorong oleh keberhasilan Revolusi Bolshevik, Komunisme Perang dan NEP di satu pihak, dan di lain pihak kekecewaan dengan gagalnya kaum proletar di Eropa Barat untuk melaksanakan revolusi sosialis dalam membantu revolusi dan pembangunan sosialisme Rusia, Stalin berpendirian bahwa sosialisme dapat dibangun di Uni Soviet secara sendirian tanpa bantuan revolusi sosialis dunia. Pengalaman Uni Soviet hingga saat itu telah menunjukkan kemungkinan itu.

Lebih dari itu, Stalin berpendapat bahwa justru Uni Soviet dapat menjadi benteng atau kubu sosialisme yang akan mendorong, mempelopori, dan memimpin revolusi sosialis dunia. Sebelumnya Komintern dibentuk oleh Lenin untuk mengkoordinir partai-partai komunis di luar Rusia dalam mempersiapkan revolusi sosialis di negara mereka masing-masing. Dalam praktek hal itu berarti melayani kepentingan politik luar negeri Soviet. Dengan teori Stalin yang baru ini, yang kemudian dikenal dengan sebutan "Sosialisme di Satu Negara," dasar perjuangan kaum komunis di luar Uni Soviet sebenarnya lebih diperkuat dan dipertegas lagi, yaitu ikut memper-

kokoh Uni Soviet sebagai kubu dan pusat revolusi sosialis dunia. Dengan melayani kepentingan Soviet, partai-partai komunis sedunia juga melayani kepentingan revolusi dunia. Pemikiran ini mempunyai implikasi penting bagi bagian-bagian dunia yang pada waktu itu belum memperoleh kemerdekaannya. Di wilayah-wilayah ini kaum komunis juga harus tunduk kepada Moskwa dan memperjuangkan kepentingan Soviet. Dengan begitu mereka memperjuangkan terselenggaranya revolusi sosialis dunia, yang pada gilirannya akan memungkinkan wilayah-wilayah (tanah-tanah jajahan) mereka memperoleh kemerdekaan.

Implikasi yang paling penting dari teori sosialisme di satu negara bagi perkembangan di dalam negeri Soviet adalah diakhirinya NEP. Sebagai gantinya pada tahun 1928 ditetapkan suatu Rencana Lima Tahun pembangunan ekonomi dengan titik berat pada pembangunan industri berat untuk menjamin kekuatan militer Soviet, dan kolektivisasi pertanian untuk mendukungnya. Pembangunan industri berat itulah yang akan mendukung pembangunan di sektor-sektor ekonomi yang lain seperti industri kecil, produksi barang-barang konsumen dan perdagangan.

Dasar pertimbangan rencana pembangunan yang pertama ini adalah bahwa sebagai negara sosialis yang pertama dan kubu revolusi sosialis sedunia Uni Soviet menghadapi "pengepungan kapitalis," yaitu negara-negara kapitalis maju yang hendak menghancurkan Uni Soviet. Dan munculnya Hitler dan Nazisme di Jerman, yang dianggap sebagai puncak kemajuan kapitalisme, dipakai sebagai dalih perlunya kesiapsiagaan dan pembangunan kekuatan militer Soviet untuk menghadapi bahaya itu. Di depan sidang Komite Sentral PKUS dalam bulan November 1928 untuk membahas rencana lima tahun itu Stalin antara lain mengatakan bahwa Uni Soviet telah mengejar dan membongkar negara-negara kapitalis dalam bentuk-bentuk politiknya. Tetapi itu tidak cukup. Untuk mencapai kemenangan akhir bagi sosialisme, Uni Soviet juga perlu mengejar dan membongkar negara-negara kapitalis itu dalam pengertian teknik dan ekonomi. Jika tidak, Uni Soviet akan hancur.

Beberapa tahun kemudian dalam suatu pidato Stalin juga mengatakan bahwa "Satu sifat sejarah Rusia Kuno adalah penghajaran terus-menerus yang dideritanya oleh karena keterbelakangannya ... Kita lima puluh atau seratus tahun ketinggalan oleh negara-negara maju. Kita harus mengejar jarak ini dalam waktu sepuluh tahun. Kita lakukan itu atau kita tenggelam." Dinyatakannya bahwa industri berat harus menjadi pusat usaha modernisasi, sebab hanya industri berat dapat menjamin keperluan-keperluan pertahanan militer, dan karena dari industri berat pada waktunya akan diperoleh keuntungan-keuntungan bagi seluruh ekonomi.

Sementara itu beberapa kelembagaan sentralisasi telah diciptakan sebelumnya setelah pecahnya Revolusi Bolshevik dan Komunisme Perang untuk

maksud perencanaan dan pengarahannya secara keseluruhan. Di antaranya adalah *Vesenkha*, yaitu Dewan Tertinggi Ekonomi Nasional yang telah disebut di muka, dan *Gosplan*, yaitu badan perencanaan negara yang didirikan pada tahun 1921. Mungkin berdasarkan teori Marx kelihatannya telah menjadi asumsi kaum komunis bahwa suatu masyarakat "sosialis" berarti masyarakat industri maju, di mana alat-alat produksi dinasionalisir dan terencana.

Memang, selama periode Rencana Lima Tahun pertama pertumbuhan yang cepat tercapai dalam sektor-sektor kunci industri berat terutama dalam produksi alat-alat mesin dan landasan bagi pembangunan daerah-daerah industri baru diletakkan. Tetapi rencana itu juga menimbulkan ketidakseimbangan yang sebagian hingga kini menjadi ciri-ciri ekonomi Soviet yang lebih kurang permanen. Bahkan dalam industri berat beberapa sektor diabaikan seperti misalnya industri kimia yang selalu menimbulkan masalah bagi sektor-sektor lain sejak itu. Industri tekstil malah menurun selama Rencana Lima Tahun pertama, yang berarti bahwa penyediaan bahan pakaian tidak mencukupi dan kualitasnya rendah. Pengangkutan kereta api agak terabaikan sehingga barang-barang produksi tidak selalu dapat dikirimkan ke tempat tujuannya sebelum mengalami kerusakan. Perumahan, industri barang-barang konsumen dan jasa-jasa hampir samasekali tidak diperhatikan, dan penyediaan bahan makanan berantakan karena kolektivisasi. Kaum pekerja yang sangat dibutuhkan di tempat kerjanya harus menghabiskan waktunya antri untuk mendapatkan barang-barang kebutuhannya.

Warisan lain dari Rencana Lima Tahun pertama adalah gaya manajemen industri. Sejumlah kementerian pusat atau Komisariat Rakyat didirikan untuk mengambil-alih dari *Vesenkha* tugas menangani cabang-cabang industri. Pada tahun 1932 jumlah komisariat seperti ini tiga, tahun 1939 menjadi dua puluh, dan tahun 1948 tiga puluh dua, dengan segala macam konsekuensinya seperti meluasnya sistem *patronage*. Keberhasilan tidak hanya diukur dengan pemenuhan angka-angka dalam rencana, tetapi *overfulfilment* yang dianjurkan apa pun harga dan risikonya. Para sekretaris partai menghabiskan banyak waktu untuk mempergunakan pengaruh mereka membantu para manajer industri mendapatkan suplai yang langka dalam persaingan dengan pabrik-pabrik dari daerah-daerah lain, karena prestasi mereka dinilai atas dasar indikator-indikator produksi perusahaan-perusahaan di wilayah mereka masing-masing. Karena *overfulfilment* diberi prioritas pertama, hal-hal lain dikorbankan seperti kesehatan dan keselamatan serta kepentingan sektor-sektor ekonomi yang lain. Dan persaingan yang seru menyebabkan terjadinya berbagai bentuk kecurangan dan pembegalan antara para manajer industri.

Kehidupan kelas pekerja mengalami transformasi secara drastis. Jumlah mereka menjadi dua kali lipat selama Rencana Lima Tahun pertama itu, yang kelihatan seperti suatu kebalikan yang ironis dari proses berkembangnya

sosialisme sebagaimana diramalkan oleh Marx. Pengangguran lenyap dan bantuan pengangguran dihentikan. Tetapi sebagian besar pendatang baru berasal dari daerah pedesaan tanpa pendidikan dan pengalaman dalam hal proses dan disiplin industri. Hal ini, ditambah dengan desakan untuk melampaui target dan langkanya peralatan menimbulkan kondisi dan praktek-praktek kerja yang menyedihkan yang sering memakan korban di antara para pekerja di samping kualitas hasil kerja yang sangat rendah. Dan membanjirnya pekerja dalam jumlah yang besar dari daerah pertanian tanpa penyediaan perumahan yang memadai menimbulkan kondisi hidup yang sukar dibayangkan.

Tumbuhnya kota-kota karena membanjirnya kaum pekerja baru memerlukan peningkatan hasil dan pemasaran pertanian. Tetapi pengumpulan bahan makanan oleh negara justru menurun karena harga yang ditawarkan pemerintah jauh lebih rendah daripada harga pasaran bebas, sementara penyediaan barang-barang jadi kurang untuk daerah pedesaan. Di samping itu para petani enggan memproduksi tinggi karena takut dicap sebagai *kulak* atau petani kaya. Tetapi sejak tahun 1923 pemerintah mengambil jalan kekerasan untuk menghadapi apa yang dikenal dengan "krisis gunting" (*scissors crisis*) ini. Pasar-pasar petani ditutup dan perdagangan bahan makanan swasta dilarang. Rumah-rumah tangga yang lebih berada dipaksa menyerahkan hasil bahan makanan dengan ancaman pengadilan di bawah artikel undang-undang kriminal tentang "spekulasi." Kalaupun pada mulanya langkah ini menghasilkan lebih banyak bahan makanan, akibat jangka panjang adalah mendorong petani untuk tidak menanam lebih dari yang dibutuhkan untuk hidupnya sendiri.

Menghadapi keadaan ini pemerintah mendirikan lagi Komite Petani Miskin seperti tahun 1918 untuk melancarkan "perang kelas." Dewan-dewan desa diperintahkan mengadakan rapat-rapat untuk membedakan antara petani miskin, menengah dan "kulak." Yang terakhir ini dipaksa menyerahkan kuota yang berat. Kadang-kadang seluruh desa dihukum karena kegagalan memenuhi target. Tetapi seperti sebelumnya, juga dalam hal ini hasil pada permulaan yang positif diikuti oleh menurunnya penyerahan bahan makanan sehingga sistem ransum diberlakukan kembali tahun 1929.

Lebih dari itu, kolektivisasi pertanian yang telah ditentukan tahun 1927 atas dasar sukarela kini digalakkan dengan ancaman bahwa mereka yang tidak mau bergabung dalam *kolkhoz* (pertanian kolektif) dicap sebagai "musuh-musuh kekuasaan Soviet." Tahap pertama kampanye itu secara terbuka dinamakan "dekulakisasi," dengan tujuan mengeliminir kulak-kulak sebagai suatu kelas. Dalam praktek julukan ini dikenakan pada siapa pun yang dicurigai menentang penyerahan bahan makanan. Untuk menghindari penggeledahan dan penyitaan, banyak rumah tangga petani yang membakar dan menghancurkan segala harta miliknya dan menyembelih ternaknya.

Tahap berikutnya adalah mengumpulkan apa yang dicap sebagai keluarga kulak untuk deportasi ke tempat-tempat pembuangan seperti Siberia dengan cara dan dalam keadaan yang menyebabkan kesengsaraan.

Tindakan kolektivisasi dalam pelaksanaan juga meliputi tidak hanya tanah tetapi apa saja yang menjadi milik petani untuk dijadikan milik kolektif. Tetapi daripada menyerahkannya pada kolkhoz, banyak petani memilih juga menyembelih ternaknya. Terjadi pula permusuhan antara mereka yang mau dan yang menolak bergabung dengan kolkhoz.

Memang, untuk menghadapi kekacauan yang timbul, Stalin pada tahun 1930 mengendorkan kampanye kolektivisasi dengan menyalahkan pejabat-pejabat lokal tidak melaksanakan prinsip sukarela dan menuduh mereka "pusing dengan keberhasilan," ungkapan yang menjadi judul karya tulisnya dalam *Pravda* tanggal 2 Maret 1930. Petani-petani yang enggan bergabung dengan kolkhoz diijinkan kembali, sehingga hingga pertengahan tahun itu jumlah keluarga tani yang dikolektifkan turun dari lebih dari separuh menjadi kurang dari seperempatnya. Tetapi setelah panen datang, kampanye segera dimulai lagi. Paksaan tetap dipergunakan, meskipun kini sistem *artel*, yang mengijinkan setiap keluarga memiliki sebidang tanah kecil, seekor lembu dan beberapa ekor ayam, menjadi model dasar. Pada tahun 1931 lebih dari separuh jumlah keluarga kembali dalam kolkhoz, dan dalam tahun 1939 jumlah itu menjadi 90%.

Kolektivisasi memang hanya menyebabkan menurunnya hasil panen sedikit, tetapi harapan sebelumnya adalah meningkatkan dua kali lipat. Yang meningkat adalah pengumpulan oleh negara, yaitu antara tahun 1928 dan 1935 hampir tiga kali lipat. Ini berarti bahwa negara mengumpulkan hasil panen dengan porsi yang lebih besar dari sebelumnya, dan penduduk kota serta tentara terus mendapatkan bahan makanan, meskipun tidak berlebihan, sebab ekspor gandum berlangsung terus dalam jumlah yang besar hingga tahun 1931 untuk memperoleh devisa dan tidak samasekali dihentikan bahkan sesudah itu.

Tetapi akibat kolektivisasi bagi pedesaan adalah malapetaka. Kekurangan makan lebih buruk dari tahun-tahun permulaan NEP. Jumlah ternak merosot hampir separuhnya; babi lebih dari separuh; kambing tinggal lebih sedikit dari sepertiganya. Uni Soviet sebenarnya belum pulih dari keadaan ini hingga pertengahan tahun 1950-an, sehingga untuk dua puluh dua tahun berikutnya tetap mengalami kekurangan daging dan susu.

Rencana pembangunan Stalin dapat dikatakan berhasil dalam arti meletakkan dasar-dasar pembangunan industri berat sehingga kini Uni Soviet dapat menandingi Barat dalam hal kekuatan militer dalam jangka waktu yang relatif singkat. Tetapi yang biasanya dilupakan oleh mereka yang ingin menerapkan "model Stalinist" ini dengan titik berat pada pembangunan in-

dustri berat yang didukung oleh kolektivisasi pertanian adalah bahwa harga yang harus dibayar untuk model pembangunan semacam itu, terutama dalam hal korban hidup manusia dan kehidupan masyarakat dalam jangka panjang, begitu tinggi dan mustahil dihitung dengan nilai uang. Ini menggambarkan betapa nilai hidup manusia dalam sistem semacam itu. Korban manusia sebagai akibat "dekulakisasi," misalnya, sekitar satu juta keluarga atau 5 juta orang, suatu jumlah yang kurang lebih diakui oleh sumber-sumber Soviet. Mungkin jumlah sebenarnya sekurang-kurangnya mendekati dua kali lipat jumlah itu.

Itulah apa yang sering dijuluki sebagai "revolusi dari atas" ala Stalin. Situasi itu baru menyangkut rencana pembangunan dalam bidang ekonomi. Keadaan dalam bidang sosial-politik tidak kurang menegakkan bulu roma, terutama dengan langkah-langkah pembersihan yang dilancarkan oleh Stalin sejak itu hingga menjelang pecahnya Perang Dunia II yang juga memakan korban ratusan ribu orang. Penggunaan teror, kekerasan, likuidasi, deportasi, kamp konsentrasi, kekuasaan polisi rahasia, kultus individu, dan sistem totaliter dalam bidang-bidang ideologi, politik dan sosial budaya melengkapi pembangunan model Stalinist untuk membentuk phenomen Stalinisme. Dan proses de-Stalinisasi yang dilancarkan oleh Khrushchev tahun 1956 memang mengikis segi-segi tertentu dari Stalinisme, terutama kultus individu, teror dan likuidasi. Tetapi di samping aspek-aspek itu tidak seluruhnya telah lenyap, dapat dipersoalkan apakah de-Stalinisasi juga menghilangkan lembaga-lembaga Stalinist lainnya, dan apakah Stalinisme pada dasarnya bukannya masih berlangsung hingga kini, walaupun dengan gaya dan wajah yang kelihatannya lebih manusiawi?

## PEMBARUAN PASCA-STALIN

Barulah setelah meninggalnya Stalin usaha-usaha dilakukan untuk memperbaiki kehidupan petani. Harga pemerintah untuk hasil-hasil pertanian dinaikkan pada tahun 1953, 1956 dan 1958 oleh Khrushchev, sedang pajak penjualan dikurangi. Ia juga mulai program investasi besar-besaran untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan produksi umumnya.

Iklim yang baru yang telah diciptakan oleh proses de-Stalinisasi yang dilancarkan oleh Khrushchev pada Kongres ke-20 PKUS dicerminkan dalam Program Partai yang dikemukakannya di depan Kongres ke-22 yang landasannya disebutnya sebagai "kembali ke norma-norma Lenin." Program Partai yang baru itu bertolak dari pandangan bahwa Uni Soviet telah membangun "sosialisme" dan kini dalam perjalanan untuk menciptakan "persyaratan-persyaratan material komunisme" yang memungkinkan setiap orang, betapapun jumlah kerjanya, mendapatkan dari masyarakat menurut kebutuhannya. Bahkan secara nekad Khrushchev meramalkan bahwa tahap ini akan dicapai

pada tahun 1980. Dan dengan dicapainya "sosialisme" maka "diktator proletariat" telah selesai. Semua hubungan kelas yang antagonistik telah berakhir dan oleh sebab itu negara tidak lagi mewakili sesuatu kelas sosial dan menjadi "negara seluruh rakyat" seperti telah disinggung di muka, suatu organ untuk menyatakan kepentingan dan kemauan rakyat keseluruhannya. Oleh sebab itu program yang baru menghendaki "partisipasi aktif semua warga negara dalam pengurusan negara, pengelolaan pembangunan ekonomi dan kebudayaan, perbaikan aparat pemerintahan dan pengawasan atas kegiatannya oleh rakyat."

Selanjutnya, dengan kemajuan komunisme, "alat-alat kekuasaan negara lambat laun akan diubah menjadi alat-alat pemerintahan rakyat sendiri." Yang dimaksudkan adalah bahwa Partai akan menjadi wahana bagi perkembangan itu, oleh karena program itu menganjurkan "peningkatan lebih lanjut peranan dan pentingnya Partai Komunis sebagai kekuatan yang memimpin dan membimbing masyarakat Soviet." Dengan argumen ini sebenarnya Khrushchev tidak melakukan perubahan apa pun atas pemikiran Lenin atau Stalin sejak Revolusi Bolshevik. Melenyapnya negara kelihatan akan berarti bahwa partai akan menggantikan negara. Meskipun demikian Khrushchev memang berusaha membuat partai lebih peka pada pendapat-pendapat sekurang-kurangnya dari para anggotanya. Dia juga mengadakan pembaruan dalam struktur partai dengan mengadakan rotasi jabatan yang dibatasi pada jangka waktu tertentu menurut tingkatan dalam hirarki partai.

Khrushchev juga melakukan langkah-langkah pembaruan dalam pendidikan, hukum, dan peradilan. Tetapi suatu program yang sangat terkait dengan namanya adalah pembaruan dalam bidang pertanian untuk mengembangkan apa yang disebut "tanah-tanah baru" (*virgin lands*) menjadi wilayah produsen roti yang besar sementara menjadikan Ukraina, yang secara tradisi telah memainkan peranan ini, sebagai daerah yang menyediakan jagung untuk makanan ternak. Ini akan mendorong sektor produksi daging dan susu yang selalu kekurangan.

Tetapi tanah-tanah yang dipilihnya memang mempunyai kelemahan-kelemahan serius seperti kurangnya turun hujan dan selama beberapa tahun mengalami kekeringan. Tanpa sistem irigasi yang luas, hal itu berarti bahwa hasilnya akan tidak menentu tanahnya mungkin mengalami erosi. Meskipun demikian pada awalnya program itu berhasil. Selama tiga tahun, yaitu hingga tahun 1956, tanah-tanah baru itu menghasilkan gandum tiga kali lipat dari tahun 1953. Tetapi tahun 1956 ternyata merupakan puncaknya. Sejak itu kesuburan tanahnya mulai merosot, dan akibat tergesa-gesanya program itu mulai terasa. Untuk memperoleh hasil dengan cepat Khrushchev telah melarang pergantian tanaman atau pengosongan tanah dan tidak menyediakan pupuk meskipun dia telah diperingatkan sebelumnya oleh para ilmuwan. Dan akhirnya memang terjadi erosi. Serangkaian angin ribut telah menghancurkan

curkan berjuta-juta hektar tanah antara 1960 dan 1965 dan lebih dari 12 juta hektar rusak. Semuanya ini hampir separuh dari tanah-tanah baru. Di samping itu penggunaan pekerja-pekerja muda tanpa perlengkapan dan perbekalan yang memadai merupakan penyebab lain kegagalan program itu.

Kegagalan lain dari program Khrushchev menyangkut penanaman jagung. Terkesan oleh perkebunan jagung di Iowa selama kunjungannya ke AS, Khrushchev melancarkan kampanye penanaman jagung. Jagung yang tumbuh tidak matang akan diambil untuk makanan ternak. Pada tahun 1962 tidak kurang dari 37 juta hektar tanah ditanami jagung. Tetapi karena udara dingin dan basah selama musim panas, hanya hasil dari 7 juta hektar dapat diperoleh, sedang selebihnya tidak dapat diambil dalam bentuk apa pun.

Pada tahun 1963, sebagai akibat musim panas yang kering dan menurunnya hasil panen jagung, produksi biji-bijian hanya sebesar 107 juta ton. Untuk tahun 1953 angka itu merupakan kemenangan. Tetapi janji Khrushchev dan sasaran rencananya adalah 170-180 juta ton. Dalam tahun itu juga terjadilah antri untuk membeli roti di Ukraina, gudang gandum tradisional. Timbullah pasar gelap di Moskwa dan Leningrad dengan datangnya pedagang-pedagang gelap dari kota-kota lain yang kekurangan roti. Mengingat kerusakan-kerusakan yang terjadi setahun sebelumnya ketika harga bahan makanan dinaikkan, Khrushchev mengambil keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya yaitu menggunakan cadangan emas dan devisa untuk mengimpor gandum. Kegagalan-kegagalan Khrushchev di bidang pertanian, langkah-langkah pembaruan dalam bidang administrasi dan struktur partai yang menimbulkan keresahan di antara fungsionalis partai, kekecewaan kalangan militer karena pengurangan anggaran militer dan pemecatan perwira-perwira, serta beberapa langkah dalam politik luar negerinya seperti dalam kejadian krisis Kuba, tingkah-lakunya di PBB, dan bantuannya kepada negara-negara Dunia Ketiga, adalah di antara faktor-faktor yang menyebabkan tersingkirkannya dari kekuasaan di Kremlin pada tahun 1964.

Satu masalah besar yang dihadapi oleh para pengganti Khrushchev adalah perencanaan ekonomi yang terarahkan sebagai warisan dari zaman Stalin. Perencanaan tidak lagi merupakan perkiraan, melainkan perintah. Suatu laporan rahasia yang disampaikan dalam bulan Juni 1965 oleh Abel Aganbegyan, Direktur Lembaga Ekonomi Novosibirsk, menyoroti kesulitan-kesulitan yang ada. Laporan itu mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Soviet mulai menurun justru pada saat ekonomi AS kelihatan cerah. Beberapa sektor ekonomi Soviet seperti perumahan, pertanian, jasa-jasa, perdagangan eceran, tetap terbelakang dan tidak berhasil mencapai pertumbuhan yang memadai. Sebab-sebab pokok dari keadaan buruk itu adalah pengerahan sumber-sumber secara besar-besaran untuk pertahanan, antara lain dalam bentuk pemakaian sumber manusia, yaitu 30-40 juta dari 100 juta tenaga kerja; sentralisme yang ekstrem dan kurangnya demokrasi dalam masalah-

masalah ekonomi. Dikemukakannya bahwa dalam masyarakat modern yang kompleks tidak segala hal dapat direncanakan, oleh karena tidak mungkin meramalkan segala macam situasi dan kemungkinan efeknya. Rencana menjadi perintah. Tetapi ini pun tidak dapat dilaksanakan semestinya karena kurangnya informasi dan alat pengolah data yang modern. Pusat Administrasi Statistik tidak memiliki satu komputer pun dan tidak merencanakan untuk memilikinya.

Pengelolaan ekonomi juga menghadapi hambatan karena kerahasiaan yang berlebihan. Banyak angka yang diperoleh lebih cepat dari jurnal-jurnal Amerika daripada Pusat Administrasi Statistik. Oleh sebab itu ekonomi Soviet menderita dari distorsi yang terdapat dalam dirinya sendiri: penumpukan barang-barang dan tenaga buruh untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan situasi yang tidak diperkirakan sebelumnya, produksi barang-barang yang tidak berkualitas untuk memenuhi target-target yang dinyatakan secara kasar dalam bahasa yang kuantitatif, akumulasi yang tidak digunakan oleh masyarakat yang enggan membeli barang-barang di bawah standar yang berakibat inflasi dan berkembangnya pasar gelap.

Sebenarnya pada tahun 1953 Malenkov telah mengusulkan untuk membalikkan urutan prioritas yang tradisional dengan investasi lebih besar ke dalam industri konsumen (disebut sektor B) daripada ke dalam industri kapital (sektor A). Tetapi gagasan ini tidak berkembang lagi sebagian karena industri konsumen mempunyai status yang lebih rendah dalam hirarki *nomenklatura*, sebagian lagi karena pembeli barang-barang produksinya lebih banyak, tersebar, dan beraneka-ragam sehingga persyaratannya tidak mudah dinyatakan dalam rencana-rencana produksi secara umum. Desentralisasi administrasi ekonomi yang diusahakan Khrushchev sebenarnya dimaksudkan untuk membuat sistem lebih tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhan pembeli. Tetapi dalam praktek hal itu hanya membuat sistemnya lebih rumit.

Dalam tahun 1965 juga Kosygin mencoba suatu pendekatan lain dengan menggunakan beberapa pelajaran dari ahli-ahli ekonomi seperti Aganbegyan. Ia membentuk kembali kementerian-kementerian industri pusat yang telah dibubarkan oleh Khrushchev, tetapi mencoba mekanisme perencanaannya lebih tanggap dengan mengungkapkan target-target dalam bentuk "hasil kasar yang direalisasi" yaitu barang-barang yang tidak hanya diproduksi tetapi memang terjual. Kemudian bunga kecil dikenakan pada alat-alat produksi untuk mendorong agar perusahaan-perusahaan tidak menumpuk sumber-sumber yang tidak diperlukan, dan manajer-manajer dapat lebih bebas menentukan bagaimana mempergunakan keuntungan mereka seperti sebagai insentif bagi pekerja-pekerja, reinvestasi, dan sebagainya.

Tetapi pembaruan Kosygin ini juga gagal. Pertama, untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang disediakan, perusahaan-perusahaan memerlukan hak untuk menetapkan harga barang-barang produksinya, tetapi ini tidak

pernah diberikan. Mereka juga memerlukan kebebasan lebih besar untuk menentukan tingkat pemakaian tenaga kerja, khususnya untuk memberhentikan kelebihan tenaga kerja yang tidak diperlukan atau yang pekerjaannya tidak memuaskan. Sampai tingkat tertentu kebebasan ini diberikan, sekurangnya dalam teori, tetapi perlawanan terhadap pemberhentian melalui serikat kerja dan aparat partai sukar diatasi, dan para pemimpinnya begitu peka terhadap ketidakpuasan kelas buruh sehingga mereka tidak cenderung mendukung manajer yang memberhentikan pekerja.

Di samping itu, keberhasilan pelaksanaan pembaruan Kosygin berarti inovasi dan penggunaan teknologi dalam industri. Tetapi ini sulit dalam sistem ekonomi yang mengukur keberhasilan dari segi pemenuhan rencana tahunan. Peralatan dan cara-cara kerja baru selalu memakan waktu untuk penyesuaian yang mungkin akan menyebabkan menurunnya hasil produksi untuk sementara waktu. Jika pada akhir tahun savings yang terjadi dalam proses itu tidak seimbang dengan kerugiannya, manajer tidak akan mengambil risiko untuk inovasi.

Terdapat kemungkinan juga bahwa pelaksanaan yang serius pembaruan Kosygin akan mengancam prioritas pada produksi militer. Dan akhirnya yang menggagalkan rencana Kosygin adalah perlawanan sekretaris-sekretaris partai dan pejabat-pejabat kementerian terhadap praktek-praktek baru yang akan mengurangi kekuasaan mereka untuk mengawasi proses ekonomi.

Dalam paruh kedua 1960-an dan 1970-an para pemimpin Moskwa memilih alternatif untuk menghidupkan kembali ekonominya. Di satu pihak mereka mengetatkan sistem perencanaan dan membuatnya lebih tanggap terhadap keadaan-keadaan tak terduga dengan komputerisasi; di lain pihak mereka mengutuk kekurangan inovasi dengan membeli teknologi dari Barat. Di antaranya ini dilakukan melalui proyek-proyek pembangunan patungan dengan perusahaan-perusahaan Barat. Uni Soviet dapat menyediakan pasaran yang luas dan tenaga kerja murah. Bentuk yang terbesar dalam hal ini pada tahun 1966 adalah kontrak dengan Fiat dari Italia untuk mendirikan pabrik besar di Stavropol, kini dinamai Togliatti untuk menghormati pemimpin komunis Italia itu. Ini memperluas apa yang telah dimulai sejak pertengahan 1950-an, yaitu terbukanya Uni Soviet pada pertukaran internasional, tidak hanya dalam bidang teknologi tetapi juga ilmu pengetahuan, kebudayaan dan turisme.

Meskipun demikian dasawarsa 1970-an menunjukkan bahwa sistem ekonomi yang pernah mengalami laju pertumbuhan yang tinggi kini tidak menghasilkan pertumbuhan demikian bahkan dalam industri berat. Laju pertumbuhan 5-6% setahun dalam dasawarsa 1950-an dan 1960-an telah menurun hingga 3,7% dalam 1971-1975 dan 2,17% 1976-1980. Mengingat kecenderungan setiap orang dalam sistem Soviet untuk melaporkan yang baik-baik

saja karena vested interests mungkin malah terjadi penurunan lebih besar lagi. Bagaimanapun persepsi penduduk Soviet umumnya menjelang akhir dekade 1970-an keadaan ekonomi menjadi semakin sulit dan kelangkaan barang-barang semakin memburuk.

Kelemahan-kelemahan ekonomi berencana secara terpusat adalah sedemikian sehingga telah berkembang apa yang dinamai "ekonomi kedua" untuk memenuhi kebutuhan penduduk akan barang-barang konsumsi, pengangkutan, perbaikan-perbaikan, dan jasa-jasa lainnya. Dalam bidang pertanian "ekonomi kedua" memang dilegalisir dalam bentuk tanah milik pribadi dan pasar kolkhoz. Tetapi dalam sektor-sektor lainnya "ekonomi kedua" dilarang. Orang-orang yang giat dalam hal ini secara gelap mempergunakan alat-alat dan barang-barang lain milik negara yang dalam laporannya mungkin dikatakan hilang atau rusak dalam pengangkutan, dan sebagainya. Mungkin juga pemakaian barang-barang seperti itu justru dilindungi oleh pejabat-pejabat atas dasar kepentingan bersama. Inilah salah satu bentuk korupsi dan sistem koneksi yang merajalela di Uni Soviet hingga kini, sehingga melalui sistem "ekonomi kedua" ini praktis apa pun dapat diperoleh, asal dengan harga yang lebih tinggi, suatu phenomen yang sebenarnya banyak terjadi di negara-negara lain juga pada tingkatan yang berbeda. Pihak penguasa pada dasarnya tentu saja tidak menghendaki ini, karena ia merupakan ancaman terhadap monopoli ekonomi mereka. Tetapi mereka mempunyai alasan juga untuk tidak terlalu represif terhadap "ekonomi tidak resmi," karena bagaimanapun cara itu mengurangi kekakuan sistem ekonomi dan membantu keseluruhan ekonomi berfungsi. Dengan berkuasanya Yuri Andropov menggantikan Brezhnev dalam tahun 1982 pemberantasan "ekonomi kedua" ditingkatkan. Tetapi Andropov tidak berkuasa cukup lama untuk melenyapkannya samasekali.

Bagi pekerja pabrik, sistem perencanaan pusat umumnya berarti hidup dengan pendapatan kecil tetapi aman dan cukup santai. Sukar bagi pimpinan pabrik untuk memecat pekerja karena malas, tidak mampu, banyak absen atau banyak mabuk. Sekurang-kurangnya dalam hal ini serikat kerja telah terbukti mampu membela kepentingan anggotanya. Sejak mobilisasi pekerja secara paksa dihapuskan tahun 1956 paksaan telah diganti dengan semacam perjanjian tidak tertulis. Sebagai imbalan bagi upah rendah dan de facto larangan mogok, para pekerja dibiarkan bekerja dengan standar disiplin yang rendah. Kecuali untuk pelanggaran-pelanggaran yang menyolok, umumnya diterima bahwa mereka sering datang terlambat, memperpanjang waktu istirahat, pergi berbelanja selama jam kerja bahkan kadang-kadang bermalas-malas karena malamnya mungkin melakukan kerja sambilan. Tetapi menjelang akhir bulan, terutama akhir tahun, mereka diharapkan bekerja keras dengan wajib lembur untuk memenuhi target yang direncanakan. Begitu ini dipenuhi, suasana kerja yang rutin kembali lagi. Sebuah lelucon menggambarkan-

kan keadaan ini sebagai berikut: Seorang instruktur politik bertanya kepada seorang pekerja, "Apakah landasan sistem ekonomi Soviet?" Jawabnya: "Anda pura-pura membayar kami, dan kami pura-pura bekerja." Itulah di antara persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Mikhail Gorbachev dalam usahanya untuk melakukan pembaruan yang dicanangkannya.

## PEMBARUAN GORBACHEV: DILEMA YANG DIHADAPI

Pembicaraan tentang rencana pembaruan di Uni Soviet di bawah pimpinan Gorbachev dapat memberikan kesan bahwa Uni Soviet tengah mengalami suatu krisis. Ini tentu saja tergantung pada apa yang dimaksudkan sebagai krisis. Bahkan beberapa pengamat menganggap bahwa krisis yang dialami oleh Uni Soviet itu bersifat sistemik, artinya inheren pada sistem itu sendiri. Implikasinya ialah bahwa tidak akan terjadi perbaikan yang berarti dan langgeng tanpa melakukan perubahan fundamental atas sistem itu sendiri. Pihak Soviet ataupun negara-negara komunis lainnya cenderung berpendirian bahwa negara-negara sosialis masih berada pada transisi menuju masyarakat komunis. Oleh sebab itu pembaruan justru perlu dilakukan terus-menerus untuk mempercepat proses menuju komunisme, seperti telah disinggung dalam Pendahuluan.

Berdasarkan uraian di atas kelihatan bahwa memang ekonomi Soviet sejak permulaan selalu mengalami kesulitan kendati kemajuan-kemajuan yang menakjubkan dalam beberapa hal. Kelihatan pula bahwa masalah-masalah yang dihadapi itu memang bersifat sistemik dalam arti berkaitan erat dengan sistem Soviet itu sendiri. Tetapi apakah hal itu berarti bahwa kesulitan-kesulitan yang dihadapi itu merupakan bagian dari suatu krisis, kiranya tidak perlu kita persoalkan di sini. Dan apakah masalah-masalah itu takkan terpecahkan apalagi secara langsung, sehingga tidak akan timbul lagi secara serius tanpa mengutik-utik sistem itu sendiri, itulah kiranya semacam dilema yang kini dihadapi oleh Gorbachev maupun pemimpin-Soviet sebelumnya. Telah disinggung di muka bahwa hingga kini tidak kelihatan tanda-tanda, sekurangnya secara terbuka dalam pernyataan-pernyataan para pemimpin Soviet bahwa pembaruan itu akan dilakukan dengan menempuh cara-cara yang bertentangan dengan asas sistem yang dianutnya. Sebaliknya seperti telah dikemukakan juga usaha-usaha pembaruan itu tidak hanya akan dilakukan dalam kerangka sistem sosialis, tetapi juga justru untuk memperkuat sistem itu sendiri. Oleh karena itu meskipun Gorbachev hampir selalu menyinggung masalah pembaruan dalam setiap pidatonya dan menegaskan bahwa pembaruan yang dikehendaknya dan yang disebutnya juga sebagai "transformasi" bersifat "mendalam" dan "fundamental," kata-kata itu hendaknya disadari batas-batas pengertiannya.

Sepintas lalu sebenarnya situasi ekonomi Soviet tidak kelihatan buruk, apalagi mengalami krisis. Uni Soviet telah menjadi ekonomi no. 2 di dunia, dan sesudah Perang Dunia II telah mengalami pertumbuhan lebih cepat dari AS. Hasil industrinya tumbuh lebih dari dua kali lipat dari AS; hasil pertanian 80% lebih cepat; dan produktivitas industrinya, yang tumbuh dengan 30% laju pertumbuhan AS pada tahun 1950, kini hampir 60% dari laju itu. Laju pertumbuhan ekonomi Soviet tidak hanya lebih tinggi daripada AS, tetapi menurut pihak Moskwa, juga lebih stabil. Dan seperti selalu dibanggakan oleh mereka, di Uni Soviet tidak terdapat "pengangguran" atau "inflasi," sedang taraf hidup meningkat dengan mantap.

Yang menjadi pokok persoalan kelihatannya adalah kecenderungan-kecenderungan tertentu dalam ekonomi Soviet yang jika tidak dicegah atau diatasi akan menjurus ke arah semakin memburuknya kehidupan ekonomi pada umumnya. Kecenderungan-kecenderungan ini dengan segala macam masalah dan konsekuensi yang ditimbulkannya tampaknya memang berkaitan erat dengan ciri-ciri sistem ekonomi Soviet itu sendiri. Di sini akan kita bahas beberapa masalah yang penting.

Ketika Gorbachev mengambil-alih kekuasaan, laju pertumbuhan ekonomi Soviet telah menurun selama dua dekade. Dalam paruh kedua dasawarsa 1960-an laju pertumbuhan itu adalah 5,3%. Dalam paruh pertama dekade 1970-an pertumbuhan itu turun menjadi 3,7% dan dalam paruh kedua menjadi 2,7%. Pada awal 1980-an, pertumbuhan turun lagi hingga 2%. Sebenarnya dalam ukuran dunia, laju pertumbuhan pada tingkat itu tidak terlalu buruk. Tetapi tingkat itu bukan saja lebih rendah daripada tingkat yang telah dicapai dalam ekonomi Soviet sebelumnya, melainkan juga jauh lebih rendah daripada yang diperlukan di masa depan menurut perkiraan pimpinan Soviet. Strategi akselerasi yang dicanangkan oleh Kongres PKUS ke-27 merencanakan untuk meningkatkan dua kali lipat pendapatan nasional dan hasil industri dalam waktu 15 tahun mendatang. Untuk itu akan diperlukan laju pertumbuhan 4,7% setahun.

Sebab utama stagnasi ekonomi, yang oleh pimpinan Soviet yang baru dilemparkan kesalahannya pada pimpinan yang terdahulu, adalah pertumbuhan "ekstensif" yang telah ditempuh sejak zaman Stalin, yaitu peningkatan produksi melalui penambahan faktor-faktor produksi: tanah, modal, tenaga kerja dan bahan mentah. Sistem "komando" Soviet memang memungkinkan mobilisasi sumber-sumber, terutama sumber manusia, secara besar-besaran untuk proyek-proyek besar seperti pembuatan jalan, pabrik baja, dan bahkan peluru kendali. Dalam dasawarsa ini sumber-sumber itu mungkin mulai menipis. Tenaga kerja, misalnya, tidak dapat lagi diserap dari pedesaan ke kota-kota seperti masa-masa sebelumnya untuk bekerja di pabrik-pabrik. Tidak banyak lagi sumber-sumber energi baru yang murah ditemukan. Oleh karena itu seperti dinyatakan dalam strategi akselerasi kini jalan pertumbuhan

melalui "intensifikasi" akan ditempuh untuk mendorong pertumbuhan. Dengan kata lain akan diusahakan peningkatan "efisiensi" penggunaan input yang dimilikinya, yang dikenal juga sebagai peningkatan produktivitas.

Peningkatan efisiensi dan dengan demikian produktivitas menyangkut antara lain penanggulangan masalah-masalah seperti disiplin, absensi, alkoholisme, dan korupsi yang sampai pada akhir pemerintahan Brezhnev telah semakin merajalela. Kampanye untuk menanggulangi masalah-masalah itu telah dirintis oleh Andropov dan kemudian diteruskan oleh Gorbachev.

Peningkatan efisiensi juga berarti penggunaan peralatan lebih efisien. Di samping itu Gorbachev juga menekankan perlunya intensifikasi pembangunan industri peralatan mesin, mungkin dengan harapan bahwa dengan alat-alat mesin yang lebih baik dan hemat energi banyak masalah ekonomi dan teknologi akan terpecahkan. Tetapi jelas bahwa menambah produksi baja dan alat-alat mesin saja tidak akan memenuhi kebutuhan Uni Soviet jangka panjang. Uni Soviet telah menghasilkan baja dua kali lipat dari AS dan lebih lagi dalam hal alat-alat mesin. Lebih penting lagi Uni Soviet perlu meningkatkan kualitas dan bukannya kuantitas produksinya. Juga Uni Soviet perlu mencari jalan untuk mendorong inovasi dan menguasai produksi teknologi tinggi yang baru dalam berbagai bidang dan bentuknya. Jika di banyak negara maju bahkan beberapa negara berkembang microprocessor menjadi semakin canggih dan telah menjadi komponen yang esensial dari mainan sampai proses-proses produksi, di Uni Soviet ia baru saja mulai muncul. Dan keterbelakangan Soviet dalam hal ini akan semakin menjadi kompleks lagi karena tingkat produksi teknologi tinggi kini sering tidak lebih dari beberapa tahun saja umurnya. Ini berarti bahwa produksi akan menjadi usang jauh lebih cepat dari sebelumnya.

Penekanan pada teknologi tinggi telah dibarengi oleh bertambah besarnya peranan jasa-jasa. Insinyur, ilmuwan, sekretaris, konsultan, salesmen, ahli-ahli teknik, dan sebagainya telah menjadi bagian yang jauh lebih penting dari proses produksi. Diperhitungkan bahwa hanya kira-kira 30% karyawan dalam perusahaan-perusahaan teknologi tinggi adalah apa yang disebut *blue-collar workers*. Ini tentu berbeda dalam hal industri berat yang tradisional. Di Uni Soviet jasa-jasa umumnya masih dianggap tidak penting. Kekuatan ekonomi Soviet selalu terletak dalam kemampuannya untuk memobilisasi jumlah kapital yang besar dalam lingkungan yang secara ekonomis miskin dan terbelakang, dan dari tahun ke tahun menanam modal itu untuk produksi industri dasar seperti pabrik baja dan alat-alat mesin. Selama bertahun-tahun ketika teknologi stabil cara itu berhasil. Dikabarkan bahwa Uni Soviet menggunakan peralatan yang diimpor dua atau tiga kali lebih lama daripada para manajer Barat yang menggunakan peralatan yang serupa. Malahan blueprint yang sama digunakan berulang kali. Tetapi para ekonom Soviet sendiri mengakui bahwa inilah hakikat sistem perencanaan Soviet yang terpusat.

Semakin pentingnya perubahan teknologi menyebabkan sistem perencanaan pusat dan mobilisasi serta pengawasan modal oleh pusat dalam sistem ekonomi Soviet menjadi kontraproduktif. Perencanaan pusat tidak cenderung mendorong inovasi. Pejabat-pejabat industri dan manajer-manajer pabrik secara tradisional diberi penghargaan karena menghasilkan barang lebih banyak, bahan lebih baik. Jika mereka menghentikan produksi untuk mengubah sesuatu model atau memperbaiki kualitas, mereka meriskir menu-runnya produksi dan dengan demikian hilangnya bonus, yang jarang diberikan karena perbaikan kualitas. Dan walaupun mereka mencoba inovasi, hampir tidak mungkin mendapatkan dana yang diperlukan untuk inovasi yang tidak jauh sebelumnya diantisipasi.

Yang penting dalam dunia industri yang berteknologi tinggi bukanlah mobilisasi dan alokasi modal secara sentral melainkan keluwesan dan sifat tanggap yang cepat. Dan ini mungkin jika terdapat desentralisasi sumber-sumber modal. Oleh sebab itu sistem ekonomi Soviet tidak tepat untuk teknologi tinggi. Tetapi birokrasi Soviet cenderung untuk mempertahankan perencanaan pusat. Pembaruan atas sistem perencanaan pusat hampir selalu berarti pemanfaatan lebih besar dari pasar dan harga, dan mungkin pimpinan Soviet khawatir bahwa sistem pasar dapat berakibat pengangguran dan inflasi secara periodik, yang selalu dikecam sebagai aspek-aspek kehidupan kapitalis yang tidak bisa dibiarkan. Uni Soviet selalu membanggakan tidak adanya pengangguran dan inflasi dalam sistem ekonominya, meskipun sebenarnya terjadi juga inflasi tidak resmi, yang menurut perkiraan sampai 4-5% per tahun dan terdapat apa yang dikenal sebagai pengangguran semu (*disguised unemployment*).

Pengangguran tenaga kerja demi efisiensi dapat mempunyai implikasi politik di Uni Soviet. Meskipun menurut suatu percobaan sebagian pekerja yang di-PHK-kan akhirnya bekerja juga di bagian-bagian lain dari pabrik yang sama, sebagian lagi yang tidak begitu beruntung mungkin akan merasakan bahwa nasibnya tidak banyak berbeda dari apa yang terjadi di negara-negara kapitalis. Ini melanggar semacam "kontrak sosial" secara implisit seperti yang telah disinggung di muka, yang merupakan kompensasi bagi tingkat hidup yang rendah dan kontrol politik yang lebih ketat. Kontrak sosial seperti itu menjamin hukum dan ketertiban dan peningkatan taraf hidup yang lambat tetapi tanpa inflasi dan yang lebih penting lagi tanpa pengangguran yang menyolok. Dalam sistem nilai Soviet, hak akan pekerjaan sama pentingnya, kalau malahan tidak lebih penting dari hak-hak asasi lainnya seperti hak berbicara, yang di dunia Barat sangat dijunjung tinggi. Lagipula, Konstitusi Soviet mengandung ketentuan yang menjamin pekerjaan bagi setiap warga negara. Pembaruan yang mengurangi atau menghapuskan komitmen ini mungkin akan menimbulkan ketidakpuasan dan akhirnya protes.

Karena Uni Soviet telah menggunakan kontrol negara dan perencanaan

pusat selama hampir tujuh dasawarsa, distorsi yang telah berkembang kelihatan lebih menyolok dan lebih sukar diatasi daripada negara-negara komunis lainnya. Ketidakseimbangan dalam sistem ekonomi Soviet tercerminkan misalnya dalam subsidi. Untuk produksi daging dan susu subsidi yang disediakan oleh pemerintah setiap tahunnya mencapai nilai kurang lebih 52 bilyun dollar AS, tetapi toh terus terjadi kekurangan dalam bahan makanan itu. Subsidi untuk perumahan kira-kira bernilai sebesar 8,5 bilyun dollar AS setahunnya. Industri bara selalu mengalami rugi kendati subsidi yang besar dan harga meningkat pada awal 1982.

Jenis distorsi lainnya adalah simpanan konsumen yang besar. Tahun 1983 deposito bank tabungan saja meningkat dari 12.6 bilyun rubel menjadi 187 bilyun rubel, sedang kenaikan penjualan eceran hanya 10 bilyun rubel. Dengan begitu terdapat pendapatan besar yang dapat disisihkan yang terkumpulkan oleh karena kurangnya pilihan barang-barang konsumsi di toko-toko. Jika negara membiarkan beroperasinya kekuatan pasar, jumlah dana ini akan merupakan potensi inflasi yang besar.

Mungkin dapat dilakukan pembaruan dalam bentuk transisi secara bertahap dan perlahan-lahan tidak terlalu jauh ke arah sistem pasar seperti di Hongaria dan Cina tanpa akibat yang terlalu traumatis. Tetapi berbeda dari Uni Soviet, penduduk Cina lebih homogen, sedang penduduk Hongaria lebih homogen dan jauh lebih kecil. Usaha desentralisasi dan orientasi pasar mungkin akan mendorong kecenderungan nasionalisme yang hingga kini masih cukup kuat di Uni Soviet untuk diwujudkan dalam tuntutan-tuntutan akan kemerdekaan politik.

Beberapa prakarsa yang diambil oleh Andropov dan ditekankan lagi oleh Gorbachev dimaksudkan untuk meningkatkan kebebasan perusahaan, tetapi ini tentu akan berhadapan dengan realitas sistem perencanaan pusat. Pembaruan yang dicoba tahun 1983 oleh Andropov, misalnya, mengizinkan beberapa perusahaan menyimpan sebagian keuntungannya dalam suatu dana khusus untuk pembangunan. Uang dari dana ini dapat digunakan oleh manajer untuk melengkapi peralatan yang disediakan baginya oleh perencana pusat. Ini diharapkan akan merangsang manajer perusahaan meningkatkan produksi dan melakukan inovasi. Para manajer pun menumpuk uang banyak dalam dana khusus itu. Tetapi kemudian ternyata bahwa uang itu tidak bernilai, karena dalam ekonomi berencana secara sentral bukanlah uang melainkan alokasi wewenanglah yang penting. Jika tidak tersedia sumber-sumber material bagi perusahaan-perusahaan, usaha semacam itu tidak ada artinya. Memang tidak mudah menerapkan segi-segi ekonomi pasar pada sistem ekonomi berencana secara sentral.

Menjadi soal pula apakah orang-orang Soviet akan tanggap terhadap rangsangan ekonomi demikian. Selama berpuluh tahun mereka telah terbiasa

hidup dengan suatu sistem yang tidak mendorong inisiatif. Memang, berkembangnya "ekonomi kedua" atau ekonomi "tidak resmi" di Uni Soviet menunjukkan bahwa banyak orang Soviet kelihatan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan ekonomi pasar. Tetapi hal itu tidak merupakan jaminan bahwa mereka mempunyai kemampuan yang sama jika sistem pasar memang merupakan norma yang berlaku. Proses pembaruan yang mendekati sistem pasar walaupun mungkin pasti akan memakan waktu dan menghadapi banyak rintangan. Jika memang pembaruan semacam itu yang dikehendaki oleh Gorbachev, ia akan memerlukan kesabaran dan ketekunan. Dia relatif masih muda. Tetapi usaha pembaruan seperti itu juga akan membawa risiko. Apakah Gorbachev akan dapat bertahan lama dalam kedudukannya dengan usaha-usaha pembaruannya? Salah satu sebab kejatuhan Khrushchev di masa lalu adalah apa yang dilihat sebagai kegagalan usaha pembaruannya. Dan pada waktu ini Gorbachev kelihatannya juga menghadapi lawan-lawan potensialnya dalam Politbiro dan aparat partai lainnya yang lebih konservatif dan mempunyai kepentingan dalam dipertahankannya status quo.

Dekolektivisasi pertanian seperti yang dilakukan di Cina juga akan mempunyai akibat yang lebih serius di Uni Soviet. Pertanian di Cina lebih bersifat padat karya. Jika hal itu dilakukan di Uni Soviet, mekanisme pasar akan diperlukan sehingga petani dapat memperoleh benih, pupuk, mesin-mesin dan fasilitas untuk storage, dan sebagainya dengan mudah.

Dalam abad teknologi tinggi, sistem Soviet untuk mobilisasi dan alokasi modal oleh pusat juga kontraproduktif. Untuk meningkatkan keluwesan, sifat tanggap yang cepat, dan peningkatan peranan jasa diperlukan desentralisasi pengambilan keputusan. Sejumlah lembaga pembuat keputusan yang independen perlu diciptakan. Tetapi di Uni Soviet tentu ini akan berarti berakhirnya monopoli negara atas sumber-sumber modal. Dan jika penguasa lokal memperoleh kontrol atas modal, kekuasaan penguasa pusat akan melemah. Ini dapat berakibat berubahnya prioritas. Dengan kemungkinan perubahan prioritas itu, mungkin penguasa lokal tidak lagi menitikberatkan pembangunan industri berat dan anggaran militer, misalnya. Di Cina, misalnya, dikabarkan bahwa petani yang kini mempunyai lebih banyak uang untuk investasi, 50-60% dana mereka ditanamkan untuk perumahan petani dan bukannya untuk produksi.

Birokrasi Soviet mungkin akan merupakan hambatan yang paling besar bagi pembaruan ekonomi karena sampai tingkat tertentu pembaruan yang menyimpang dari perencanaan pusat akan merugikan tingkat kesejahteraan mereka. Pemisahan pengelolaan ekonomi dari administrasi negara akan mengalihkan kekuasaan besar yang hingga kini berada di tangan birokrasi ke kekuatan pasar dan manajer-manajer perusahaan. Sebab itu mereka akan cenderung campur tangan dan menghambat.

Di samping itu, dapat dipersoalkan pula apakah para manajer Soviet akan memberi response yang positif terhadap pembaruan semacam itu. Tidak banyak di antara mereka berpengalaman dalam lingkungan sistem pasar. Sistem perencanaan pusat menghendaki kemampuan mereka untuk memperoleh suplai dan menghasilkan kuantitas produksi, sedang dalam sistem pasar mereka harus dapat memperhatikan dan menciptakan permintaan serta menghasilkan kualitas dan keragaman. Dua macam kemampuan ini berbeda dan tidak berkaitan.

Di samping kehilangan kekuasaan politik para manajer perusahaan, birokrat dan fungsionaris partai akan kehilangan status sebagai konsumen. Hingga kini hanya kaum elite Soviet, yang dikenal sebagai *nomenklatura*, mempunyai akses pada toko-toko khusus di mana mereka dapat memperoleh barang-barang yang paling baik dengan harga murah. Dengan ekonomi terbuka, toko-toko khusus seperti itu akan kehilangan artinya. Akses pada barang-barang dengan kualitas tinggi tidak akan lagi ditentukan oleh status tetapi oleh daya beli. Ini yang kelihatannya menjelaskan kecaman-kecaman di Cina dan Hongaria terhadap pemilik-pemilik toko kaya baru yang bernafsu mengumpulkan uang. Terdengar keluhan pula di Cina bahwa akibat pembaruan adalah bahwa "yang miskin menjadi kaya dan yang kaya menjadi miskin."

Mengingat kesulitan-kesulitan di atas dan lain-lain yang tidak semuanya dapat kita bahas di sini, mungkin kecuali harus bersabar dan tekun, juga pada akhirnya harus puas dengan hasil yang mungkin jauh dari apa yang dikehendakinya. Pada intinya ia mungkin perlu meningkatkan kegiatan individu dalam pertanian, yang ternyata memegang peranan penting dalam penyediaan bahan makanan. Ia mungkin perlu memperbesar alokasi sumber-sumber untuk barang-barang konsumsi dan memperbesar kekuasaan manajer-manajer pabrik untuk mengambil keputusan. Tetapi tentu saja langkah-langkah seperti itu mungkin tidak akan banyak mempengaruhi apalagi mentransformir sistem perencanaan pusat dan membuatnya lebih tanggap dan inovatif. Ada risiko bahwa Uni Soviet akan semakin ketinggalan dari Barat, khususnya AS.

Kurangnya pembaruan tentu saja tidak akan berarti bahwa sistem ekonomi Soviet akan bangkrut. Dengan pembaruan sedikit-sedikit dapat diharapkan pertumbuhan yang sedang-sedang saja dan mungkin akan terbatas dalam lingkungan teknologi usang. Dan kecuali jika sistem penyediaan makanan terlalu terganggu, keresahan politik akan dapat dihindari. Dengan demikian Uni Soviet akan berjalan seperti tahun-tahun sebelumnya. Perbaikan sedikit-sedikit di sana-sini akan dapat dibiayai dengan kekayaan sumber bahan mentah yang dapat pula dipergunakan untuk membeli teknologi yang diperlukan tetapi yang tidak dapat dihasilkannya sendiri.

Tetapi tanpa perubahan yang fundamental dalam sistem insentif dan pro-

ses perencanaan pusat yang ada, kecil kemungkinannya bahwa Uni Soviet pada akhirnya akan dapat mengejar kemajuan negara-negara lain, komunis maupun kapitalis, apabila negara-negara ini menunjukkan laju pertumbuhan yang tinggi dan kemajuan teknologi. Dan jika Uni Soviet tetap hendak mempertahankan posisinya sebagai negara super dan global dengan kepentingan-kepentingan global pula, desakan akan perlunya pembaruan dan apa yang disebutnya sebagai "restrukturisasi" yang lebih fundamental akan semakin terasa. Apalagi kalau Uni Soviet tetap hendak mempertahankan kedudukannya sebagai "*defender of the faith*" yang katanya selalu berpegang pada prinsip bahwa "sosialisme membuktikan keuntungan-keuntungannya melalui contoh dan bukannya melalui kekuatan senjata," tantangan yang dihadapinya semakin berat. Itulah dilema yang kini dihadapi oleh Gorbachev.

#### DAFTAR BACAAN

- Carr, E.H. *The Bolshevik Revolution, 1917-1923*. Vol. 1, 2, 3. Penguin Books, 1966.
- Cohen, Stephen F. *Rethinking the Soviet Experience: Politics and History Since 1917*. New York: Oxford University Press, 1985.
- Crankshaw, Edward. *Khrushchev's Russia*. Penguin Books, 1959.
- Elliot, Iain. "And Now Gorbachev, the Great Reformer." *Survey*, Vol. 29, No. 1 (124) (Spring 1985): pp. 1-12.
- Fewtrell, David. "The Soviet Economic Crisis: Prospects for the Military and the Consumer." *Adelphi Paper* No. 186. London: The International Institute for Strategic Studies, 1983.
- Fitzpatrick, Sheila. *The Russian Revolution, 1917-1932*. Oxford: Oxford University Press, 1982.
- Goldman I. Marshall. "Economic Problems in the Soviet Union." *Current History*, Vol. 82, No. 486 (October 1983): pp. 322-325.
- Goldman I. Marshall. *USSR in Crisis: The Failure of an Economic System*. New York: W.W. Norton & Company, 1983.
- Gurley, Joh. G. *Challenges to Communism*. San Francisco: W.H. Freeman and Company, 1982.
- Hanson, Philip. "The Novosibirsk Report: Comment." *Survey*, Vol. 28, No. 1 (120) (Spring 1984): pp. 83-109.
- Hosking, Geoffrey. *A History of the Soviet Union*. London: Fontana Press/Collins, 1985.
- Hough, Jerry F. "Gorbachev's Strategy." *Foreign Affairs* (Fall 1985): pp. 33-56.
- Kirchner, Walther. *A History of Russia*. 6th ed. New York: Barnes & Noble Books, 1976.
- MacKenzie & Curran, Michael W. *A History of Russia and the Soviet Union*. Homewood, Illinois: The Dorsey Press, 1977.

- Mandelbaum, Michael and Talbott, Strobe. *Reagan and Gorbachev*. New York: Vintage Books, 1987.
- Medvedev, Roy A. and Zhores A. *Khrushchev: The Years in Power*. Oxford: Oxford University Press, 1977.
- Medvedev, Zhores A. *Andropov: An Insider's Account of Power and Politics within the Kremlin*. Penguin Books, 1984.
- Miller, R.F. "The Soviet Economic System: Opportunities and Constraints." *Australian Outlook*, Vol. 37, No. 2 (August 1983).
- Nicholson, Martin. "Gorbachev's First Congress." *The World Today* (February 1986): pp 23-26.
- Parrot, Bruce. "Technology and the Soviet System." *Current History*, Vol. 132, No. 486 (October 1983).
- Pipes, Richard. "Can the Soviet Union Reform?" *Foreign Affairs*, Vol. 63, No. 1 (Fall 1984): pp. 47-61.
- Schmidt-Hauer, Christian. *Gorbachev: The Path to Power*. Translated by Ewald Osers and Chris Romberg. Edited by John Man. London: Pan Books, 1986.
- Smaryl, O.L. "New Technology and the Soviet Predicament," *Survey*, Vol. 28, No. 1 (120) (Spring 1984): pp. 109-112.
- Solovyov, Vladimir & Klepikova, Elena. *Behind the High Kremlin Walls*. New York: Berkeley Books, 1986.
- Walker, Martin. *The Waking Giant: The Soviet Union Under Gorbachev*. London: Michael Joseph, 1986.
- Yearbook USSR '87*. Moscow: Novosti Press Agency Publishing House, 1987.

# Pembaruan dan Liberalisasi di Cina

Endi RUKMO

Dewasa ini pembaruan sedang berlangsung di Cina. Seperti halnya di negara sosialis lainnya, pembaruan itu terjadi karena pengalaman kegagalan di masa lalu. Para pemimpin Cina mengatakan bahwa hal itu bukannya pembaruan, tetapi suatu rektifikasi atau penyesuaian. Beriringan dengan gejolak politik yang terjadi, pembaruan itu selalu ditempuh oleh kelompok yang pada waktu itu berhasil mendominasi pengambilan keputusan di dalam partai. Oleh karena itu motivasi pembaruannya pun berbeda satu sama lain. Masing-masing kelompok menganggap kelompok lain telah melakukan kesalahan dan harus dibetulkan. Meskipun demikian tampaknya terdapat kesepakatan di antara mereka bahwa sosialisme harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi Cina.

Tulisan ini mencoba meninjau perkembangan negara ini sejak Partai Komunis Cina (PKC) berkuasa tahun 1949. Dari perkembangan itu akan tampak kapan pembaruan terjadi. Apakah hal itu hanyalah pembetulan atau memang suatu pembaruan?

## LATAR BELAKANG DAN MOTIVASI

Setelah berhasil merebut dan menguasai Cina Daratan dari tangan kaum Nasionalis tahun 1949, PKC segera berupaya merombak struktur lembaga-lembaga pemerintahan sebelumnya dan menggantikannya dengan yang baru sesuai dengan sistem ideologi yang mereka anut. Kebijakan pertama yang mereka lakukan adalah *condong ke satu pihak* yaitu ke Uni Soviet. Dengan ditandatanganinya perjanjian persahabatan, persekutuan dan saling membantu di Moskwa bulan Februari 1950 antara Uni Soviet dan Cina, mengalirilah secara besar-besaran bantuan dari Moskwa ke Cina mulai dari barang-barang

modal sampai ke barang-barang konsumsi, penasihat politik, ekonomi dan militer, terlebih-lebih setelah Perang Korea meletus pada bulan Juni 1950 yang melibatkan negara itu secara langsung.

Sejalan dengan kebijakan di atas, Cina sepenuhnya mengikuti model pembangunan Soviet (Stalinis) dalam mengkonstruksi perekonomiannya, misalnya dengan menekankan pelaksanaan sistem pembangunan berencana, peneakanan pada pengawasan sentral, kolektivisasi dan pembangunan industri berat. Kebijakan ini dilaksanakan dalam Repelita I yang berlangsung dari tahun 1953 sampai tahun 1957. Sejak awal Repelita I itu Pemerintah Cina melakukan nasionalisasi hak milik dan perusahaan swasta. Pada tahun 1956 sebagian alat produksi berhasil dikuasai negara dan pada tahun 1957 sudah sekitar 9.300 perusahaan dinasionalisir.<sup>1</sup>

Pada musim dingin tahun 1955-1956 pemerintah melaksanakan sistem kolektif di bidang pertanian. Penduduk desa diorganisir dan dikelompokkan menjadi 100-300 keluarga. Setiap keluarga hanya diperbolehkan menyisihkan rata-rata 5% dari tanah mereka untuk tempat tinggal dan 95% lainnya harus diserahkan kepada negara. Tampak di sini bahwa Pemerintah Cina ingin mempercepat konsolidasi kekuatan politik di samping mempercepat proses sosialisasi di bidang pertanian. Tetapi pada tahun 1957 sistem ini gagal antara lain karena tidak terdapatnya tenaga kader yang mampu memimpinya.

Renggangnya hubungan Cina-Soviet terutama sejak Kongres Partai Komunis Uni Soviet XX bulan Februari 1956, di mana Khrushchev melontarkan kebijakan de-Stalinisasi, sangat mempengaruhi program pembangunan di Cina. De-Stalinisasi itu sendiri sebenarnya tidak ditujukan ke Cina. Meskipun demikian Mao Zedong yang pada dasarnya Stalinis sangat terpukul dan kedudukannya sebagai ketua partai mulai goncang.<sup>2</sup> Hal itu disebabkan oleh pro dan kontra de-Stalinisasi yang terjadi di kalangan para pemimpin Cina, yang merupakan awal perpecahan dan pengelompokan di kalangan pemimpin Cina yang memuncak pada saat Revolusi Kebudayaan meletus tahun 1967. Dalam proses itu mereka yang menentang Mao Zedong dibersihkan. Oleh Mao mereka dituduh telah terpengaruh gerakan de-Stalinisasi di Uni Soviet.

Untuk mencari dukungan dan memperkuat kedudukannya, Mao Zedong dengan memanfaatkan organ propaganda partai melancarkan kampanye "biarkan seratus bunga berkembang." Sasarannya adalah menarik kaum intelektual yang pada waktu itu mulai melancarkan kritik-kritik terhadap usaha sosialisasi PKC dan merangkul kembali kelompok dalam partai yang menentangnya. Tampaknya usahanya ini gagal. Hal itu terungkap dari hasil Kongres

---

<sup>1</sup>Edward K. Sah, "Historical Background to Peking's Economic Structural Reforms and the Corresponding Changes in Economic Theory," *Issues & Studies* (Juni 1985): hal. 13.

<sup>2</sup>Frans Michael, "Sino-Soviet Relations," dalam *China: A Handbook*, ed., Yuan-li Wu (New York: Preager Publisher, 1973), hal. 327.

PKC VIII bulan September 1956 yang memutuskan untuk menghapus semua yang berkenaan dengan Mao Zedong dan pemikirannya. Di samping itu ia juga dicopot dari jabatan Ketua Sekretariat Partai. Kemudian Kongres mengangkat Deng Xiaoping menjadi Sekjen Komite Sentral.<sup>3</sup> Sejak itu kekuasaan Mao Zedong dibatasi. Meskipun ia tetap dihormati sebagai pemimpin tertinggi secara informal, dalam struktur partai, khususnya sejak tahun 1959, kedudukannya sebagai ketua partai digantikan oleh Liu Shaoqi. Banyak pengamat mengatakan bahwa periode setelah Kongres PKC VIII itu adalah periode kepemimpinan kolektif pertama di Cina.<sup>4</sup>

Tetapi berkat pengalaman yang cukup banyak dalam memimpin revolusi dan namanya yang tetap disegani, Mao Zedong bisa mempertahankan popularitasnya. Meskipun hanya menjabat Ketua Kehormatan Komite Sentral ia tetap berpengaruh dalam lingkungan pengambilan keputusan. Hal itu terungkap dari andil besarnya dalam menyusun Repelita II.

Dalam penyusunan Repelita II itu terjadi suatu kesepakatan antara pimpinan puncak. Meskipun penekanan sepenuhnya pada industri berat dapat dikatakan berhasil baik, investasi besar-besaran di bidang itu telah mengorbankan pembangunan di bidang pertanian dan menambah beban hutang. Sekitar separuh dari investasi di bidang industri berat adalah bantuan Soviet yang digunakan untuk membangun 156 proyek besar di Wuhan atau Paotow di Cina Utara, yang harus dikembalikan karena bantuan itu bukannya hibah, melainkan pinjaman bersyarat lunak.<sup>5</sup> Faktor inilah yang membawa kesepakatan para pengambil keputusan dalam Kongres VIII PKC untuk meninjau kembali strategi pembangunan yang sepenuhnya berusaha menerapkan model pembangunan Soviet itu. Mereka kemudian sepakat untuk memodifikasi model pembangunan tersebut dan menyesuaikannya dengan kondisi-kondisi Cina. Faktor lain yang mempengaruhi ditinjaunya kembali strategi pembangunan itu adalah kecenderungan menurunnya bantuan Soviet dengan dicopotnya Malenkov dari kepemimpinan Soviet bulan Juni 1957.<sup>6</sup>

Faktor-faktor di atas mendorong Mao Zedong melontarkan ambisinya untuk menciptakan model pembangunan ekonomi yang sosialis ala Cina (Mao). Setelah dengan keahliannya berhasil kembali mendominasi kekuatan dalam partai, Mao Zedong mengusulkan suatu program pembangunan

<sup>3</sup>Harold C. Hinton, *An Introduction to Chinese Politics* (New Town Abbot: David & Charles, 1973), hal. 35.

<sup>4</sup>Michael, "Sino-Soviet Relations," hal. 328.

<sup>5</sup>Repelita Pertama telah menginvestasikan sekitar 25 milyar Yuan (pada tahun 1952 1 US\$ = 2,343 Yuan) dan separuhnya adalah bantuan bersyarat lunak dari Uni Soviet. Lihat John King Fairbank, *The Great Chinese Revolution 1800-1985* (New York: Harper & Row Publishers, 1986), hal. 286.

<sup>6</sup>Hinton, *Introduction*, hal. 38-39.

ekonomi yang lebih radikal yaitu menggabungkan pembangunan industri berat yang dianggapnya telah berhasil dan oleh karenanya harus diteruskan, dengan pembangunan industri ringan dan kecil di pedesaan yang bersumber pada produk-produk pertanian. Agar sosialisasi perindustrian bisa dipercepat pelaksanaannya, maka rakyat pedesaan disatukan dalam komune-komune, suatu sistem yang jauh lebih ambisius dari sistem kolektif. Usulan Mao ini dinyatakan dalam pidatonya pada sidang Kongres Rakyat Nasional bulan Februari 1958 dan secara resmi dinyatakan mulai dilaksanakan dalam pidato Liu Shaoqi pada sidang kedua Kongres PKC VIII bulan September 1956.<sup>7</sup>

Program yang ambisius ini terkenal dengan sebutan *Lompatan Besar ke Depan*. Sejak itu 170 juta keluarga petani diorganisir ke dalam 54.000 komune, yang masing-masing terdiri atas rata-rata 13 brigade produksi, 108 tim produksi, 3.400 keluarga yang beranggotakan sekitar 16.000 orang.<sup>8</sup> Ide komune ini berasal dari tradisi kuno di Cina. Sejak lama penguasa Cina telah mengorganisir kegiatan petani di desa. Mereka dikelompokkan, yang pada awal perkembangannya hanya ke dalam lima sampai sepuluh keluarga setiap kelompok, tetapi kemudian berkembang menjadi 1.000 keluarga setiap kelompoknya. Sistem ini disebut *paochia*, yaitu sistem tanggungjawab bersama di pemerintahan lokal yang bertujuan mengontrol pemungutan pajak dan loyalitas rakyat terhadap penguasa.<sup>9</sup> Mao melihat tradisi ini cocok untuk mempercepat sosialisasi pembangunan industri dan rakyat Cina. Karena berasal dari tradisi Cina sendiri, ide Mao itu segera mendapat dukungan dari semua pihak.

Bagi Mao Zedong penerimaan gagasannya itu merupakan kemenangan tersendiri. Dengan Lompatan Besar ke Depan itu ia ingin menunjukkan kepada dunia, khususnya Uni Soviet, bahwa dia tidak dapat lagi didikte. Di samping itu melalui gagasan itu Mao berambisi menjadikan Cina suatu negara sosialis yang kuat sehingga dapat menyaingi negara-negara besar kapitalis seperti Inggris dan Amerika Serikat. Di depan Konferensi Dewan Negara Tertinggi bulan September 1958 Mao Zedong mengatakan:

Pada awal pembebasan di tahun 1949, Cina hanya mampu memproduksi 8.000 mesin bubut. Itu pun hanyalah tipe mesin yang sangat sederhana ... Sembilan tahun terakhir ini kita telah memproduksi 180.000 mesin bubut ... Jika kita sekarang mulai bekerja giat, beberapa tahun lagi kita akan dapat melipatgandakan produksi mesin tersebut. Pada saat itu, apabila kita mengadakan perundingan dengan Amerika Serikat, posisi kita sudah cukup kuat.<sup>10</sup>

<sup>7</sup>*Ibid.*, hal. 40.

<sup>8</sup>Chu-yuan Cheng, "Economic Reform in Mainland China: Consequences and Prospects," *Issues & Studies* (Desember 1986): hal. 15.

<sup>9</sup>Fairbank, *The Great Chinese Revolution*, hal. 297.

<sup>10</sup>Alan P.L. Llu, "How Can We Evaluate Communist China's Political System Performance?" *Issues & Studies* (Februari 1987): hal. 119.

Pada tahun 1961 ia juga pernah mengatakan bahwa Cina harus bisa dikenal sebagai negara industri-agraris. Jika Cina ingin mengungguli Inggris dalam produksi bajanya, maka Cina harus mampu meningkatkan produksinya sampai 350 juta ton.<sup>11</sup>

Dari alasan-alasan yang dikemukakan Mao di atas tampak bahwa program pembangunan perindustrian Cina itu bukannya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, tetapi lebih pada mempercepat perombakan sistem (dari sistem kapitalis ke sistem sosialis) dan menyaingi negara besar lain yang dianggap musuh-musuhnya. Pernyataan Mao pada tahun 1961 itu, misalnya, menunjukkan tegarnya ambisi Mao meskipun dia tahu bahwa Lompatan Besar ke Depan telah gagal. Bahkan program yang sangat ambisius itu telah memakan korban sekitar 30 juta orang.<sup>12</sup> Sebagian besar dari mereka ini meninggal karena tidak kuat menanggung beban berat yang harus dipikul dalam pelaksanaan program Mao yang ambisius itu dan di bawah pengawasan yang begitu ketat dari PKC. Beban mereka bertambah berat dengan datangnya musim kering yang panjang, yang akhirnya mengakibatkan bencana kelaparan. Bencana ini menjadi semakin parah karena penduduk pedesaan yang telah diorganisir ke dalam komune-komune itu diharuskan memenuhi produksi yang ditargetkan untuk kepentingan pembiayaan pembangunan perindustrian dan pembayaran hutang ke Uni Soviet, sehingga jatah makan mereka dikurangi. Oleh karenanya program Lompatan Besar ke Depan itu pada tahun 1960 dihentikan dan dianggap gagal.

Kegagalan program itu mengakibatkan bangkitnya kembali perpecahan di dalam PKC. Masing-masing kelompok mencoba menganalisa kegagalan Repelita II dan mengeluarkan kesimpulannya sendiri. Kelompok Liu Shaoqi dan Deng Xiaoping, misalnya, menyatakan bahwa perlu dilakukan penyesuaian segera dengan melihat fakta yang ada di Cina. Kelompok ini mendukung gagasan "tanggungjawab individu" yang akan dapat meningkatkan rangsangan bagi produksi pertanian. Tetapi pendapat kelompok ini ditentang oleh Mao Zedong dan Lin Biao yang mengatakan bahwa gagasan itu hanya akan menciptakan pergolakan kelas. Kedua pemimpin ini tetap gandrung pada percepatan sosialisasi dengan pengerahan penduduk pedesaan.

Pertentangan antara kedua kelompok itu semakin tajam dengan dukungan Soviet pada Liu Shaoqi dan kawan-kawan, dan sebagai akibatnya Menteri Pertahanan Marsekal Peng Dehuai dan Kepala Staf Huang Koqeng yang sangat pro-Soviet dipecat dari jabatan mereka pada Sidang Pleno Komite Sentral tanggal 1-16 Agustus 1959. Kedudukannya digantikan oleh Marsekal Lin Biao. Kejadian ini memperburuk hubungan antara Cina dan Uni Soviet, dan berakibat dihentikannya semua bantuan Soviet ke Cina pada tahun 1960 ter-

---

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup>Fairbank, *The Great Chinese Revolution*, hal. 296.

masuk ditariknya kembali 1.390 teknisi Soviet yang bekerja di negara itu.<sup>13</sup> Dengan ditariknya bantuan itu lengkaplah kegagalan Repelita II yang akhirnya dihentikan pada tahun itu juga atau satu tahun lebih cepat dari jadwal yang direncanakan.

## PERIODE PENGATURAN KEMBALI DAN REVOLUSI KEBUDAYAAN

Kegagalan program Lompatan Besar ke Depan rupanya memperkuat posisi kelompok Liu Shaoqi. Pada pertemuan Komite Sentral bulan Januari 1961, kelompok ini berhasil menghidupkan kembali kantor-kantor cabang Komite Sentral di daerah yang telah dihapuskan pada tahun 1954, dan menempatkan orang-orangnya di sana. Keberhasilannya ini dimungkinkan karena Sekretariat Partai pada waktu itu diketuai oleh Deng Xiaoping. Dengan demikian pengaruh kelompok ini pada pengaturan kembali program pembangunan perekonomian semakin besar.

Kurangnya perhatian pada sektor pertanian selama Repelita II merupakan salah satu sebab kegagalan meningkatkan produksi pertanian. Salah satunya adalah penghapusan insentif pada sistem komune yang dilancarkan selama periode itu. Kesalahan itu agaknya yang menjadi perhatian kelompok Liu Shaoqi. Untuk memperbaikinya mereka berhasil menghidupkan kembali sistem insentif itu dan mengendorkan pengawasan terhadap kehidupan petani. Sistem komune tidak dihapus tetapi diperkecil satuannya sehingga jumlahnya bertambah besar. Pada tahun 1963 jumlah komune meningkat menjadi sekitar 74.000.<sup>14</sup> Di samping itu setiap komune pada masa itu lebih diberi kebebasan untuk membuat keputusan sendiri (desentralisasi).

Usaha swasta kecil-kecilan di bidang penanaman sayur-sayuran dan buah-buahan mulai diijinkan di samping kewajiban mengembangkan dan meningkatkan produksi komune. Hasil-hasil pertanian dari usaha swasta yang bisa dijual di pasar "bebas" itu merupakan rangsangan para petani untuk berlomba meningkatkan produksi mereka. Sebaliknya program industrialisasi yang menjadi sasaran utama pada Repelita II dikurangi dan menjadi prioritas nomor dua. Usaha-usaha itu segera menghasilkan buah. Meskipun terjadi cuaca buruk di tahun 1961, produksi pertanian dapat ditingkatkan.

Pada suatu pertemuan Komite Sentral PKC bulan September 1962 usaha-usaha kelompok Liu itu mendapat kritikan dari Mao Zedong yang tampaknya berhasil kembali mendominasi pertemuan itu. Bahkan usulannya untuk melancarkan suatu "kampanye pendidikan sosialis" diterima. Dengan dalih membersihkan unsur-unsur revisionis, Mao Zedong melancarkan kampanye

<sup>13</sup>Hinton, *Introduction*, hal. 48.

<sup>14</sup>*Ibid.*, hal. 49.

pembersihan orang-orang yang menentanginya. Dukungan para kader muda di dalam PKC dan Lin Biao di TPR (Tentara Pembebasan Rakyat) mendorong Mao untuk mempercepat pembersihan kelompok penentang baik di pemerintahan, partai maupun TPR.

Usaha Mao itu baru membawa hasil setelah berjuang selama tiga tahun (1962-1965). Pada pertemuan Komite Tetap Politbiro bulan September-Oktober 1965 Mao Zedong dan Lin Biao mendesak pertemuan agar segera dilancarkan suatu kampanye pemikiran borjuis yang reaksioner di dalam partai dan kembali kepada prinsip-prinsip dasar gerakan revolusi. Kampanye ini berhasil memikat kaum muda dan dengan dukungan mereka ini Mao meningkatkan serangannya terhadap kecenderungan "Khrushchevian" di dalam partai. Pro dan kontra Mao di kalangan kaum muda meningkat menjadi kecacauan sehingga pada bulan Juni 1966 semua sekolah ditutup. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh kelompok Mao untuk meningkatkan kampanye mengangkat kembali pemikiran Mao dan menentang kelompok moderat. Para pelajar diorganisir ke dalam suatu organisasi politik yang terkenal dengan sebutan *Pengawal Merah*. Mereka ini segera menjadi pendukung Mao yang sangat fanatik. Tidak beberapa lama jumlah mereka sudah semakin membesar. Pada bulan November 1966 Pengawal Merah di Beijing sudah mencapai sekitar sepuluh juta orang. Kegiatan mereka segera pula menyebar ke kota-kota lain.

Melalui pawai-pawai besar dan poster-poster dinding, Pengawal Merah berkampanye untuk menghidupkan kembali pemujaan terhadap Mao Zedong dan pemikirannya. Mereka juga memusnahkan apa yang mereka namakan "empat musuh lama" yaitu paham lama, kebudayaan lama, adat-istiadat lama dan kebiasaan lama. Oleh karena itu masa ini dikenal sebagai masa *Revolusi Kebudayaan*.

Karena gerakan Pengawal Merah itu, permusuhan antara kelompok Mao dan kelompok moderat di bawah Liu Shaoqi berubah menjadi konflik terbuka. Tetapi revolusi kali ini rupanya didominasi oleh kelompok Mao, sehingga "kaum revisionis" atau pengikut Khrushchev di Cina yang tergabung dalam kelompok moderat semakin terdesak. Mereka ini pada akhirnya menjadi sasaran pembersihan, baik dari jabatan pemerintahan, partai maupun militer (TPR). Kecuali Zhou Enlai, semua pengikut kelompok ini ditangkap dan dipenjarakan.

Revolusi Kebudayaan ini mengakibatkan menurunnya laju pertumbuhan ekonomi. Para pengikut Mao yang radikal itu lebih suka kalau pembangunan ekonomi ditunda, dan pembangunan politik digalakkan. Pemahaman akan norma-norma sosial kerakyatan yang menjadi dasar pemikiran Mao menjadi prioritas utama. Sebagai ganti mengikuti pelajaran di sekolah dan universitas, kepada pemuda yang tergabung dalam Pengawal Merah dibagikan "buku merah" berisi ajaran Mao Zedong untuk dipelajari, didiskusikan dan disebar-

luaskan. Untuk mengamalkan ajaran itu mereka dikirim ke pelosok-pelosok.

Gerakan Revolusi Kebudayaan ini memuncak pada bulan Januari 1967, ketika Komite Pusat GRK memerintahkan Pengawal Merah mengambil-alih kekuasaan partai. Mereka lalu bergerak ke seluruh kota di Cina dan menduduki kantor-kantor PKC dan mengusir para pejabat partai setempat. Gerakan ini menjadi kacau dan tak dapat dikendalikan sehingga akhirnya mengundang TPR untuk turun tangan. Tetapi kedatangan mereka itu terlambat karena semua infrastruktur pemerintahan dan partai sudah hancur. Tentara sendiri terpecah-belah akibat pro dan kontra pada Pengawal Merah yang diperintahkan Beijing untuk menangkap tentara yang dianggap mengikuti "jalan kapitalis," sehingga bentrokan fisik antara mereka tidak dapat dihindarkan. Karena kekacauan semakin tidak dapat diatasi, akhirnya sebagai Ketua Gerakan Revolusi Kebudayaan Mao Zedong memutuskan untuk membubarkan Pengawal Merah pada bulan Juli 1968 dengan alasan mereka gagal mengemban misi dan memerintahkan TPR untuk melaksanakan pembentukan Komite Revolusi di seluruh propinsi. Karena TPR yang disertai tugas, maka wajar kalau keanggotaan Komite Revolusi itu didominasi oleh kaum militer.<sup>15</sup>

Revolusi Kebudayaan yang pada awalnya tidak dimaksudkan untuk merintangi kelancaran pembangunan ekonomi, akhirnya toh mengakibatkan penurunan pendapatan terutama di sektor pertanian dan perindustrian. Revolusi ini juga mengakibatkan kehancuran struktur partai dan pemerintahan. Sistem komune otomatis terhenti. Oleh karena itu Kongres PKC IX yang berlangsung pada bulan April 1969 memutuskan untuk menghentikan revolusi tersebut.

Dominasi orang-orang militer dalam Komite Revolusi membuka peluang bagi Lin Biao untuk mencalonkan diri sebagai pengganti Mao Zedong. Namanya naik pesat setelah ia menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan berhasil membawa TPR ke era modern dengan suksesnya percobaan nuklir pertama tahun 1964 meskipun tanpa bantuan Uni Soviet. Percobaan ini diteruskan dan sampai bulan Mei 1966 Cina telah berhasil melakukan tiga percobaan. Hal ini mempengaruhi meningkatnya kebanggaan nasional rakyat Cina terutama dalam usaha menandingi Uni Soviet yang pada waktu itu sudah dianggap musuh nomor satunya. Ketenarannya ini memuncak setelah Revolusi Kebudayaan dinyatakan berhenti. Bahkan pada waktu itu dia dianggap sebagai pemimpin kedua Cina setelah Ketua Mao dan sebagai calon penggantinya pada Kongres PKC IX.

---

<sup>15</sup>William A. Joseph, "China's Modernization of Mao," *Current History* (September 1986): hal. 267.

## MODERNISASI: GAGASAN DAN PELAKSANAAN

Semakin meningkatnya dominasi militer dan terutama pengaruh Lin Biao dalam TPR menyadarkan Mao Zedong dan Zhou Enlai yang tetap tidak tergeser dari jabatan Perdana Menteri meskipun semua rekannya terdepak ke luar, bahwa hal itu akan membahayakan kedudukan mereka. Maka pada awal tahun 1970-an dimulailah usaha-usaha untuk mendepak Lin Biao. Untuk itu Mao sendiri melakukan perjalanan ke daerah-daerah dan bertemu dengan para kepala daerah militer untuk memeriksa loyalitas mereka. Setelah terjadi usaha kudeta militer yang melibatkan anaknya, pada bulan September 1971 Lin Biao dan isterinya berusaha lari ke luar Cina, tetapi pesawat yang mereka tumpangi jatuh dan menewaskan semua penumpang.<sup>16</sup>

Meninggalnya Lin Biao itu membuka peluang kelompok moderat untuk tampil kembali. Tetapi hambatan yang mereka hadapi saat itu adalah kelompok Revolusi Kebudayaan binaan Ketua Mao Zedong terutama kelompok Revolusi Kebudayaan cabang Shanghai yang diketuai oleh istri Mao, Ny. Jiang Qing dan tiga rekannya (Yao Wanyuan, Wang Hungwen dan Zhang Chungqiao) yang kemudian dikenal sebagai "Empat Sekawan." Keempatnya ini berhasil dimasukkan Mao ke dalam keanggotaan Politbiro.

Sementara itu, Zhou Enlai berhasil mempengaruhi Mao untuk merehabilitasi teman seperjuangannya, Deng Xiaoping. Pada Kongres PKC X bulan Agustus 1973, Deng direhabilitasi dan kembali menjadi anggota Politbiro. Beberapa pengamat mengatakan bahwa rehabilitasi Deng itu untuk mengimbangi diangkatnya Wang Hungwen menjadi anggota badan tertinggi PKC itu.

Faktor senioritas dan kepandaiannya baik di bidang ekonomi maupun politik luar negeri membuat Zhou Enlai lebih populer dari Ny. Jiang Qing dan kawan-kawan, terlebih-lebih setelah Deng muncul kembali. Dengan dukungan Deng ini Zhou melontarkan kembali gagasannya tentang *modernisasi* (yang pernah ia nyatakan pada tahun 1964) dalam Kongres Majelis Rakyat Nasional IV bulan Januari 1975. Dikatakannya bahwa jika Cina ingin menjadi negara sosialis yang besar dan kuat di akhir abad ke-20, maka ia harus melaksanakan empat modernisasi yaitu modernisasi di bidang pertanian, perindustrian, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pertahanan. Sementara itu Deng pada kongres itu diangkat menjadi Wakil I Perdana Menteri, sehingga hanya dua tahun setelah direhabilitasi ia sudah berhasil menduduki peringkat ketiga sesudah Mao dan Zhou.

Meninggalnya Zhou Enlai bulan Januari 1976 merupakan tragedi kedua bagi Deng Xiaoping. Beberapa bulan setelah peristiwa itu untuk kedua kalinya

---

<sup>16</sup>Penyebab kematian Lin Biao sampai sekarang masih belum jelas. Ada yang mengatakan bahwa pesawat yang ditumpanginya ditembak jatuh. Tetapi ada pula sumber yang mengatakan bahwa di dalam pesawat itu tidak terdapat Lin Biao.

ia disingkirkan dari semua jabatannya. Ia dituduh bertanggungjawab atas pengerahan massa demonstran di Lapangan Tienanmen pada bulan April 1976 untuk menghormati meninggalnya Zhou Enlai. Hua Guofeng, anak didik Mao yang pada waktu itu menjabat Perdana Menteri, mendukung pemecatan itu. Bahkan pada rapat Politbiro tanggal 7 Oktober 1976, Hua masih menyerang dan mengkritik Deng seperti yang pernah dilontarkan oleh Empat Sekawan dan Mao Zedong.

Rupanya hanya karena desakan Zhou Enlai, Deng Xiaoping direhabilitasi. Pada dasarnya Mao dan kelompoknya tidak suka kepada tokoh yang pandai dan cukup berpengaruh ini. Oleh karena itu begitu Zhou meninggal, kelompok ini segera berusaha mendepak Deng keluar dari partai dan pemerintahan.

Pemecatan Deng ini tidak begitu saja diterima oleh para pengikut dan simpatikan kelompok moderat. Akibatnya timbullah konfrontasi terbuka di wilayah-wilayah yang menjadi basis kekuatan Deng Xiaoping. Mereka terus menuntut agar nama Deng Xiaoping direhabilitasi.<sup>17</sup> Pergolakan antara kedua kelompok itu semakin memuncak, terlebih-lebih setelah meninggalnya Ketua Mao Zedong tanggal 9 September 1976. Hanya karena penengahan oleh tokoh militer kawakan Marsekal Ye Jiangying, Hua Guofeng tidak melanjutkan serangannya terhadap Deng Xiaoping dan bahkan kemudian pada Konperensi Kerja Komite Pusat PKC yang berlangsung bulan Maret 1977, disetujui suatu resolusi yang mendesak Deng untuk tampil kembali dalam kepemimpinan partai dengan satu syarat yaitu ia harus mengakui kesalahan-kesalahannya di masa lalu.

Hasil Konperensi Kerja Komite Pusat PKC itu dijadikan bahan pembahasan Sidang Pleno ke-3 Kongres Komite PKC X yang kemudian memutuskan untuk mengangkat Hua Guofeng menjadi Ketua Partai dan Ketua Komisi Militer Komite Pusat Partai dan Deng Xiaoping menjadi Wakil Ketua I PKC, Wakil Ketua Komisi Militer Komite Pusat, Wakil Perdana Menteri dan Ketua Staf Umum PLA. Di samping itu Sidang juga sepakat untuk menyatakan bahwa Empat Sekawan adalah musuh bersama. Oleh karenanya mereka dipecat untuk seterusnya dari PKC.<sup>18</sup> Sejak itu pembersihan terhadap kelompok radikal dimulai, dan sebaliknya dominasi kelompok moderat di bawah pimpinan Deng Xiaoping terus meningkat.

Kongres PKC XI bulan September 1977 atau tepatnya Sidang ke-3 Komite Sentral Kongres PKC XI bulan Desember 1978 merupakan saat yang menentukan perkembangan Cina selanjutnya. Sejak Kongres XI dibahas menyeluruh baik mengenai kejadian sebelumnya maupun rencana strategi yang akan

<sup>17</sup>Lihat *Indonesia dan Dunia Internasional 1978* (Jakarta: CSIS, 1979), hal. 511.

<sup>18</sup>Warren Kuo, "The Political Power Structure in Mainland China," *Issues & Studies* (Juni 1978): hal. 23.

ditempuh. Sidang sepakat bahwa Pemerintah Cina telah melakukan kesalahan-kesalahan sejak Kongres PKC VIII bulan September 1956. Kesalahan terbesar adalah kebijakan Lompatan Besar ke Depan dan Revolusi Kebudayaan. Kesalahan-kesalahan itu mengakibatkan menurunnya secara drastis pertumbuhan perekonomian dan timbulnya pergolakan politik. Untuk itu sidang sepakat untuk mengadakan koreksi dan penyesuaian-penyesuaian.

Tahap pertama yang dilakukan oleh Deng Xiaoping adalah memantapkan posisinya dengan menarik anak didiknya, Hu Yaobang, ke dalam Politbiro dan diberi posisi ketua departemen organisasi partai pada Sidang Pleno ke-3 Komite Sentral PKC itu. Bersama Hu, Deng Xiaoping mengusahakan pembaruan-pembaruan dan koreksi atas kebijakan pemerintah sebelumnya. Dominasi kelompok Deng ini semakin mantap dengan masuknya Zhao Ziyang ke dalam Politbiro pada Sidang Pleno ke-4 Kongres PKC XI bulan September 1979.<sup>19</sup> Sementara itu usaha pembersihan sisa-sisa kelompok Revolusi Kebudayaan terus digalakkan. Dan akhirnya Hua Guofeng sendiri juga terdepak ke luar dari Politbiro dan pemerintahan Cina pada bulan September 1980. Semakin kuatnya posisi kelompok Deng ini segera dimanfaatkan untuk melaksanakan gagasan "Empat Modernisasi" seperti yang pernah dilontarkan oleh mendiang Zhou Enlai. Untuk itu Hu Yaobang disertai tugas membenahi urusan kepartaian dan Zhao Ziyang urusan pemerintahan menggantikan Hua Guofeng.

Sasaran empat modernisasi adalah menjadikan Cina suatu negara sosialis yang kuat dan modern di akhir abad ke-20 atau pada awal tahun 2000-an. Untuk itu pendapatan per kapita harus ditingkatkan empat kali lipat menjadi sekitar US\$1.000 dengan melalui peningkatan pertumbuhan produksi baik di sektor industri maupun pertanian rata-rata 7,2% per tahun. Di sektor perindustrian sasaran modernisasi adalah pembangunan 120 proyek besar termasuk 10 kelompok industri besi dan baja, 9 industri non-ferrus metal, 8 tambang batu bara, 10 tambang minyak dan gas, 30 pusat tenaga listrik, 6 jalur kereta api baru dan 5 pelabuhan.<sup>20</sup>

Sementara itu di sektor pertanian prioritas utama adalah peningkatan kehidupan petani di pedesaan. Sasaran dan rencana pembangunan pertanian ini untuk pertama kalinya dinyatakan oleh Deng Xiaoping di depan Sidang ke-3 Komite Sentral PKC. Antara lain ia mengatakan bahwa prioritas utama pembangunan akan lebih ditujukan pada pembangunan pertanian. Suatu sistem baru akan diterapkan untuk menggantikan sistem lama. Inti sistem baru itu adalah tanggungjawab kontrak atas dasar keluarga dengan penggajian yang

<sup>19</sup>Michael Yahuda, "Recent History of PRC," *The Far East and Australasia 1986* (London: Europa Publication Ltd., 1987), hal. 295.

<sup>20</sup>Kevin Rafferty, "China's Modernization Problems," *Asia and Pacific 1982* (London: World of Information, 1982), hal. 56.

disesuaikan dengan produktivitas. Sistem ini merupakan kebijakan yang tidak lagi mengharuskan keluarga petani bekerja bersama-sama dalam komune, melainkan menyewa tanah pada pemerintah untuk diusahakan sendiri dan langsung mendapatkan keuntungan.<sup>21</sup> Dengan demikian sistem komune yang dilaksanakan sejak tahun 1958 dan yang sudah banyak menimbulkan korban itu dihentikan.

Meskipun demikian Pemerintah Cina menegaskan bahwa modernisasi itu tidak boleh menyimpang dari *Empat Prinsip Utama* yaitu mendukung sosialisme, PKC, kediktatoran proletar dan pandangan Marxis-Leninis dan Maois. Pernyataan seperti ini sering diucapkan oleh Deng Xiaoping sejak tahun 1977. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau jatuhnya Hu Yaobang pada awal tahun 1987 disebabkan oleh tuduhan bahwa ia telah mendorong penyimpangan dari empat prinsip tersebut. Sebagai orang yang bertanggungjawab atas kehidupan partai, ia seharusnya bekerja atas dasar empat prinsip itu. Tetapi justru sebaliknya ia mendukung demonstrasi mahasiswa yang berlangsung dari awal Desember 1986 sampai pertengahan Januari 1987 dan menuntut liberalisasi yang lebih luas yang oleh rezim Beijing disebut sebagai "liberalisme borjuis." Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan modernisasi yang sedang berlangsung di Cina itu tetap akan dipertahankan dalam kerangka pembangunan sosialisme.

## DAMPAK, HAMBATAN DAN PROSPEK

Kebijakan yang dilontarkan sejak Kongres PKC XI itu banyak membawa dampak baik pada kehidupan rakyat di pedesaan, manajemen perindustrian maupun kehidupan politik. Sejak awal pemerintah memang telah menegaskan bahwa modernisasi itu tetap harus di dalam kerangka sosialisme (ortodoks). Tetapi kenyataannya terjadi pembaruan di beberapa sektor. Sebagai contoh terjadinya pembaruan di sektor pertanian pedesaan. Di dalam sistem baru cara kuota mulai diterapkan. Para petani diwajibkan memenuhi jatah produksi yang akan dibeli oleh pemerintah (90% dari hasil panen) dan sisanya boleh dijual di pasar (bebas terpinpin). Untuk mendukung sistem pasar ini pemerintah mengizinkan kembali usaha-usaha swasta. Hal ini bertolak belakang dengan Pemerintah Cina tahun 1957 yang berusaha membasmi usaha swasta dan menasionalisasi sekitar 9 juta perusahaan swasta.

Sistem baru ini membawa dampak positif dalam kehidupan rakyat di pedesaan. Sejak tahun 1979 hasil pertanian naik rata-rata (berdasarkan harga konstan tahun 1980) 6,5% per tahun.<sup>22</sup> Sementara itu jumlah usaha swasta

<sup>21</sup>*Suara Karya*, 3 Januari 1985.

<sup>22</sup>*Far Eastern Economic Review*, "China '82," 1-7 Oktober 1982: hal. 49.

yang tahun 1978 hanya tinggal sekitar 150.000, pada tahun 1979 meningkat menjadi 810.000 dan pada tahun 1982 menjadi 1.470.000 buah.<sup>23</sup> Di samping itu perekonomian pedesaan bergerak menuju spesialisasi dan dengan sistem insentif itu para petani berlomba meningkatkan produksi mereka dengan harapan agar sisa hasil yang harus dijual kepada pemerintah meningkat. Dengan demikian mereka dapat menjual lebih banyak hasil di pasar bebas.

Pembaruan di sektor pertanian itu dijadikan eksperimen oleh pemerintah untuk perbaikan-perbaikan kehidupan rakyat selanjutnya. Salah satu pelajaran yang diperoleh oleh para pemimpin Cina adalah bahwa monopoli pemerintah merupakan hambatan kemajuan. Oleh karenanya, pemerintah memutuskan (Januari 1982) untuk menghapuskan pembelian secara monopoli hasil panen para petani. Meskipun tidak dikatakan secara jelas, dapat disimpulkan bahwa keputusan itu membuat para petani bebas memperdagangkan hasil panen mereka. Keputusan itu diikuti oleh keputusan di bidang lain. Misalnya, dengan dihapuskannya sistem komune rakyat dan brigade produksi, pemerintah membentuk pemerintahan kotapraja dan komite penduduk desa. Sejak bulan Oktober 1983, telah dibentuk 75.870 pemerintah kotapraja dan 700.000 komite penduduk desa.

Pembaruan di bidang pertanian itu diikuti oleh pembaruan di sektor industri. Tetapi pembaruan di sektor ini pada mulanya mengalami hambatan dengan sangat terbatasnya dana dan terlalu ambisiusnya target yang akan dicapai. Oleh karena itu Kongres Partai Komunis Cina XII yang berlangsung sejak bulan September 1982 mulai mengadakan koreksi-koreksi dan penyesuaian laju pembangunan dengan kenyataan yang ada. Koreksi pertama yang dilakukan adalah penundaan pembangunan di beberapa sektor industri berat dan meningkatkan pembangunan industri ringan, yang lebih banyak hubungannya dengan sektor pertanian.

Pada Sidang lengkap ke-3 Komite Sentral Kongres PKC XII tanggal 20 Oktober 1984, Deng Xiaoping menyampaikan suatu keputusan pembaruan struktur perekonomian. Keputusan ini tampaknya sama pentingnya dengan keputusan pembaruan di sektor pertanian yang telah disampaikan pada Sidang ke-3 Komite Sentral Kongres PKC XI tahun 1978. Keputusan ini juga dapat dikatakan sebagai langkah selanjutnya dari usaha Pemerintah Cina dalam mengadakan pembaruan di bidang ekonomi. Bila dilihat isinya, keputusan ini menekankan pembaruan di bidang kehidupan perusahaan. Meskipun pada dasarnya Pemerintah Cina tetap menekankan superioritas sosialisme, nyatanya pada keputusan yang baru ini teori kapitalisme mulai diterapkan.

---

<sup>23</sup>Chao Yin-shen, "Expansion on Individual Economy on the Chinese Mainland," *Issues & Studies* (April 1984): hal. 5-8.

Tiga hal penting perlu dicatat dari pernyataan Deng Xiaoping tersebut. *Pertama*, usaha pemerintah untuk menjadikan penyegaran badan usaha sebagai kunci penyusunan kembali perekonomian nasional. Pemerintah menyadari bahwa struktur perekonomian Cina lemah karena kurangnya vitalitas perusahaan-perusahaan yang disebabkan oleh pengawasan ketat dari negara (partai). Untuk mengatasinya, pemerintah, melalui keputusan itu, menetapkan bahwa atas dasar kebijaksanaan pemerintah dan ketaatan kepada pengawasan pemerintah, setiap perusahaan diijinkan untuk menentukan kebijaksanaan sendiri seperti misalnya menciptakan bentuk operasi yang berbeda-beda; merencanakan produksi, suplai dan pemasarannya sendiri; mengelola dana sendiri; menunjuk, menggeser, mempekerjakan atau memilih pegawainya sesuai dengan peraturan pemerintah; memutuskan cara penggajian dan pemberian insentif; menentukan harga produk dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan lain-lain. Di lain pihak, status para pekerja, yang pada dasarnya juga pemilik perusahaan, harus dijamin oleh peraturan perusahaan, dan penampilan kerja harus selalu disesuaikan dengan insentif.

*Kedua*, usaha pemerintah untuk menciptakan suatu sistem di mana hukum nilai diterapkan secara terbatas pada pengembangan komoditi dalam sistem perekonomian sosialis. Pemerintah mengakui bahwa di dalam sistem ini, negara melakukan suatu pengawasan yang sangat ketat dan kaku terhadap perusahaan-perusahaan, dan perencanaan perekonomian ditujukan justru untuk melawan hukum nilai, serta seluruh kegiatan perekonomian tergabung dalam rencana-rencana dan dilaksanakan oleh tertib administrasi tanpa memperhatikan segi-segi penting dalam hukum ekonomi dan kekuatan pasar. Akibatnya, rencana-rencana itu gagal untuk mencapai sasaran. Menurut keputusan di atas, produksi dan nilai tukar, sementara menjadi dasar kegiatan pasar, dibatasi untuk produksi-produksi tertentu, seperti barang-barang kebutuhan sehari-hari, dan usaha-usaha pelayanan termasuk bengkel-bengkel. Dari keputusan itu dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Cina mulai memberikan kelonggaran dan kebebasan kepada perusahaan-perusahaan untuk menentukan kebijakan mereka sendiri, dan mulai memperhatikan hukum nilai dan hukum ekonomi.

Hal itu tampak pula pada catatan *ketiga*, yaitu usaha Pemerintah Cina dalam menentukan sistem harga. Dewasa ini pemerintah mengakui bahwa sistem harga adalah cara yang paling efektif dan merupakan kekuatan perusahaan-perusahaan untuk tumbuh dan berkembang.<sup>24</sup> Di samping itu mereka juga mengakui bahwa penyesuaian harga adalah penting untuk menjawab dengan cepat bila terjadi perubahan penawaran dan permintaan pasar. Konsekuensinya harga kebanyakan barang kebutuhan di Cina agak naik karena selama ini hampir semua barang mendapat subsidi negara.

<sup>24</sup>Robert Maxwell (ed.), *Deng's Speeches and Writing* (Oxford, Pergamon Press, Ltd., 1984), hal. 45.

Untuk menunjang usaha-usaha perbaikan perekonomian itu Pemerintah Cina sejak Sidang Pleno ke-3 Komite Sentral Kongres PKC XI telah merintis kebijakan "pintu terbuka" dalam menarik modal asing dan teknologi dari negara-negara lain, dan memperluas perdagangan luar negeri guna meningkatkan devisa negara. Sebenarnya kebijakan ini dilontarkan beberapa bulan setelah Deng Xiaoping menyatakan pentingnya kebijakan pintu terbuka untuk pembangunan perekonomian Cina pada pembukaan Konferensi Ilmu Pengetahuan Nasional tanggal 18 Maret 1978,<sup>25</sup> dan diulangnya pada pembukaan Sidang Pleno Komite Sentral III itu. Memang baik sebelum maupun sesudah sidang itu, mulai meningkat kunjungan pejabat tinggi asing terutama dari Amerika Serikat, Jepang dan Eropa Barat. Bahkan pada tanggal 12 Agustus 1978 Perjanjian Perdamaian dan Persahabatan antara Cina dan Jepang ditandatangani. Kemudian pada tanggal 1 Januari 1979 hubungan diplomatik antara Cina dan Amerika Serikat dibuka secara resmi. Demikian pula dewasa ini terdapat sekitar 15.000 mahasiswa dan cendekiawan Cina belajar dan tinggal di Amerika Serikat dan beberapa ribu di Jepang dan Eropa Barat.<sup>26</sup>

Di samping itu Pemerintah Cina pada awal tahun 1984 mulai menganut apa yang disebut *satu negara dua sistem* yaitu di bawah kedaulatan sistem sosialis, sistem kapitalis diijinkan hidup. Pernyataan mengenai hal ini sebelumnya memang sudah sering dilontarkan baik oleh Deng maupun Zhao Ziyang. Banyak pengamat memperkirakan bahwa pernyataan itu hanya dimaksudkan untuk penyatuan kembali Hong Kong, Makao dan Taiwan. Tetapi dengan diputuskannya 14 kota yang terletak di sepanjang pantai timur pada awal bulan April 1984 sebagai daerah-daerah administrasi khusus yang boleh menentukan peraturan yang berbeda untuk merangsang modal asing,<sup>27</sup> maka sasaran satu negara dua sistem itu bukan melulu untuk penyatuan kembali ketiga wilayah tersebut, melainkan juga untuk menarik sebanyak mungkin modal dan dana dari negara-negara lain yang penting artinya untuk kelancaran pembangunan.

Tampaknya usaha yang telah dan sedang dilakukan oleh Pemerintah Cina itu mengundang sikap pro dan kontra terutama di kalangan anggota PKC yang beranggotakan sekitar 40 juta orang itu dan TPR. Mereka yang kontra itu sebenarnya tidak kontra pada pembaruan, tetapi mereka tidak setuju dengan cara-cara pembaruan yang dianggap oleh mereka telah menyimpang dari empat prinsip utama yang telah disepakati bersama. Kelompok ini ternyata masih cukup besar pengikutnya. Hal itu terungkap dengan jatuhnya Hu

---

<sup>25</sup>Dasar kebijaksanaan ini terdapat dalam Konstitusi Cina tahun 1982 Pasal 11. Mengenai hal ini lihat Chu-yuan Cheng, "Economic Reform in Mainland China," hal. 29-33.

<sup>26</sup>*Ibid.*, hal. 34, dan John Bryan Starr, "Sino-American Relations: Policies in Tandem," *Current History* (September, 1986): hal. 242.

<sup>27</sup>*Merdeka*, 4 April 1984.

Yaobang yang sebelumnya dianggap orang sebagai tokoh kuat pendukung Deng Xiaoping sekaligus sebagai calon utama penerus usahanya di masa mendatang bila Deng tiada. Namun disepakatinya Zhao Ziyang untuk menggantikan Hu sebagai Ketua Partai mengungkapkan bahwa kelompok yang kontra itu tidak sepenuhnya menentang usaha-usaha yang telah dan sedang dilakukan Pemerintah Cina (kelompok moderat).

Melihat perkembangan sejarah Cina sejak tahun 1949, sulit kiranya memperkirakan prospek pembaruan yang sekarang digalakkan itu. Tetapi dampak yang terjadi seperti meningkatnya taraf hidup rakyat di desa-desa (petani), desentralisasi keputusan dan sistem insentif yang berhasil meningkatkan output perusahaan, meningkatnya arus informasi dari luar akibat kebijakan pintu terbuka dan lain-lain, agaknya tetap akan mendorong pembaruan tersebut. Deng Xiaoping pada bulan Desember 1984 pernah mengatakan bahwa teori Marx yang dibuat 100 tahun yang lalu tidak dapat memecahkan semua permasalahan yang dihadapi rakyat Cina sekarang ini.<sup>28</sup> Hal itu dapat diartikan bahwa rakyat Cina tidak harus tergantung sepenuhnya pada Marxisme.

Tetapi peristiwa jatuhnya Hu Yaobang itu mengungkapkan bahwa rezim Beijing atau khususnya PKC tidak menghendaki pembangunan nasional Cina lepas dari kendalinya. Mereka lebih suka menunda pembangunan daripada melihat kekuasaan partai semakin terongrong. Jadi apa yang akan terjadi di Cina pada akhir abad ini, kiranya tetap akan dalam lingkup kendali Partai Komunis Cina meskipun di sana-sini terjadi penyesuaian-penyesuaian mengingat tidak akan terdapat lagi pemimpin seperti Mao Zedong atau Deng Xiaoping. Yang akan terjadi adalah keputusan kolektif atau kepemimpinan kolektif. Di samping itu penyesuaian juga terjadi karena meningkatnya kesalingtergantungan antara faktor intern dan ekstern. Hal ini tidak saja terjadi di Cina, tetapi juga di negara sosialis lainnya.

---

<sup>28</sup>Chang Cheng-pang, "On the Four Cardinal Principles," *Issues & Studies* (Februari 1987): hal. 6.

# Vietnam: Rekonstruksi dan Pembangunan Sosialis

Asnani USMAN

Masalah pembangunan ekonomi Vietnam erat kaitannya dengan perjuangan kemerdekaan dan persatuan negara ini sejak permulaan. Perjuangan melawan kembalinya penjajahan Perancis setelah Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945 menyebabkan Vietnam tidak sempat memikirkan rencana pembangunan ekonominya. Kebijakan ekonomi yang ditempuh bersifat spontan (tidak terencana) sesuai dengan kebutuhan, misalnya program penurunan sewa tanah yang dikeluarkan dalam dasawarsa 1940-an dan tahun 1953.

Tetapi setelah sebagian kemerdekaannya berhasil dipertahankan melalui Konferensi Jenewa 1954, Vietnam Utara mulai memikirkan usaha-usaha pembangunan ekonominya. Hal ini terwujud dengan ditetapkannya Rencana Tiga Tahun I (1955-1957) pada akhir tahun 1955. Oleh sebab itu tulisan ini akan membahas pembangunan ekonomi Vietnam sejak itu sampai sekarang.

## REVOLUSI DAN PERENCANAAN EKONOMI "SOSIALIS" VIETNAM

Peperangan yang berlarut-larut selama 30 tahun dalam memperjuangkan kemerdekaan dan persatuan negara merupakan faktor utama yang menyebabkan Vietnam menghadapi berbagai kesulitan dalam pembangunan ekonomi dan negaranya yang dilandaskan pada ideologi komunis. Dalam salah satu thesis politik Partai Komunis Indocina dikemukakan "karakter dan tugas Revolusi Indocina" yang menjadi dasar strategi gerakan komunis untuk tahun-tahun mendatang yang terdiri atas dua tahap. *Tahap pertama* adalah revolusi demokrasi borjuis yang anti-imperialis dan anti-feodal. *Tahap kedua* adalah "revolusi rakyat atau sosialis" tanpa melewati pembangunan ekonomi kapitalis dengan sasaran pencapaian "pemilikan bersama alat-alat produksi,"

dan lenyapnya kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi.<sup>1</sup>

Proklamasi kemerdekaan Vietnam Utara (Republik Demokrasi Vietnam/RDV) pada tanggal 2 September 1945 merupakan keberhasilan awal dalam revolusi tahap pertama yang "anti-imperialis" (Jepang). Tetapi perjuangan ini masih berlanjut dengan kembalinya penjajahan Perancis yang berakhir dengan terbaginya untuk sementara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan sebagai hasil Konferensi Jenewa 1954. Berbeda dari perjuangan melawan Jepang, dalam usaha Vietnam Utara mempertahankan kemerdekaan dari Perancis telah dilaksanakan kedua sasaran sekaligus perjuangan "anti-imperialis" dan "anti-feodal."

Tujuan utama Partai Pekerja Vietnam (yang didirikan setelah Partai Komunis Indocina dibubarkan tahun 1951) pada mulanya adalah melawan imperialis Perancis dan mencapai kemerdekaan. Tetapi karena dukungan dari kaum pekerja, borjuis, dan mahasiswa ternyata tidak mencapai kemajuan dalam perjuangan, Partai Pekerja Vietnam (PPV) telah mencari dukungan para petani di desa-desa. Selain itu keberhasilan Cina dalam perang saudara yang didukung oleh kaum tani tanpa perlawanan dalam kota juga merupakan salah satu faktor yang mendorong PPV untuk mengambil keputusan ini.

Untuk mencapai tujuan itu PPV menyusun suatu program menyeluruh untuk mempercepat revolusi anti-feodal melalui pembebasan tanah (*land reform*). Dalam bulan Januari 1953 diadakan suatu kampanye pembaruan pertanian yang dimulai dengan program penurunan sewa tanah dua tahun. Sebenarnya dalam dasawarsa 1940-an telah dilaksanakan penurunan sewa tanah dan bunga yang tinggi, tetapi tidak berhasil karena tidak dipatuhi oleh para pemilik tanah kaya yang dukungannya diharapkan dalam perjuangan Vietnam. Sebagai tindak lanjut dari kampanye itu pada akhir tahun 1953 diumumkan Kebijakan Pertanian Baru oleh Ho Chi Minh di Majelis Nasional.<sup>2</sup>

Dalam periode selanjutnya (1954-1960), Vietnam Utara lebih memusatkan perhatiannya pada masalah-masalah ekonomi dalam usaha melaksanakan sasaran revolusi sosialis. Dalam jangka panjang pembangunan "ekonomi sosialis" adalah membangun "masyarakat komunis." Tetapi dalam jangka pendek, perhatian utama diberikan pada konsolidasi dukungan rakyat dan usaha menempatkan ekonomi pada suatu pijakan yang wajar. Kebijakan yang radikal dalam usaha menasionalisasi industri dan kolektivisasi pertanian hanya akan mengurangi dukungan rakyat bagi perjuangan persatuan Vietnam.<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Huynh Kim Khanh, *Vietnamese Communism 1925-1945* (Ithaca dan London: Cornell University Press, 1982), hal. 130; lihat juga, *idem*, "Year One of Postcolonial Vietnam," *Southeast Asian Affairs* 1977 (Singapore: ISEAS, 1977), hal. 301.

<sup>2</sup>William J. Duiker, *The Communist Road to Power in Vietnam* (Boulder, Colorado: Westview Press, 1981), hal. 152-154.

<sup>3</sup>*Idem*, *Vietnam: Nation in Revolution* (Boulder, Colorado: Westview Press, 1983), hal. 102.

Oleh karena itu kebijakan ekonomi yang ditetapkan dalam masa-masa sesudah Konperensi Jenewa 1954 bersifat moderat. Walaupun bank-bank dan usaha-usaha bisnis berada di bawah pengawasan pemerintah, perdagangan barang pabrikaan (*manufacturing*) tetap di tangan swasta dan kelas menengah ditenangkan dengan dijaminnya keuntungan mereka dan dimanfaatkannya keahlian mereka oleh rezim baru. Tetapi untuk memperluas pengawasan pemerintah atas kehidupan ekonomi dan mengadakan persiapan bagi pengembangan pemilikan sosialis telah ditempuh usaha-usaha pengaturan gaji, harga, dan alokasi barang-barang dan mendorong usaha swasta menjadi usaha patungan swasta dan pemerintah. Dalam patungan ini pihak swasta setuju menerima keterlibatan pemerintah dalam pengambilan keputusan dan pemilikan. Imbalannya adalah subsidi negara dan kemudahan bagi akses bahan-bahan mentah.<sup>4</sup>

Kebijakan ekonomi yang moderat itu akan ditempuh PPV dalam perencanaan ekonomi sosialis yang dimulai pada akhir tahun 1955 setelah Badan Perencanaan Nasional dan Kantor Statistik Pusat dibentuk di Hanoi. Badan ini menetapkan Rencana Tiga Tahun I Restorasi Ekonomi dan Pembangunan Kebudayaan (1955-1957) yang pelaksanaannya dibantu oleh ahli-ahli dari Uni Soviet dan Cina. Tujuan utama perencanaan ini ialah meningkatkan hasil pertanian, memperbaiki usaha-usaha industri, memantapkan situasi keuangan dan ekonomi. Dari alokasi pengeluaran terlihat perencanaan ekonomi yang lebih dipusatkan pada pembangunan industri (38%) yang hampir dua kali lipat pembangunan pertanian (20%).<sup>5</sup> Penekanan pada pembangunan industri yang dianut Uni Soviet dan Cina pada saat itu telah mempengaruhi perencanaan RDV. Hal ini berkaitan dengan bantuan yang diberikan oleh kedua negara itu kepada Vietnam.

Tetapi sasaran yang ingin dicapai<sup>6</sup> oleh Rencana Tiga Tahun I itu telah mengalami berbagai hambatan. Kerusakan panen akibat bencana alam dan terpisahnya delta Sungai Mekong dengan surplus pertanian yang berada di Vietnam Selatan menyebabkan Vietnam Utara kekurangan pangan. Keberhasilan program *land reform* yang dilaksanakan sejak tahun 1954 dalam pembagian tanah (800.000 hektar tanah telah dibagikan dan 2 juta keluarga petani telah menerima tanah)<sup>7</sup> tidak disertai peningkatan produksi. Program pembagian tanah yang dipaksakan tanpa insentif bagi para petani menyebabkan tidak tercapainya peningkatan itu.<sup>8</sup> Selain itu, tindakan sewenang-wenang

---

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup>John F. Cady, *The History of Post War Southeast Asia* (Athens, Ohio: Ohio University Press, 1974), hal. 311; lihat juga Ta Huu Phuong dan Guy Ta, "The Postwar Economic Planning and Development of Vietnam," *Southeast Asian Affairs 1978* (Singapore: ISEAS, 1978), hal. 305.

<sup>6</sup>Lihat uraian mengenai sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Tiga Tahun I dalam *ibid.*

<sup>7</sup>Duiker, *Vietnam*, hal. 103.

<sup>8</sup>Cady, *The History*, hal. 311.

dalam penanganan program land reform telah menimbulkan pemberontakan petani yang pecah pada tahun 1956. Peristiwa ini menyebabkan tergesernya Truong Chin sebagai Sekjen PPV, walaupun kedudukannya sebagai anggota Politbiro masih tetap.

Karena kekurangan pangan akibat hasil panen jelek tahun 1957-1958, sasaran utama Rencana Tiga Tahun II untuk Transformasi Pembangunan Ekonomi dan Kebudayaan (1958-1960) yang diputuskan oleh Sidang Pleno ke-14 Komite Sentral PPV dalam bulan November 1958 lebih ditujukan pada pertanian di samping industri. Untuk mencapai tujuan ini pimpinan partai telah memutuskan untuk memulai proses kolektivisasi pertanian tahun 1958 yang akan dilakukan secara bertahap<sup>9</sup> dan berhati-hati serta dengan pemakaian minim untuk mencegah terulangnya kerusakan.

Pelaksanaan kedua rencana di atas dinilai berhasil dalam beberapa sektor. Sektor industri mengalami kemajuan, tetapi penyediaan pangan yang ingin dicapai dalam kolektivisasi pertanian tidak mencapai sasaran karena kegagalan panen. Dalam proses pelaksanaan ekonomi sosialis, sektor-sektor industri, perdagangan, dan pelayanan masyarakat telah menjadi usaha pemerintah. Demikian pula kolektivisasi pertanian mencapai 80% tanah yang bisa ditanami. Koperasi negara telah meliputi berbagai usaha jasa yang sebelumnya dikelola oleh usaha-usaha bisnis kecil.<sup>10</sup>

Keberhasilan produksi industri itu tampaknya tidak saja didukung oleh kondisi wilayah Vietnam Utara yang kaya hasil tambang, tetapi juga karena bantuan Soviet. Uni Soviet dan RDV telah menandatangani persetujuan kedua negara mengenai bantuan pengetahuan dan teknik dalam bulan Maret 1959. Dana pinjaman Soviet untuk periode tiga tahun berikutnya melebihi bantuan Cina.<sup>11</sup> Oleh karena itu tidak mengherankan jika arah pembangunan ekonomi RDV dalam dasawarsa 1960-an makin menuju kebijakan pembangunan industri berat seperti yang dianut Uni Soviet.

Hal tersebut terlihat dalam Rencana Lima Tahun I (1961-1965) yang ditetapkan oleh Kongres Nasional ke-3 PPV yang menyebutkan sasaran yang

<sup>9</sup>Kolektivisasi dilakukan melalui tiga tahap yaitu: *tahap pertama* adalah penetapan tim kerja musiman di mana keluarga petani bisa mengadakan pembagian kerja selama musim panen, memperoleh pemilikan tanah dan alat-alat serta tetap memperoleh keuntungan; *tahap kedua* adalah koperasi bentuk semi-sosial kelompok kecil desa di mana para petani menggabungkan alat-alat dan tanah mereka dan menerima hasil panen yang sesuai dengan pekerjaan dan tanah mereka dalam suatu organisasi; *tahap ketiga* adalah kolektif pertanian secara penuh. Ini lebih besar daripada koperasi, dan para petani yang bergabung melepaskan hak mereka atas seluruh tanah, alat-alat dan ternak pertanian untuk mendukung organisasi. Pembayaran dibuat atas jumlah tanah yang diberikan oleh keluarga pribadi (Duiker, *Vietnam*, hal. 104).

<sup>10</sup>Cady, "The History," hal. 313; lihat juga Ta Huu Phuong dan Guy Ta, "The Postwar," hal. 306.

<sup>11</sup>*Ibid.*, hal. 312.

ingin dicapai, yaitu meletakkan pokok-pokok sosialis dan dasar-dasar teknis untuk mengembangkan industrialisasi, memberikan prioritas kepada industri berat, dan menyempurnakan pembentukan sosialis. Perkembangan yang semakin menitikberatkan industri berat ini sesuai dengan keinginan Sekjen PPV, Le Duan (yang menjabat Sekjen tahun 1960), yang memberikan perhatian lebih besar kepada revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai faktor-faktor penting untuk melakukan konsolidasi pembangunan sosialis.

Dalam pelaksanaannya, walaupun target dalam Rencana Lima Tahun I tidak pernah tercapai karena terlalu ambisius (sasaran produksi industri 89% dan pertanian 79%),<sup>12</sup> penyempurnaan pembentukan ekonomi sosialis mendapat kemajuan. Pada akhir tahun 1965, sektor pelayanan masyarakat memperoleh peranan penting dalam ekonomi nasional. Dan lebih dari 90% sektor industri telah dinasionalisasikan dan pertanian telah menjadi pemilikan kolektif. Hanya beberapa area, seperti perdagangan domestik, masih menjadi milik swasta (dimiliki oleh kelompok Cina perantauan). Tetapi RDV masih mengalami kekurangan pangan karena rendahnya produksi pertanian di satu pihak dan makin bertambahnya penduduk (2,2% per tahun) di lain pihak. Kurangnya mekanisasi (hanya 7% tanah yang diolah traktor) merupakan salah satu sebab rendahnya produksi pertanian.<sup>13</sup>

Berbeda dengan situasi sebelumnya, dalam periode di atas Ho Chi Minh telah dihadapkan kepada dua pilihan yaitu mengadakan pembangunan ekonomi atau menyelesaikan cita-cita revolusi untuk persatuan Vietnam. Situasi Vietnam Selatan yang makin kacau oleh pergolakan-pergolakan dalam negeri merupakan peluang dan pendorong bagi PPV untuk menyempurnakan perjuangan anti-imperialis. Oleh karena itu Ho Chi Minh memutuskan kedua hal tersebut dilaksanakan sekaligus. Pada tahun 1960 Ho Chi Minh mendukung perjuangan Front Pembebasan Nasional (*NLF*) untuk mengusir Amerika Serikat yang membantu rezim Saigon sebagai sasaran perjuangan anti-imperialis yang belum selesai.

Ternyata keputusan itu telah menghambat dan menghancurkan pembangunan ekonomi sosialis RDV yang sedang berjalan karena pemboman atas Hanoi oleh Amerika Serikat sejak Februari 1965-April 1968. Rencana Lima Tahun yang akan ditetapkan pada tahun 1966 dikesampingkan, dan hanya ditetapkan per tahun. Keadaan darurat telah memaksa pimpinan PPV mengadakan desentralisasi pengawasan atas setiap aspek ekonomi, sehingga menimbulkan berbagai "penyimpangan" dari "cetakan biru resmi" (*blue print*) selama ini. Perencanaan industri dialihkan ke desa-desa dan kader-kader dipekerjakan. Dalam bidang pertanian, dilaksanakan apa yang disebut Tiga Sistem Kontrak dengan berbagai tahap koperasi sub-kontrak dan tanah

<sup>12</sup>Ta Huu Phuong dan Guy Ta, *The Postwar*, hal. 30.

<sup>13</sup>Duiker, *Vietnam*, hal. 104.

pribadi. Masa ini merupakan suatu periode melemahnya pengawasan pusat atas kehidupan ekonomi dan disiplin sosialis. Tetapi langkah ini dianggap sebagai suatu taktik yang layak ditempuh dan diijinkan oleh PPV untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak waktu perang.<sup>14</sup>

Perkembangan di atas telah menimbulkan berbagai tanggapan dalam pimpinan partai. Truong Chin menggambarkan kebijakan tersebut sebagai "suatu bahaya kemunduran prinsip-prinsip sosialis." Secara khusus Truong Chin telah mengecam kompromi yang menyangkut produksi dan menolak gagasan bahwa produksi dapat dilakukan dengan cara apa pun untuk mencapai peningkatan produksi sosial.<sup>15</sup> Bahkan Le Duan yang dikenal lebih moderat menyatakan bahwa munculnya otonomi dalam koperasi selama masa pemboman telah memisahkan setiap kolektif kecil dari kesatuan pimpinan negara proletar. Berbeda dengan Truong Chin, Le Duan tidak terlalu menentang pendekatan manajemen ekonomi yang kurang ortodoks yang harus dimanfaatkan secara tepat, seperti penggunaan harga, gaji, keuntungan, kredit, dan perhitungan biaya.<sup>16</sup>

Walaupun terdapat perbedaan sikap mengenai kebijakan ekonomi sosialis antara Truong Chin dan Le Duan, kedua pimpinan ini tetap sepakat tentang tujuan utama revolusi Vietnam, yaitu pembangunan sosialis. Oleh karena itu dalam Sidang Pleno ke-19 Komite Sentral PPV dalam bulan Januari 1971, Le Duan menekankan perlunya resentralisasi manajemen ekonomi dan pengawasan ketat atas koperasi pertanian.<sup>17</sup> Tampaknya meredanya situasi konflik pada saat itu dan dimulainya usaha-usaha perundingan antara RDV dan Amerika Serikat telah mendorong perubahan kebijakan tersebut. Tetapi usaha-usaha yang ditempuh pada awal dasawarsa 1970-an untuk melenyapkan "kembalinya cara-cara pelaksanaan individualis" telah mendapat hambatan dengan adanya pemboman kembali oleh Amerika Serikat tahun 1972-1973 yang diakhiri dengan Persetujuan Paris 1973.

## PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL

Dicapainya Persetujuan Paris memberikan kesempatan kepada RDV untuk mengadakan pembangunan kembali perekonomiannya yang mengalami

<sup>14</sup>Tan Teng Lang, *Economic Debates in Vietnam, Issues and Problems in Reconstruction and Development (1975-1984)*, Research Notes and Discussions Paper No. 55 (Singapore: ISEAS, 1985), hal. 7.

<sup>15</sup>*Ibid.*, dikutip dari Truong Chin, "Weakness, Shortcomings and Mistakes in Agriculture Cooperatives," *Vietnam: Documents and Research Notes*, Document No. 63 (Saigon: US Mission in Vietnam, Januari 1969), hal. 9.

<sup>16</sup>*Ibid.*, hal. 8, dikutip dari Le Duan, "The Vietnamese Revolution Fundamental Problems, Essential Tasks," *Selected Writings* (Hanoi: Foreign Language Publishing House, 1977), hal. 232.

<sup>17</sup>*Ibid.*

kehancuran karena pemboman. Dalam waktu dua tahun perekonomian RDV mengalami berbagai kemajuan baik industri maupun pertanian.<sup>18</sup> Bantuan dari negara-negara komunis Uni Soviet yang berjumlah US\$767 juta, dan Cina serta Eropa Timur yang berjumlah US\$1,32 milyar dalam tahun 1974-1975 mempunyai peranan penting dalam keberhasilan pembangunan di atas.<sup>19</sup> Tetapi jatuhnya Saigon tahun 1975 menyebabkan PPV harus mengadakan penilaian dan pengaturan kembali perencanaan pembangunan ekonomi sosialis yang mencakup Vietnam Selatan.

Perbedaan ideologi, sistem ekonomi dan kondisi wilayah yang dimiliki oleh kedua bagian Vietnam telah menimbulkan berbagai persoalan dalam pembangunan ekonomi nasional dengan sistem sosialis. Di satu pihak Vietnam Utara harus memperbarui dan memantapkan pembangunan sosialis, dan di lain pihak Vietnam Selatan harus melaksanakan transformasi sistem kapitalis ke sistem sosialis. Tugas ini makin dipersulit oleh situasi dan kondisi kedua bagian negara itu akibat perang.

Sehubungan dengan masalah penyatuan Vietnam Utara dan Selatan telah timbul perdebatan dalam pimpinan PPV mengenai pelaksanaannya, yaitu apakah akan dilakukan secara bertahap atau secara cepat. Le Duan dalam pidato kemenangannya di Komite Sentral PPV bulan Mei 1975 menekankan bahwa di Vietnam Selatan akan diterapkan suatu rezim demokrasi nasional yang baik, suatu ekonomi demokrasi dan nasional yang sejahtera, sedangkan di Vietnam Utara harus dilaksanakan pembangunan sosialis. Demikian pula PM Pham Van Dong menyatakan bahwa rezim baru akan mendorong pelaksanaan secara normal seluruh perusahaan dan pabrik dari semua ukuran untuk mendukung rehabilitasi dan pembangunan ekonomi. Bahkan Truong Chin yang dikenal ortodoks memberikan dukungannya pada penyatuan bertahap dan menegaskan perlunya menyingkirkan perbedaan dan menyatukan persamaan secara bertahap dalam usaha pembangunan sosialis.<sup>20</sup> Demikianlah kemudian diputuskan untuk melaksanakan penyatuan bertahap. Hal ini berarti penerapan sistem campuran yang berangsur-angsur mengarah penyatuan.

Prioritas utama dalam usaha penyatuan Vietnam adalah pemenuhan

<sup>18</sup>Lihat uraian lebih lanjut mengenai kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh RDV dalam pembangunan ekonominya tahun 1973-1975 dalam Hyunh Kim Khanh, "Year One," hal. 290-291.

<sup>19</sup>Lihat Paul Quin-Judge, "A Test of Patience," *FEER* (24 Mei 1984): hal. 80.

<sup>20</sup>Teng Lang, *Economic Debates*, hal. 12, pernyataan Le Duan dikutip dari Le Duan, "Forward to the Future," *Vietnam Courier*, No. 37 (Juni 1975): hal. 7; pernyataan Pham Van Dong dikutip dari Pham Van Dong, "The Nation's New Tasks," *Vietnam Courier*, No. 41 (Oktober 1975): hal. 3; pernyataan Truong Chin dikutip dari Truong Chin, "Toward Completion of National Reunification: The Substance, Objectives and Urgent Problems to be Solved" -- A Political Report to the Political Consultative Conference on National Reunification, at the first session held on 14 November 1975, *Vietnam Courier*, No. 43 (Desember 1975): hal. 4.

kebutuhan pangan dengan memperluas lahan pertanian dan memperluas lapangan kerja bagi 3,5 juta penganggur. Untuk ini direncanakan dua program, yaitu mengembalikan para petani yang mengungsi ke kota selama perang ke daerah asalnya; dan membentuk Zona Ekonomi Baru (ZEB) untuk penempatan para penganggur menjadi petani di desa-desa. Dengan penetapan kebijakan ini terlihat adanya penegasan kembali bidang pertanian dan pergeseran dari penekanan pembangunan industri berat yang ditempuh sejak 1960. Tetapi pelaksanaan ZEB ini tidak mudah dilaksanakan karena faktor-faktor psikologis (keengganan penduduk untuk berpisah dengan familinya dan lingkungan adat), dan investasi dalam infrastruktur (transpor, perumahan).<sup>21</sup>

Dalam bulan-bulan berikutnya setelah percobaan pelaksanaan pembangunan sosialis secara bertahap, PPV menyadari bahwa perbedaan atau pemisahan cara pelaksanaan bagi dua wilayah akan menciptakan kesulitan yang lebih jauh bagi penyatuan kembali. Situasi ini telah menimbulkan perubahan sikap terhadap penyatuan secara bertahap. Truong Chin antara lain mengatakan bahwa diperlambatnya reunifikasi akan menimbulkan kesulitan perencanaan, pembangunan ekonomi nasional dan penyatuan pertahanan nasional. Kekhawatiran dan pertimbangan ini telah mengubah sikap semula dan diputuskan bahwa reunifikasi harus dipercepat. Keputusan ini makin diperkuat dengan ditolaknya Pemerintahan Revolusioner Sementara (*Provisional Revolutionary Government/PRG*) menjadi anggota PBB karena veto Amerika Serikat. Dan timbulnya masalah perbatasan dengan Kampuchea, kekhawatiran tentang hubungan Cina-Vietnam juga telah mendorong keputusan itu. Dengan pertimbangan-pertimbangan ini, dalam bulan Juli 1976 diadakan penyatuan kembali dengan dibentuknya Republik Sosialis Vietnam (RSV). PPV diganti menjadi Partai Komunis Vietnam (PKV).

Kemudian dibentuk pimpinan RSV yang merupakan gabungan dari kedua Pemerintah RDV dan PRG. Ton Duc Thang (sebelumnya Presiden DRV) dipilih menjadi Presiden RSV, Nguyen Luong Bang (sebelumnya Wakil Presiden DRV) dipilih menjadi Wakil Presiden. Nguyen Hun Tho (sebelumnya Presiden Dewan Penasihat PRG) juga dipilih menjadi Wakil Presiden, Truong Chin (sebelumnya Ketua Komite Tetap Majelis Nasional RDV) dipilih menjadi Ketua Komite Tetap Majelis Nasional RSV, dan Pham Van Dong (sebelumnya Perdana Menteri RDV) dipilih menjadi Perdana Menteri RSV. Anggota-anggota Kabinet, termasuk tujuh Deputy Perdana Menteri yang dipilih PM Pham Van Dong, adalah Pham Hung (Selatan), Huynh Tan Phat (Selatan), Vo Nguyen Giap (Tengah), Nguyen Duy Trinh, Le Thanh Nghi (Utara), Vo Chi Cong (Selatan), Do Muoi (Utara).<sup>22</sup>

<sup>21</sup>Ta Huu Phuong dan Guy Ta, "The Postwar," hal. 309; lihat juga Duiker, *Vietnam*, hal. 107.

<sup>22</sup>Huynh Kim Khanh, "Year One," hal. 305.

Gabungan pimpinan Utara dan Selatan tersebut di masa-masa mendatang akan mempengaruhi timbulnya perdebatan mengenai penerapan kebijakan ekonomi nasional RSV, apalagi mengingat perbedaan-perbedaan yang ada di antara kedua wilayah ini. Dari gabungan ini tampaknya tidak sulit diduga bahwa pimpinan dari Utara akan lebih menganut kebijakan yang lebih kaku atau bergaris keras dan akan mempunyai kekhawatiran lebih besar akan terancamnya tujuan pembangunan sosialis dengan adanya penyatuan Selatan yang sebelumnya menganut sistem kapitalis. Sebaliknya pimpinan di Selatan menginginkan kebijakan moderat dan bertahap yang dianggap lebih tepat mengingat sistem kapitalis yang dianut sebelumnya. Kemungkinan penyimpangan pelaksanaan kebijakan dari penetapan pusat (Hanoi) bisa terjadi, terutama apabila pengawasan berada di tingkat lokal.

Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi RSV telah ditetapkan Rencana Lima Tahun II (1976-1980) oleh Kongres Partai ke-4 bulan Desember 1976. Dari petunjuk-petunjuk yang digariskan dan pernyataan para pimpinan, tampak pelaksanaan akan diterapkan lebih luwes dan bertahap, walaupun sasaran yang ingin dicapai tetap yaitu pada waktu yang sama dilaksanakan penyempurnaan sosialis di Utara dan percepatan transformasi sosialis di Selatan.

Sikap tersebut terlihat pada pernyataan Menteri Pertanian Vo Thuc Dong yang menegaskan bahwa "... harus ada kebijakan-kebijakan untuk mendorong petani menghasilkan dan memperoleh keuntungan dari produksi." Ditegaskannya juga bahwa mengingat "cara-cara produksi yang individualis di Selatan, pertanian dapat dipercepat dengan penggabungan pendidikan politik dan insentif material." Kemudian dalam laporan politik dikemukakan bahwa "usaha-usaha kecil yang dapat lebih mudah diawasi lebih dekat, akan diijinkan untuk melanjutkan kegiatannya." Selain itu kegiatan sektor swasta masih diakui untuk memberi keuntungan ekonomi nasional dan kehidupan rakyat. Tetapi usaha-usaha industri berat dan komersial akan segera dinasionalisasikan.<sup>23</sup>

Di samping itu, sikap di atas terlihat dari pertimbangan para pimpinan Vietnam dalam pelaksanaan Rencana Lima Tahun II yang meliputi berbagai faktor, yaitu: (1) peningkatan produksi pertanian untuk kebutuhan sendiri dan ekspor melalui pengaturan kembali program desa besar-besaran dan transformasi sosial secara bertahap; (2) pemanfaatan kemampuan produksi sektor swasta untuk penyediaan barang-barang konsumsi dan devisa; (3) sumber-sumber luar negeri untuk pembiayaan perencanaan, yaitu bantuan asing baik dari negara-negara komunis maupun negara-negara Barat, dan

<sup>23</sup>Lihat pernyataan Vo Thuc Dong dalam Nayan Chanda, "Hanoi Comes Down to Earth," *FEER* (4 Februari 1977): hal. 30; dan "The East-West Touch," *FEER* (17 Desember 1976): hal. 20.

lembaga-lembaga keuangan internasional. Dalam hal ini PKV mengharapkan bantuan Amerika Serikat sejumlah US\$3,2 milyar.<sup>24</sup>

Tetapi setahun kemudian hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kebijakan di atas tidak menggembirakan. Hal ini dikemukakan dalam Laporan Dewan Pemerintah kepada Majelis Nasional dalam bulan Desember 1977 yang menilai keadaan pada saat itu sebagai "salah satu dari sekian banyak kesulitan dan pembangunan tidak seimbang." Dalam sektor swasta terlihat bahwa peluang yang diberikan untuk mendatangkan keuntungan ekonomi dan devisa tidak menunjukkan hasil seperti yang diharapkan. Adanya pemilik-pemilik modal telah mengganggu pengawasan pemerintah dan distribusi. Hal ini disebabkan oleh harga yang lebih tinggi yang ditawarkan kepada para petani. Produksi pertanian tidak menunjukkan hasil. Dan keputusan untuk mempercepat kooperativisasi yang ditetapkan dalam Sidang Pleno ke-2 Komite Sentral sebagai salah satu usaha untuk mengatasi hal ini belum mempunyai program yang terinci.

Perkembangan di atas telah menimbulkan perdebatan di kalangan pimpinan partai. Di satu pihak para pembela pembangunan sosialis bertahap menyatakan bahwa sumber ketidakberhasilan adalah kurangnya insentif dan diperlukan kebijakan yang lebih moderat. Di lain pihak para penentang kebijakan tersebut menganggap ketidakberhasilan disebabkan oleh kurangnya disiplin dan sebab itu diperlukan ikatan atau penerapan pengawasan yang lebih ketat.<sup>25</sup>

Tampaknya tanggapan dari kelompok terakhir ini mendapat perhatian dengan ditempuhnya kebijakan yang lebih kaku (keras) yang dimulai pada awal 1978, walaupun sebenarnya telah diusahakan penerapannya sejak pertengahan tahun 1977 dengan dikeluarkannya keputusan mempercepat kooperativisasi di Selatan. Dan realisasi keputusan ini baru terlihat pada awal Januari 1978 dengan dijelaskannya program percepatan kooperativisasi secara terinci dalam konperensi yang diadakan di Ho Chi Minh City. Ditetapkan juga kerangka waktu untuk penyempurnaan program ini pada akhir tahun 1978.

Perubahan kebijakan itu meliputi juga perdagangan dan usaha-usaha swasta dengan dikeluarkannya perintah oleh pemerintah untuk melenyapkan semua kegiatan ini pada bulan Maret 1978. Hal ini merupakan tugas yang berat bagi Hanoi karena kegiatan-kegiatan ini meliputi 65% di Selatan.<sup>26</sup> Pedagang-pedagang kecil (eceran) tetap tidak berada di bawah pengawasan pemerintah. Walaupun demikian perubahan kebijakan itu tidak dapat

---

<sup>24</sup>*Idem*, "A Last Minute Rescue," *FEER* (27 Februari 1971): hal. 31.

<sup>25</sup>Tan Teng Lang, *Economic Debates*, hal. 18.

<sup>26</sup>Chanda, "Hanoi Takes Grip on the South," *FEER* (26 Mei 1978): hal. 78.

mengatasi keadaan ekonomi. Pada akhir tahun 1978 pertumbuhan rata-rata tiap tahun telah turun menjadi 7% dari 9% tahun 1976. Pengangguran meningkat 13% dari jumlah tenaga kerja 23 juta. Produksi pertanian turun dari 13 juta ton tahun 1976 menjadi 11 juta ton tahun 1978.<sup>27</sup>

Ketidakberhasilan kebijakan di atas disebabkan oleh berbagai faktor intern maupun ekstern. Faktor-faktor intern itu di antaranya adalah pemerintah yang tidak efisien, terjadinya bencana alam (iklim), perbedaan karakter antara bangsa Vietnam Utara dan Selatan, sasaran yang ambisius dari perencanaan, kurangnya insentif dan biaya, kader-kader yang tidak terlatih dan rampil, kelembaman birokrasi, timbulnya korupsi dan masalah kepemimpinan. Faktor lain adalah kesalahan dan kelalaian serius yang dilakukan dalam penilaian situasi dan implementasi garis dan kebijakan Partai, termasuk perencanaan dan proses industri yang rumit dan masalah manajemen. Dilakukannya kesalahan dan kelalaian ini oleh para pimpinan Partai disebabkan kemenangan yang dicapai lebih awal daripada yang diperkirakan dalam mengalahkan Vietnam Selatan yang didukung Amerika Serikat. Mereka tidak lagi melihat kenyataan yang ada dan menganggap semua rencana mudah dan mungkin dicapai dengan cepat (sikap ini disebut "voluntarism").<sup>28</sup>

Akibat-akibat sikap seperti itu terjadi perluasan investasi dalam proyek-proyek yang sangat besar dalam pembangunan industri berat, sementara rehabilitasi negara akibat perang sulit dicapai. Selain itu terjadi pembangunan energi dan transportasi yang hanya bersifat sementara. Para perencana dan manajer kurang mampu melaksanakan tugas mereka, karena masih sedang dalam tahap belajar. Di lain pihak penduduk masih mengalami kekurangan kebutuhan sehari-hari.

Kesalahan menilai perkembangan situasi internasional merupakan faktor ekstern yang menghambat pembangunan ekonominya. Dihentikannya bantuan Cina yang telah menyetujui bantuan US\$1,5 milyar<sup>29</sup> untuk Rencana Lima Tahun II telah melenyapkan harapan Vietnam untuk memperoleh sumber biaya pembangunannya. Kemudian pengusiran suku etnis Hoa telah menyebabkan tutupnya berbagai usaha swasta dan pembangunan di Utara. Sebagai reaksi terhadap sikap Cina, Vietnam telah menerima tawaran Soviet untuk menjadi anggota CMEA (*Council for Mutual Economic Assistance* atau *COMECON*) dalam bulan Juni 1978.

Invasi Vietnam ke Kamboja telah menyebabkan negara ini tidak dapat mengharapakan bantuan baik dari Amerika Serikat, negara-negara Barat,

<sup>27</sup>*Idem*, "Vietnam's Battle of the Home Front," *FEER* (2 November 1979): hal. 45.

<sup>28</sup>Ton That Thien, "Vietnam's New Economic Policy, Notes and Comments," *Pacific Affairs*, Vol. 56 No. 4 (Winter, 1984-84): hal. 693.

<sup>29</sup>*Asian Security 1981* (Japan: Research Institute for Peace and Security, 1981), hal. 60.

maupun Jepang. Sikap ini mendukung sikap negara-negara ASEAN yang bertujuan mengisolasi Vietnam sampai negara ini menarik pasukannya dari Kamboja. Demikianlah akhirnya Vietnam kehilangan sumber-sumber yang pernah ditargetkan untuk membiayai pembangunan perekonomiannya yang merupakan salah satu faktor kegagalan perencanaan ekonominya.

## KEBIJAKAN EKONOMI BARU (NEP)

Menghadapi situasi di atas, pada pertengahan 1979 para perencana Vietnam mempertimbangkan pilihan-pilihan untuk mengatasi hambatan-hambatan pembangunan ekonomi yaitu pilihan antara memperkuat struktur kepemimpinan atau menerapkan penggunaan insentif untuk meningkatkan produksi pertanian dan industri. Hal ini berarti pilihan antara pengetatan pengawasan atau liberalisasi ekonomi.

Perubahan dalam pendekatan pada pembangunan ekonomi ditetapkan dalam Sidang Pleno ke-5 Komite Sentral (Kongres Partai ke-4) dalam bulan Juli 1979. Berdasarkan resolusi sidang ini Dewan Menteri telah menyusun sejumlah kebijakan ekonomi baru, yaitu penghapusan seluruh pembatasan-pembatasan, pengembangan inisiatif dan kreativitas dalam seluruh sektor dan lokal, serta merangsang kegiatan produksi seluruh pekerjaan untuk mempercepat produksi. Selain itu kepentingan-kepentingan masyarakat, kelompok kolektif, dan para pekerja dipadukan secara tepat.<sup>30</sup>

Tetapi hal yang penting dari dihasilkannya resolusi itu ialah tidak terlihat adanya penekanan (penegasan) atas NEP baik dalam pengumumannya maupun pelaksanaannya. Dalam pidato-pidato para pendukung kebijakan tersebut tidak tampak pernyataan-pernyataan yang mendorong rakyat untuk mendukung kebijakan tersebut. Hal ini bukan saja mencerminkan adanya keengganan untuk mendukung kebijakan ekonomi baru itu secara jelas sampai telah dibuktikan realisasinya, tetapi juga menunjukkan tidak adanya suatu konsensus di kalangan partai.<sup>31</sup>

Ketidakjelasan dan keragu-raguan sikap itu tidak berlangsung lama yaitu sampai diadakannya Sidang Pleno ke-6 bulan September 1979 yang menetapkan perluasan program konkret kebijakan ekonomi baru yang akan menjadi dasar pembangunan ekonomi. Dalam sidang ini terlihat jelas adanya dua kelompok yang diidentifikasi sebagai kelompok pragmatis dan kelompok ideologis atau kelompok moderat dan kelompok bergaris keras.

---

<sup>30</sup>Tan Teng Lang, *Economic Debates*, hal. 25-26, dikutip dari editorial *Nhan Dan*, 7 Agustus 1979.

<sup>31</sup>*Ibid.*

Kelompok pragmatis mendukung peranan usaha swasta (produksi modal skala kecil), penggunaan insentif material (kontrak hasil, tingkat kerja dan perbedaan gaji), pengurangan pengawasan pemerintah atas harga, sirkulasi dan distribusi barang-barang, dan pembaruan partai serta birokrasi negara. Sebaliknya kelompok ideologis mendukung pembangunan produksi skala besar, sentralisasi perencanaan negara dan pengawasan atas ekonomi, termasuk sirkulasi dan distribusi barang-barang di Selatan, kolektivisasi pertanian di Selatan dan memperkuat hubungan produksi sosialis.<sup>32</sup> Adanya dua kelompok inilah yang telah menimbulkan perdebatan mengenai kebijakan ekonomi Vietnam yang akan diterapkan.

NEP yang ditetapkan pada Sidang Pleno ke-6 menegaskan kembali keputusan sebelumnya dengan program yang lebih konkret. Dalam NEP akan didorong inisiatif dan kreativitas swasta yang mencakup para petani, produsen, pedagang, perusahaan keluarga dalam produksi dan peredaran komoditi. Semuanya bebas dari pengawasan pemerintah. Dan untuk mendorong distribusi barang yang lebih efisien, PM Pham Van Dong telah memberikan perintah dalam bulan Agustus 1979 untuk menghapus pengawasan pangkalan (stasiun) karena pengawasan ini dianggap menghambat arus lalu-lintas barang dan kegiatan pasar.<sup>33</sup>

Demikian pula birokrasi dan subsidi diperlonggar. Peraturan-peraturan yang menghambat kebebasan bergerak dan inisiatif dihapuskan. Prinsip-prinsip yang diterapkan adalah efisiensi dan pembiayaan sendiri dan kebebasan melaksanakan produksi dan distribusi. Dengan kata lain prinsip-prinsip manajemen perusahaan akan diterapkan sebagai ganti prinsip-prinsip produksi sosialis.<sup>34</sup>

Kemudian baik dalam bidang pertanian maupun bidang industri diadakan perubahan secara radikal.<sup>35</sup> Dalam bidang pertanian, sistem pengumpulan produksi dengan harga yang ditetapkan pemerintah dihapuskan dan diganti dengan sistem kuota. Setiap usaha rumah tangga dapat menjual hasilnya kepada negara dengan jumlah dan harga yang disetujui bersama. Dan mereka dapat melakukan apa yang mereka inginkan dengan sisanya, misalnya dijual ke pasar bebas.

Dalam bidang industri terjadi perubahan radikal dengan diberikannya wewenang kepada para pejabat lokal dan unit produksi yang bebas dalam produksi dan pemasaran. Mereka dapat membeli bahan-bahan mentah di mana

<sup>32</sup>Carlyle A. Thayer, "Vietnam's Two Strategic Tasks: Building Socialism and Defending the Fatherland," *Southeast Asian Affairs 1983* (Singapore: ISEAS, 1983), hal. 302.

<sup>33</sup>FBIS-APA-79-175 (7 September 1979): K 23.

<sup>34</sup>Ton That Thien, "Vietnam's New Economy," hal. 700.

<sup>35</sup>*Ibid.*, hal. 700-701.

mereka menemukannya dan membayar harga pasar untuk itu. Mereka juga dapat menyewa para pekerja secara bebas, membayarnya dengan gaji cukup untuk mendorong produktivitas barang-barang yang lebih baik kualitasnya. Tingkat harga dan bonus dapat ditetapkan sendiri untuk mendorong kapasitas kreativitas mereka secara penuh. Selain itu perusahaan negara dan swasta yang memproduksi untuk ekspor dapat membeli bahan mentah langsung dari luar negeri dan menyimpan devisa mereka. Dalam hal ini tidak diperlukan wewenang alokasi sumber-sumber dari pusat terlebih dulu.

Jika sebelumnya tidak tampak sikap yang jelas dari para pendukung NEP, beberapa bulan kemudian dukungan tersebut jelas terlihat dengan diadakannya kunjungan para pemimpin, seperti Le Duan, Phan Hung, Nguyen Hun Tho, dan Vo Chi Cong ke setiap propinsi di seluruh negara untuk melihat pelaksanaannya. Tetapi ternyata kemajuan yang diharapkan tidak mudah dan tidak bisa segera terwujudkan antara lain karena para penentang NEP telah menghambat dan memperlambat pelaksanaannya. Mereka ini menganggap penggunaan insentif material bagi peningkatan produksi dapat memperkuat individualisme. Mereka khawatir hal ini akan merugikan kepentingan sosialisme.

Demikianlah sampai akhir tahun 1980 perluasan pelaksanaan NEP masih sulit. Ekonomi nasional menunjukkan ketidakseimbangan dalam penyediaan pangan dan mengalami kekurangan lapangan kerja di kota-kota. Ini ditambah lagi dengan bencana alam yang menambah sulit kehidupan rakyat, pertumbuhan ekonomi negatif dan produksi industri turun. Akibat perkembangan ini telah timbul pemberontakan di Nghe Tinh dan Haiphong di Utara, suatu pertanda kesabaran rakyat telah sampai batasnya akibat kesulitan hidup.<sup>36</sup>

Situasi krisis ekonomi di atas justru makin memperkuat keputusan kelompok pragmatis untuk melaksanakan NEP. Dalam pertanian ditempuh kebijakan peningkatan sistem kontrak baik bagi kelompok petani maupun pribadi. Dalam bidang usaha lain pekerja dibayar sesuai dengan pekerjaan yang dihasilkannya, dan bukan gaji yang ditetapkan. Diberikan otonomi yang luas baik pada pertanian maupun industri. Meskipun demikian pemerintah melakukan pengawasan yang menyeluruh atas seluruh perencanaan. Hal-hal ini dipertegas lagi dalam Rencana Lima Tahun III (1981-1985) yang ditetapkan dalam Sidang Pleno ke-9.

Pelaksanaan kebijakan-kebijakan itu, seperti penggunaan sistem kontrak bagi petani, pengelolaan lokal, otonomi yang luas, sistem bonus dan upah kerja telah mendorong keberhasilan. Menurut laporan IMF produksi padi-padian mencapai 16,6 juta ton. Hal ini hampir mencapai kebutuhan RSV yang ditargetkan yaitu 17 juta ton. Hasil industri yang telah dikelola oleh manajemen

<sup>36</sup>Ng Shui Meng, "Vietnam in 1981: The Politics of Preseverance," *Southeast Asian Affairs 1982* (Singapore: ISEAS, 1982), hal. 380.

lokal yang meliputi 2/3 bagian mengalami peningkatan pada akhir tahun 1982. Sebaliknya hasil industri dari 1/3 bagian yang dikelola pemerintah hanya mengalami peningkatan 4%. Beberapa tindakan pemerintah, misalnya kebijaksanaan pajak, telah berhasil membatasi inflasi yang mencapai 50-60% selama beberapa tahun sebelumnya.<sup>37</sup>

Tetapi keberhasilan itu menimbulkan konsekuensi-konsekuensi tertentu. Biaya hidup meningkat karena persediaan kebutuhan tidak memenuhi permintaan rakyat. Para kader partai yang menerima gaji tetap, tidak dapat membeli kebutuhannya dan melakukan korupsi. Selain itu kesempatan untuk melakukan korupsi telah meluas dengan meningkatnya otonomi lokal dan perusahaan-perusahaan swasta. Di lain pihak hanya 50% dari perdagangan kecil dan 40% dari perdagangan besar yang berada di bawah pengawasan pemerintah.<sup>38</sup>

Menanggapi akibat-akibat yang timbul terjadi lagi pertentangan di antara pimpinan partai karena di satu pihak, terutama kelompok ideologis, merasa khawatir bahwa tujuan pembangunan sosialis akan terancam karena makin meluasnya usaha-usaha swasta dengan otonomi yang diperoleh. Mereka menginginkan transformasi di Selatan disempurnakan. Di lain pihak kelompok pragmatis tetap ingin NEP diterapkan karena kemajuan-kemajuan yang dicapai. Pertentangan ini telah menunda diadakannya Kongres Partai ke-5 yang direncanakan pada akhir tahun 1981 dan baru terlaksana pada bulan Maret 1982. Dalam Kongres ini dicapai kompromi yaitu kegiatan swasta untuk sementara tetap dilaksanakan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan transformasi di Selatan harus disempurnakan dalam "hal-hal utama" pada pertengahan dasawarsa 1980-an.

Sebenarnya masih berlanjutnya pertentangan ini karena di satu pihak tidak terlihat realisasi transformasi yang diinginkan, di lain pihak liberalisasi ekonomi mendatangkan kemajuan yang dikhawatirkan akan membuat makin jauh tujuan transformasi tersebut. Hal ini terlihat dari berita-berita resmi selama tahun 1983 yang mempersoalkan kapan pelaksanaan transformasi dimulai. Di lain pihak terlihat kemajuan pesat dalam perkembangan perusahaan ekspor-impor di Selatan yang berada di bawah pimpinan Nguyen Van Linh (Sekjen Komite Partai Kotapraja) dan Mai Chi To (Ketua Komite Rakyat) yang telah mengadakan percobaan dalam manajemen birokrasi dan subsidi. Kemudian timbul persaingan tidak sehat di antara perusahaan-perusahaan tersebut yang menawarkan harga yang terendah dalam penawaran produk ekspor yang sama pada tahun 1981.<sup>39</sup>

<sup>37</sup>*International Monetary Fund Report*, "Vietnam Recent Economic Development," 22 Juni 1983, hal. 9; lihat juga Judge, "A Test of Patience," hal. 81.

<sup>38</sup>Lihat Chanda, "Vietnam in 1983: Keeping Ideology Alived," *Asian Survey*, Vol. XXIV, No. 1 (Januari 1984): hal. 30; *Idem*, "A Liberal Malady," *FEER* (6 Oktober 1983): hal. 48.

<sup>39</sup>*Idem*, "The New Revolution," *FEER* (10 April 1986): hal. 25.

Demikian pula pada tahun 1982 di Propinsi Long An telah dilakukan percobaan penerapan gaya manajemen baru, yaitu distribusi dihapuskan dan para pekerja selain mendapat gaji total juga bonus (gaji ekstra menurut produktivitas). Dan sebagai ganti ketergantungan suplai bahan mentah pada pemerintah, para manajer mencari bahan mentah mereka sendiri dengan harga pasar dan menentukan harga produksi atas dasar perhitungan biaya. Ternyata percobaan ini berhasil meningkatkan produksi penghasilan para pekerja dan pendapatan pemerintah.<sup>40</sup>

Kasus itu diberitakan telah menimbulkan masalah dengan adanya ancaman penahanan atas para manajer lokal oleh pimpinan Hanoi jika percobaan tersebut tidak dihentikan. Dan ketika mereka mengadukan hal ini kepada Linh, dia bersedia menanggung risiko itu dan percobaan tetap dilaksanakan. Tanggapan itu merupakan petunjuk bahwa pimpinan lokal bersedia menerima risiko pribadi untuk penerapan suatu percobaan kebijakan. Berkaitan dengan perkembangan ini timbul reaksi yang berbeda di kalangan pimpinan partai. Sementara Le Duan, Pham Van Dong dan Le Duc Tho secara hati-hati mendukung percobaan kebijakan di atas, pihak lainnya, seperti Truong Chin, Do Muoi, dan To Huu tetap melanjutkan keberatan-keberatan mereka.<sup>41</sup>

Barulah pada akhir tahun 1983, pertentangan partai untuk sementara terpecahkan ketika Le Duan yang hadir dalam pertemuan Komite Partai Kota-praja di Ho Chi Minh City mengemukakan akan diadakannya transformasi di Selatan. Dan untuk menimbulkan kepercayaan terhadap ucapannya itu Nguyen Van Linh dan Mai Chi To digeser dari posnya. Tindakan lebih konkret ialah sejumlah perusahaan ekspor-impor digabungkan menjadi perusahaan tunggal yang diatur dengan ketat oleh negara. Ternyata hasil yang dicapai mengalami kemunduran akibat penggabungan dan intervensi pusat. Pada tahun 1985 hasil ekspor RSV mencapai US\$100 juta, lebih rendah daripada hasil ekspor pada akhir tahun 1982 yang mencapai US\$200 juta.

Begitu pula dengan kolektivisasi pertanian dipercepat. Pada tahun 1984 dilaporkan 30-35% dari seluruh pertanian di Selatan telah diubah menjadi koperasi, suatu peningkatan yang penting dalam kolektivisasi sejak tahun 1981 sebelum diadakannya Kongres Partai ke-5. Tetapi bidang-bidang lain mengalami kelambatan dalam transformasi, karena sektor-sektor swasta masih menguasai bidang pangan, kehutanan, perikanan, dan 1/3 dari seluruh barang-barang konsumsi yang dihasilkan oleh negara dilaporkan telah dijual di pasar bebas. Sementara itu walaupun tingkat kolektivisasi bertambah,

---

<sup>40</sup>*Ibid.*

<sup>41</sup>*Ibid.*

sistem kontrak produksi diterapkan meliputi hampir 90% dari seluruh kolektivisasi di seluruh negara.<sup>42</sup>

Walaupun demikian, perkembangan ini tidak mengakhiri pertentangan di kalangan partai dan liberalisasi ekonomi masih memerlukan berbagai proses pelaksanaan. Dalam bulan Juni 1985 diadakan Sidang Pleno ke-8 Komite Sentral yang menetapkan kebijakan-kebijakan mengenai harga, gaji dan uang, yaitu penghapusan korupsi dan penghentian subsidi harga dan gaji. Kebijakan ini dinilai merupakan kebutuhan mendesak dan merupakan suatu keputusan yang mengubah ekonomi sosialis. Harga akan ditentukan atas dasar perhitungan biaya bagi seluruh pengeluaran dalam produksi dan penerapan gaji dilaksanakan untuk distribusi kesejahteraan kepada pekerja dan pembayaran yang berdasarkan "kebaikan" harus dihapuskan. Atas dasar keputusan ini rakyat dan kader-kader pemerintah dapat membeli apa yang mereka butuhkan dengan gaji tersebut dan tidak lagi harus terbatas pada barang-barang di toko distribusi. Dengan demikian keputusan ini akan mengenalkan sistem tingkat gaji dan otonomi kepada para manajer untuk menyewa (menggaji) pekerja, serta menetapkan sasaran produksi dan harga.

Tetapi kepuasan dengan keputusan-keputusan yang diambil dalam Sidang Pleno di atas disusul dengan kemarahan rakyat ketika keluar keputusan berikutnya mengenai reformasi moneter dalam bulan September 1985, yaitu diubahnya nilai 10 Dong lama dengan 1 Dong baru (1 berbanding 10).<sup>43</sup> Kembali timbul krisis ekonomi akibat keputusan ini. Timbul kenaikan harga, kekacauan dalam struktur harga dan upah yang memacetkan, dan makin langkanya barang-barang yang terus berlangsung telah menghancurkan perekonomian Vietnam. Keadaan itu diperburuk lagi oleh makin meningkatnya jumlah penduduk dan pengangguran serta menurunnya laju pertumbuhan ekonomi.

Akibat perkembangan ini keluar keputusan perombakan Kabinet oleh Dewan Negara RSV yang diumumkan dalam Komunike tanggal 21 Juni 1986, yaitu setelah Sidang Pleno ke-6 Komite Sentral PKV tanggal 19 Mei-6 Juni 1986. Dalam perombakan ini telah diganti delapan menteri, termasuk Wakil PM To Huu. Mereka ini adalah menteri-menteri yang menangani bidang-bidang komunikasi, transpor, keuangan, perdagangan dalam negeri dan luar negeri, bank negara, pertambangan dan batubara, dan kebudayaan. Selain itu Sidang Pleno ke-6 menghasilkan kebijakan-kebijakan baru, yaitu: desentralisasi yang besar, pembubaran badan-badan milik negara yang jelas tidak mampu lagi memenuhi standar umum dalam memproduksi, pemberian kebebasan kepada para manajer yang dinilai berhasil untuk memecat atau mengangkat

<sup>42</sup>Duiker, "Vietnam in 1984, between Ideology and Pragmatism," *Asian Survey*, Vol. XXV, No. 1 (Januari 1985): hal. 98-99.

<sup>43</sup>Chanda, "The New Revolution," hal. 26.

tenaga kerja, dan pemberian otonomi kepada pimpinan bidang-bidang usaha untuk memperoleh pinjaman bagi pengembangan usahanya.

Penggantian menteri-menteri dalam bidang-bidang tertentu mencerminkan kegagalan pelaksanaan kebijakan ekonomi dalam bidang-bidang ini dan diganti dengan orang-orang yang telah berhasil melakukan pembaruan ekonomi dan menjadi barisan depan pembaruan di beberapa propinsi. Penggantian ini diperlukan untuk melancarkan pelaksanaan kebijakan-kebijakan ekonomi yang diputuskan dalam Sidang Pleno ke-6 yang makin menunjukkan liberalisasi ekonomi yang lebih luas.

Dari perkembangan pelaksanaan kebijakan-kebijakan ekonomi selama periode di atas, yaitu sejak penetapan NEP dapat dilihat faktor-faktor penyebab kegagalan tersebut. Faktor-faktor intern yang sebelumnya ada tampaknya masih berlanjut, ditambah dengan masalah ketidaktrampilan dalam melaksanakan ide dan tugas, pelaksanaan yang tergesa-gesa, pertentangan pendapat di kalangan pimpinan, timbulnya kekeliruan-kekeliruan baru di samping keberhasilan yang dicapai, dan kekurangan biaya.

Faktor terakhir ini merupakan salah satu hambatan utama bagi RSV dalam pembangunan ekonominya. Ditetapkannya kebijakan pembiayaan sendiri dan efisiensi tampaknya sulit dilaksanakan akibat ketidakmampuan negara karena perang dan timbulnya korupsi. Di lain pihak bantuan Soviet dan negara-negara Eropa Timur telah menimbulkan masalah baru bagi Vietnam. Timbul kekesalan negara-negara ini dengan perkembangan ekonomi Vietnam yang tidak membagi imbalan bagi investasi mereka dalam proyek-proyek Vietnam. Hal ini menyebabkan negara-negara ini meningkatkan permintaan atas andil yang lebih besar, seperti penetapan batas waktu bagi proyek produksi patungan. Keadaan ini tidak menguntungkan Vietnam yang masih mengalami isolasi (embargo) ekonomi dari negara-negara Barat, termasuk Jepang.

Perombakan Kabinet dengan tokoh-tokoh pembaru dan dihasilkannya kebijakan-kebijakan baru telah mempengaruhi pergantian pimpinan PKV karena meninggalnya Sekjen PKV, Le Duan. Kongres ke-6 PKV bulan Desember 1986 telah melahirkan pergantian kepemimpinan di negara ini. Kedudukan Sekjen PKV berpindah tangan dari Truong Chin kepada Nguyen Van Linh. PM Pham Van Dong diganti oleh Vo Chi Cong. Nguyen Van Linh dan Vo Chi Cong merupakan tokoh pembaru yang telah berhasil mengadakan pembangunan ekonomi di berbagai propinsi. Diharapkan dengan terpilihnya mereka ini pembaruan ekonomi dapat berjalan lebih baik dan pertentangan pendapat dapat diperlunak, kalau tidak dapat dihapuskan, karena pelaksanaan NEP membutuhkan tenaga-tenaga yang trampil dan berani mengemukakan gagasan-gagasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk pembangunan negara.

## IMPLIKASI DAN PROSPEK PEMBARUAN EKONOMI

Dari uraian perkembangan ekonomi Vietnam dapat dilihat bahwa penerapan kebijakan ekonomi yang kelihatan menyimpang dari prinsip-prinsip sosialis pernah terjadi pada saat pemboman Hanoi oleh Amerika Serikat. Pada waktu itu telah diadakan desentralisasi, pengurangan pengawasan pemerintah, penggunaan sistem kontrak dan otonomi dalam koperasi. Dan kebijakan ini berlaku di Vietnam Utara. Pada periode ini terlihat sikap pragmatis melalui pernyataan-pernyataan mereka yang dianut oleh Le Duan dan Pham Van Dong. Truong Chin sejak awal terkenal dengan sikap-sikapnya yang ortodoks.

Dewasa ini kebijakan seperti itu ditempuh kembali, tidak saja lebih luas dan konkret tetapi juga mencakup Vietnam Selatan. Kebijakan Ekonomi Baru (NEP) antara lain meliputi penghapusan manajemen birokrasi pusat, penghentian subsidi atas harga dan gaji, sistem kuota, otonomi lebih luas di tingkat lokal, penerapan insentif material dan kekuatan pasar. Begitu pula sikap pragmatis makin menonjol dengan adanya kelompok pimpinan Selatan.

Timbulnya pembaruan politik setelah pembaruan ekonomi adalah mungkin mengingat peluang yang ada. Bukan tidak mungkin tuntutan-tuntutan dalam pembaruan ekonomi akan meningkat menjadi tuntutan yang lebih luas dalam bidang politik, terlebih lagi dengan adanya kelompok pragmatis kaum muda yang menjadi pimpinan partai. Mereka ini akan lebih berani menempuh kebijakan baru tidak saja dalam bidang ekonomi, tetapi juga politik.

Salah satu contoh adalah sikap Nguyen Van Linh sebagai pimpinan lokal yang berani mengambil risiko penahanan, karena percobaan gaya manajemen baru yang berhasil diterapkan oleh para manajernya. Oleh karena itu adanya wewenang lokal dan otonomi yang diberikan kepada pimpinan lokal akan memberikan peluang bagi tuntutan yang lebih luas yang meliputi bidang politik, terutama apabila pelaksanaan NEP mengalami kemajuan yang menonjol.

Kemungkinan itu terlihat jelas setelah diadakannya Kongres Partai ke-6 yaitu ketika diadakan pemilihan anggota Majelis Umum baru pada tanggal 20 April 1987 yang lebih terbuka dan bebas daripada sebelumnya. Untuk pertama kalinya kampanye para calon dan pertemuan dihadiri oleh umum dan para pemilih dapat mengemukakan kritik-kritik dan keluhan-keluhan mengenai berbagai persoalan. Ketua PKV yang baru telah mendengarkan keluhan-keluhan mereka pada pertemuan bulan Maret 1987 mengenai kurangnya barang-barang konsumsi, masalah perumahan, kurangnya sekolah dan

meningkatnya pengangguran di kalangan kaum muda.<sup>44</sup> Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Walaupun hal ini belum diterapkan di seluruh negara, peristiwa itu merupakan petunjuk jelas adanya usaha-usaha pembaruan politik.

Walaupun demikian perkembangan ini masih perlu diamati kemungkinan-nya, karena terjadinya pembaruan baik dalam bidang ekonomi maupun politik belum tentu mendapat dukungan sepenuhnya dari pimpinan partai lainnya. Selain itu kebutuhan tenaga-tenaga yang trampil dan pemikiran yang tajam dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi baru dapat mengalami hambatan karena banyaknya para kader partai yang masih dipakai karena pertimbangan kesetiaan mereka pada Zaman Revolusi. Mereka ini masih menganut sikap yang lebih kaku, termasuk dalam bidang politik.

Di samping faktor-faktor intern partai ini, faktor lain yang ikut menentukan keberhasilan pembaruan ekonomi Vietnam dan pengaruhnya atas pembaruan politik adalah situasi internasional. Dalam hal ini hambatan utama Vietnam adalah peranannya dalam Konflik Kamboja. Bagaimanapun pembaruan ekonomi akan membutuhkan hubungan yang lebih luas terutama bantuan asing dan kerjasama ekonomi dengan negara-negara lain. Selama ini masalah Kamboja telah menjadi perintang bagi ditingkatkannya hubungan dan kerjasama demikian, terutama bantuan Barat, termasuk Jepang. Negara-negara ini mendukung strategi ASEAN untuk mengisolasi Vietnam sampai negara ini menarik pasukannya dari Kamboja. Oleh karena itu ketika terjadi pendekatan swasta Jepang untuk mengadakan penanaman modal di Vietnam, negara-negara ASEAN mengajukan protes kepada Jepang, karena dapat melemahkan strateginya terhadap Vietnam.

Di lain pihak walaupun Uni Soviet telah berjanji untuk meningkatkan bantuan ekonominya kepada Vietnam yang dikemukakan oleh Ligachev dalam Kongres PKV ke-6, negara ini juga mengeluh bahwa Vietnam tidak memanfaatkan bantuan yang telah diberikan dengan efektif. Selain itu bantuan Soviet yang makin besar akan mengakibatkan ketergantungan yang makin besar Vietnam pada negara ini.

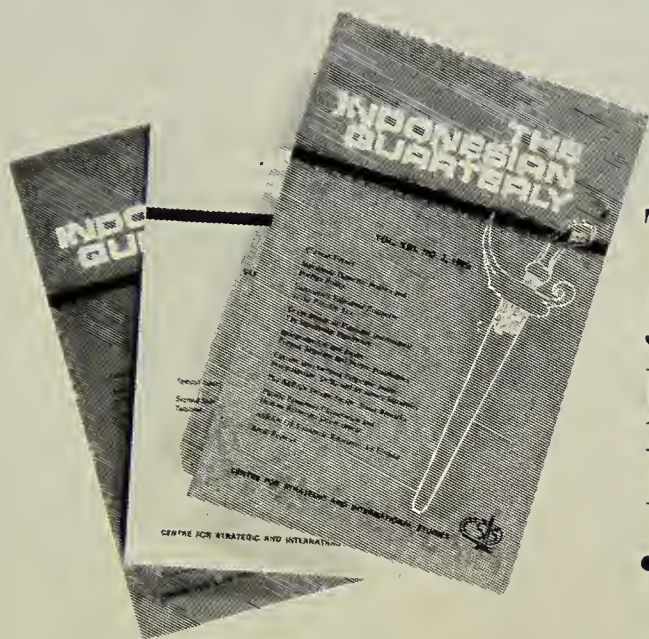
Dengan demikian masa depan pembaruan ekonomi Vietnam akan ditentukan oleh berbagai faktor intern dan ekstern. Antara lain seberapa jauh Vietnam dapat memperbaiki kekeliruan-kekeliruan yang pernah dilakukan sebelumnya dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi. Begitu pula iklim yang baik dan turunnya pertambahan penduduk akan sangat mendukung pembaruan ekonomi Vietnam. Selain itu pelaksanaan pembaruan ekonomi Vietnam akan tergantung pada keberhasilan mengatasi perbedaan pendapat yang timbul antara kelompok "pragmatis" dan "ideologis."

---

<sup>44</sup>Murray Hiebert, "Elections with Difference," *FEER* (7 Mei 1987): hal. 35.

Pembaruan ekonomi dan politik yang berhasil mungkin akan dapat memberi sumbangan positif kepada stabilitas dan perdamaian kawasan Asia Tenggara, kalau keberhasilan pembaruan itu akan menampilkan Vietnam yang moderat dan pragmatis. Tetapi kegagalan dalam hal ini dapat mengembalikan Vietnam sebagai negara sosialis yang bergaris keras, dan bukan tidak mungkin ekspansif, serta makin tergantung kepada Uni Soviet.

# The Indonesian Quarterly



## The Outstanding Journal on Indonesian Problems

- The journal for scholars, diplomats, and journalists on Indonesian problems and related issues
- Keep you up-to-date
- Mostly by Indonesian writers
- Published since 1972 in January, April, July and October.

CSIS also publishes an Indonesian Journal ANALISA and books on socio-economic and international affairs:

- **Trends in Marketing,**  
*J. PANGLAYKIM.*
- **Law in Indonesia,** *SOEBEKTI*
- **Golkar: Functional-Group Politics in Indonesia**  
*Julian M. BOILEAU*
- **Pacific Economic Cooperation: The Next Phase,**  
*Hadi SOESASTRO and HAN Sung-joo (Eds.)*



Centre for Strategic and International Studies  
Jalan Tanah Abang III/27, Jakarta 10160.  
Phone : 356532-35. Telex : 45164 CSIS 1A.